

**TESIS**

**PENGORGANISASIAN GERAKAN KELOMPOK  
PETANI DALAM AKSI PENDUDUKAN LAHAN  
DI DESA SUMBERANYAR PASURUAN**

**(STUDI KASUS)**

kk

TS 02/07

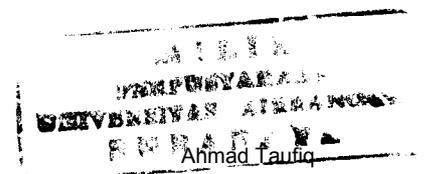
Tau

P



**AHMAD TAUFIQ**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**



**PENGORGANISASIAN GERAKAN KELOMPOK PETANI DALAM  
AKSI PENDUDUKAN LAHAN  
DI DESA SUMBERANYAR PASURUAN  
(STUDI KASUS)**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga**

**OLEH**

**AHMAD TAUFIQ  
NIM: 099813043/M**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Tanggal 1 Agustus 2002**

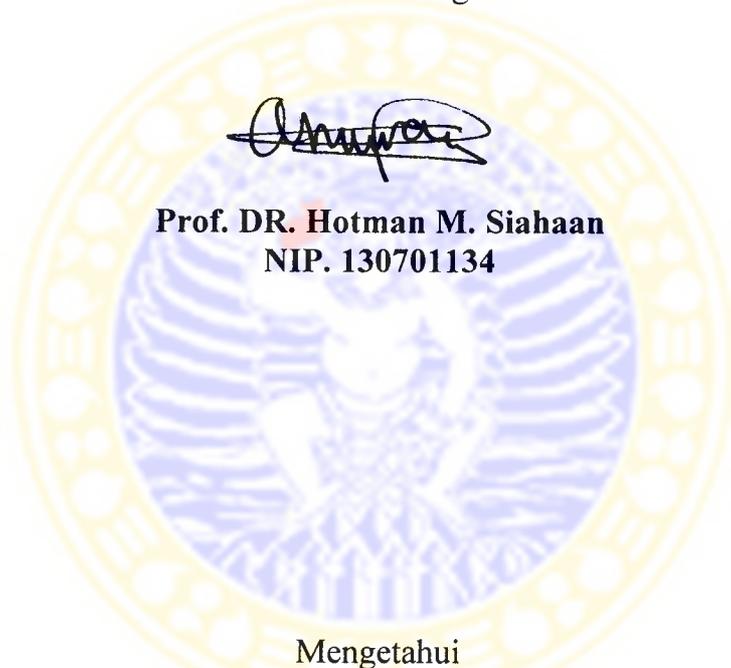
## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,  
pada tanggal 1 Agustus 2002

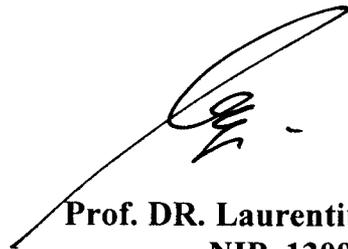
Oleh  
Pembimbing



**Prof. DR. Hotman M. Siahaan**  
**NIP. 130701134**



Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya



**Prof. DR. Laurentius Dyson P, MA**  
**NIP. 130937724**

**Telah diuji pada  
Tanggal 19 Juli 2002  
PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. DR. Hotman M. Siahaan, MA**  
**Anggota : 1. DR. Laurentius Dyson P, MA**  
**2. Drs. Priyatmoko, MA**  
**3. Drs. Doddy S. Singgih, MS**  
**4. Drs. Suhargo Prayitno, MA**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillah sebagai ekspresi syukur keharibaan Allah SWT yang rahmat, karunia dan kemurahannya tiada henti tercurahkan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Demikian pula Sholawat dan Salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan terangnya akal budi dan keselamatan kepada segenap manusia.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, MA selaku pembimbing dan pakar yang paripurna dalam teori-teori perlawanan petani. Melalui kejelian dan arahan beliau, saya dengan mudah membaca dan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian hingga tesis ini selesai disusun.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada:

Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. H. Soedarto, dr., DTMH., Ph.D., yang kemudian dijabat oleh Prof. Dr. Med. Puruhito, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Soedijono, dr., kemudian dijabat oleh Prof. Dr. Muhammad Amin, M.Sc., atas kesempatan mengikuti dan menyelesaikan Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Tim Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, MA., DR. Laurentius Dyson P, MA., Drs. Priyatmoko, MA., Drs. Doddy S. Singgih, MS., dan Drs. Suhargo Prayitno, MA.

Tidak lupa penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada Daniel T. Sparringa, MA., Ph.D yang telah membantu melalui diskusi singkat menemukan perspektif dalam penelitian ini. Demikian juga saya sampaikan terima kasih pula kepada staf pengajar, tata usaha dan segenap pegawai Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, lebih khusus kepada Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., dan Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D., atas perkuliahan-perkuliahannya yang mencerahkan dan membebaskan.

Doa yang tulus saya haturkan untuk ayahanda tercinta Almarhum KH Abdurrahman AS yang menghadap Sang Khaliq di tengah saya menempuh studi. Kepada Ibunda tercinta Hj. Musyaffa'ah Ridlwan, terima kasih dan kepatuhan tiada terhingga saya sampaikan. Kedua beliau adalah pengarah, penyemangat dan tautan lahir batin, berkat jerih payah dan doanya yang menyejukkan tiada henti. Kepada istri dan anakku, Tsuroya dan Muhammad Iqdam Faidhirrahman, kalian adalah karunia terindah...

Surabaya, Agustus 2002

**AHMAD TAUFIQ**

## RINGKASAN

Persoalan tanah adalah sumber utama dari seluruh gagasan tentang perlawanan di Sumberanyar. Ketiadaan akses pada tanah adalah awal dari perjalanan panjang penderitaan mereka. Hanya saja, perlawanan yang terjadi di Sumberanyar tidak hanya menyangkut keruntuhan daya tahan petani dalam penderitaan hidup mereka, namun yang jauh lebih penting adalah akumulasi harapan-harapan mereka sendiri yang bertemu dengan situasi yang mengantarkan mereka untuk merebut perubahan bagi kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu, fenomena penindasan dan penderitaan petani lebih menjadi pengantar bagi munculnya kesadaran perlawanan mereka yang menghendaki terdapatnya basis material yang jelas.

Dengan meletakkan dasar perlawanan mereka pada perjuangan perebutan lahan, maka aksi *reclaiming* menjadi puncak tertinggi gerakan mereka. Lebih jauh fenomena ini menjelaskan bahwa event agraris yang menjadi tipe utama perlawanan petani di Sumberanyar hanya menyangkut fokus yang secara eksklusif tertuju pada redistribusi tanah. Karena itu mereka sama sekali tidak sedang merancang sebuah gerakan revolusioner yang berdampak luas pada perubahan radikal suatu sistem ekonomi politik.

Sementara itu, pengorganisasian gerakan di Sumberanyar adalah sangat terkait dengan kesadaran para petani akan adanya hubungan resiprokal antara kepentingan-kepentingan individualnya dengan kepentingan-kepentingan umum di dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki. Petani sesungguhnya mempunyai rasionalitas sendiri tentang kebutuhan dan kepentingannya yang secara reflektif dimunculkan dalam tindakan-tindakan individual mereka. Agregasi tindakan-tindakan individual ini untuk menjadi tindakan kolektif, karenanya, sangat memerlukan kondisi-kondisi tertentu di mana para petani menurut kepentingan-kepentingan individualnya merasa perlu mengalokasikan sumberdaya mereka untuk kepentingan bersama. Pengorganisasian, dengan demikian, adalah proses panjang pengelolaan kesadaran dan kepentingan petani sebagai kelompok kekuatan perlawanan.

Pada tingkat berikutnya, perlawanan petani sesungguhnya juga memuat gagasan perihal dialektika antara petani sebagai agen di satu sisi dan struktur yang terbangun dalam gerakan di sisi yang berbeda. Sebab, gerakan demikian tidak cukup hanya dijelaskan dari situasi-situasi sosial yang melingkupi kehidupan petani tanpa melibatkan bangunan rasionalitas petani sendiri dalam memaknai kehidupan keseharian mereka. Petani bukanlah sekadar obyek dari sebuah tatanan struktural yang membelenggu ataupun organisasi gerakan yang rigid, mereka adalah juga aktor-aktor yang bertindak secara otonom seukur dengan rasionalitas yang mereka pelihara.

## ABSTRACT

The study entitled “The Peasant Group Movement Organization in the Action of Land Occupation of Sumberanyar Pasuruan” was encovered by an empiric case of land occupation by peasant of Sumberanyar Pasuruan in 1999. Recent study on peasant resistance in Indonesia indicated that: (1) Generally, peasant movement was characterized as archaic, sporadic and local. Their organization, strategy and tactics have been ordinary simple. (2) Movement of peasant resistance was not to upset and change the dominating system, but only to have survival. (3) Involvement of activist of non-governmental organization existed in the peasant organization. This research study was focused on the peasant organization in reclaiming action, in which the researcher questioned about their motivation to perform reclaiming action, and about the way to organize peasant in their resistance.

In answering this question, the researcher used case study methode, which was supported by some relevant theories; (a) peasant resistance theory of Scott and Paige, (b) Freire’s theory of consciousness, (c) Popkin’s theory of peasant resistance organization, and (d) theory of structuration from Giddens.

Therefore, in collecting data, the researcher performed some technics; indepth interview with agents of the action, documentary research, and field direct observation in Sumberanyar Pasuruan. The Collected data then was analyzed in interactive technics with three main models; reducting and showing the data and taking conclusions or verification.

The result of the study had conclusions that (1) The action of land accupation in Sumberanyar was prefer to be social phenomenon of peasant group movement living on the agrarian event which the basic materials was depended on the need to exploite the agricultural land. (2) Movement organization in rural society showed the practices in managing peasant consciousness as the agents with rational otonom. (3) The leading elites in the movement followed the former elites who adopted charismatic-cultural-religiuous reason as the basic, but did not regarded the peasants as easily mobilized adherents.

The theoritical implication of the result of this study showed that the prepositions of the theoritical explanation constructed an understanding of Sumberanyar peasant resistance, but few of the problem complex was not reviewed in a whole. This study particularly revealed new and special phenomenons, which needed indepth eclectic clarification.

Finally, the result of this study is expected to be a positive contribution for everyone who has interest in understanding the peasant resistance in Indonesia. Furthermore, this study is hoped to motivate others to perform more indepth and holistic studies in the future.

*Key words:* peasant resistance organization, consciousness management, peasant’s rational otonom, peasant as the agent, and agrarian event.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Prasyarat Gelar .....	ii
Pengesahan .....	iii
Penetapan Panitia Penguji .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Ringkasan .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Bagan .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORETIK</b>	
2.1 Perlawanan Petani di Indonesia .....	18
2.2 Teori Perlawanan Petani .....	21
2.3 Kesadaran dan Rasionalitas dalam Perlawanan Petani .....	28
2.4 Pengorganisasian Perlawanan Petani .....	33
2.5 Kerangka Pemikiran berdasarkan Teori .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Setting Penelitian .....	41
3.3 Unit Analisis .....	42
3.4 Pemilihan Informan .....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6 Teknik Analisis Data .....	48
3.7 Proses Penelitian .....	50
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DESA SUMBERANYAR</b>	
4.1 Desa Sumberanyar dan Masyarakatnya .....	56
4.2 Struktur Ekonomi Masyarakat .....	59
4.3 Demografi Desa .....	62

4.4	Pemerintahan Desa .....	64
4.5	Sistem Sosial Keagamaan .....	67
<b>BAB V DESKRIPSI HASIL PENELITIAN</b>		
5.1	Sengketa Agraria dan Aksi Reclaiming .....	69
5.2	Basis Sengketa Tanah di Sumberanyar .....	77
5.3	Perlawanan "Tercecer" Petani .....	84
5.4	Reformasi sebagai "Kunci Pembuka" .....	89
5.5	FKTS sebagai Wadah Perjuangan .....	95
5.6	Kerja-kerja Pengorganisasian dan Aksi Pendudukan Lahan .....	99
<b>BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>		
6.1	<b>Kesadaran sebagai Basis Pengorganisasian .....</b>	<b>105</b>
6.1.1	Makna Penderitaan bagi Masyarakat Sumberanyar .....	108
6.1.2	Penipuan "sang makelar": 'uang' atau tanpa 'uang' .....	116
6.1.3	Harapan Individu atau Bersama .....	121
6.1.4	Serangan Langit atau Bumi .....	129
6.1.5	Peran Elit dan Aktor Aktivistis Ornop .....	134
6.2	<b>Pengorganisasian Gerakan di Sumberanyar .....</b>	<b>145</b>
6.2.1	Karakter Pengorganisasian Petani di Sumberanyar .....	148
6.2.1.1	Kepemimpinan/Otoritas .....	154
6.2.1.2	Koordinasi .....	159
6.2.1.3	Keterbukaan .....	165
6.2.1.4	Konsensus .....	169
6.2.2	Pengorganisasian dan Kekuatan Perlawanan Petani .....	175
6.3	<b>Implikasi Teoretis .....</b>	<b>179</b>
6.3.1	Event Agraris dalam Perlawanan Petani .....	180
6.3.2	Rasionalitas dalam Pengorganisasian Perlawanan Petani .....	187
6.3.3	Konsep Kesadaran dalam Perlawanan Petani .....	193
<b>BAB VII KESIMPULAN</b>		
7.1	Kesimpulan .....	201
7.2	Saran .....	206
	Daftar Pustaka .....	xiii

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Peta Konflik Pertanahan di Jawa Timur .....	8
Tabel 3.1	Profil Informan .....	44
Tabel 4.1	Tabel Keluarga Sejahtera desa Sumberanyar .....	64
Tabel 5.1	Tabel Sengketa Agraria (1970 – 2000) dan Luas Lahan di Jawa Timur .....	71
Tabel 5.2	Perbandingan Jenis Kekerasan dan Korban Kasus Sengketa Tanah di Jawa Timur Pasca Rezim Suharto .....	72
Tabel 5.3	Kasus Tanah di Jawa Timur di antara Daerah-daerah lain di Indonesia .....	73



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Pemikiran berdasarkan Teori .....	39
Bagan 3.1	Alur atau Proses Penelitian .....	55
Bagan 6.1	Bagan Pengorganisasian Petani .....	174



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Masalah pertanahan di Indonesia adalah konteks nyata bagi terangkainya konflik-konflik maupun pergolakan, terlebih di wilayah pedesaan. Ketika tanah yang merupakan basis penghasilan masyarakat pedesaan semakin langka, seiring dengan semakin maraknya komersialisasi tanah mulai dari kurun kolonial bahkan sampai kurun pembangunan, maka tak pelak lagi kerawanan-kerawanan bagi sebagian besar petani tidak dapat dihindarkan. Terlebih hal ini diperberat oleh ketidakberdayaan membendung deras arus modal yang semakin menusuk jauh pada sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi mereka.

Dengan pendekatan kapitalistik, tanah dipandang sebagai komoditas strategis yang utamanya diorientasikan bagi tersedianya sejumlah besar lahan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan. Kebutuhan dunia industri, termasuk juga sektor perkebunan, terhadap tanah yang begitu besar dengan sendirinya melibas tanah-tanah pertanian milik para petani kecil. Karena itu, dalam konteks kehidupan kaum tani, pembangunan tidak lebih merupakan

penetrasi eksternal yang menggerogoti sumber daya mereka hingga tidak jarang meletupkan perlawanan.

Bila ditilik secara historis, di Jawa pada zaman pemerintahan Raffles (1811-1816) kelangkaan tanah memang belum begitu terasa, karena penduduknya diperkirakan baru 10 juta orang. Namun sekitar 90 tahun kemudian, kurang lebih pada akhir abad ke-19, sudah terdapat kantong-kantong kemiskinan dan keterbelakangan di daerah pedesaan Jawa sebagai akibat mulai meningginya kepadatan penduduk dengan disertai oleh hadirnya modal swasta di negeri Hindia Belanda segera setelah dihapuskannya *cultuurstelsel* (tanam Paksa) (Tjondronegoro, 1999: 3).

Kehadiran modal swasta ini adalah permulaan merebaknya perkebunan-perkebunan besar milik para pengusaha Belanda yang berorientasi ekonomi liberal. Hal ini ditopang dengan diterbitkannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 yang meletakkan dasar bagi penyewaan tanah yang luas dalam jangka panjang (*hak erfpacht*) kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. UU ini juga mencantumkan bahwa penguasaan atas tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik pribadi ada di tangan pemerintah. Dengan kata lain, inilah awal mula hukum pemilikan atas tanah di nusantara yang membentuk dasar pemilikan tanah secara pribadi.

Kehadiran perusahaan perkebunan ini digambarkan telah menciptakan komunitas sektor perekonomian “modern” yang berorientasi ekspor dan pasaran dunia, di tengah-tengah lingkungan komunitas sektor perekonomian “tradisional” atau “subsisten” (*Kartodirdjo dan Suryo, 1991: 7*). Selama hampir tiga perempat abad perkebunan-perkebunan ini berkembang sembari menciptakan banyak korban berupa pemiskinan penduduk pedesaan yang tidak memiliki akses cukup terhadap tanah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau hanya sekadar mendapat upah yang rendah sebagai buruh perkebunan (*Tjondronegoro, 1999: 29*).

Kondisi demikian ini segera menggelorakan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani. Onghokham memperkirakan bahwa sejak pemberontakan Diponegoro (1830) sampai permulaan pergerakan nasional (1908) terdapat lebih dari 100 pergolakan atau keresahan petani, termasuk di dalamnya adalah pemberontakan petani Banten pada 1888 (*Onghokham, Forum Keadilan, 1994*).

Studi **Pelzer** (1985) tentang perkebunan onderneming di Sumatra Utara 1863-1947, menyebutkan tentang ekspresi ketidakpuasan para petani yang membakari bangsal-bangsal pengeringan yang penuh dengan daun tembakau panen. Ini mereka lakukan karena kekecewaan mereka terhadap jumlah lahan yang tidak cukup tersedia bagi penduduk desa akibat ulah para

pengusaha onderneming yang bersekongkol dengan raja-raja setempat merebut lahan pertanian mereka. **Takashi Shiraisi** (1997) juga mencatat pemogokan para petani *Insulinde* di Surakarta dalam kurun antara 1917-1919. Pemogokan ini dilakukan oleh para *kuli kenceng* yang mendapatkan setengah lahan tanah sawah dari tanah komunal desa terhadap kerja wajib yang harus mereka lakukan bagi desa dan negara di samping keharusan membayar pajak tanah untuk tanah pekarangan rumah dan lahan sawah mereka.

Timbulnya resistensi kaum tani ini merupakan perlawanan terhadap kapitalisme yang tampak melalui sistem ekonomi perkebunan kolonialisme yang telah menyengsarakan mereka. Perlawanan ini muncul silih berganti di berbagai daerah sepanjang mulai diterapkannya perkebunan pada 1830 hingga berakhirnya kolonialisme Belanda.

Dalam pada itu, berakhirnya masa penjajahan justru membuat persoalan-persoalan agraria semakin kusut. Peninggalan tanah-tanah perkebunan milik Belanda yang segera diduduki oleh para petani adalah di antara persoalan-persoalan itu. Beruntung, Presiden Sukarno waktu itu menerbitkan UU Darurat 8/1954 yang menyebutkan bahwa pendudukan lahan oleh rakyat tidak dinyatakan sebagai tindakan penyerobotan yang melanggar hukum. Karenanya berbagai pihak menyebut, secara politis kedudukan kaum tani pada zaman itu

terbilang cukup istimewa. Hal ini ditandai juga dengan diundangkannya UUPA 5/1960 sebagai sebuah pilihan dalam menciptakan keadilan dalam pertanahan.

Hanya saja, ketika kepemimpinan nasional berganti maka dimulailah babak baru kenestapaan petani berhadapan dengan penguasa dan para pemilik modal. Dengan ideologi developmentalismenya, Suharto menempatkan tanah dan buruh yang murah sebagai daya penarik masuknya modal guna melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Alih fungsi lahan terjadi begitu cepat, melalui praktek-praktek paksa dengan menggunakan aparat kekerasan.

Nasikun menemukan bahwa luas lahan sawah yang dikonversikan selama tahun 1981 sampai dengan 1990 mencapai 224.184 Ha dengan rata-rata 37.364 Ha tiap tahun (*Nasikun, 1995: 67*). Dan sampai pada tahun 1993 tidak kurang dari 3,80 juta hektar lahan yang tercerap ke dalam perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Dengan sendirinya data ini menunjukkan terciptanya struktur penguasaan tanah yang timpang. Dari 3,80 juta hektar lahan perkebunan besar, 85,80% di antaranya adalah lahan dengan status Tanah Negara (TN) yang kemudian hak penguasaannya diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan, baik dalam bentuk HGU, HGB, Hak Pakai dan sebagainya (*Bachriadi, 1997: 129*).

Penetapan status sebagai Tanah Negara inilah yang kerap kali menjadi awal dari konflik antara pihak perkebunan dengan rakyat yang telah menguasai

lahan tersebut sejak lama. Klaim sepihak perihal Tanah Negara ini secara sistematis telah menggerogoti lahan-lahan penduduk yang seringkali belum bersertifikat atau bukti kepemilikan legal, dengan mengklaimnya sebagai tanah negara pada saat di atas lahan tersebut akan didirikan sebuah perkebunan, penerbitan HGU atau bahkan perluasan perkebunan yang sudah ada.

Dari sini berbagai peristiwa perlawanan petani berhadapan dengan perkebunan-perkebunan besar menyeruak seakan tak terbendung. Kasus Badega, Gunung Batu dan Cimerak di Jawa Barat, Jenggawah di Jawa Timur, Sendang Pasir di Bali dan Tanah Jaluran di Deli Sumatera Utara adalah di antara kasus-kasus yang memperlihatkan resistensi petani terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Hanya saja perlawanan mereka bukan tanpa rintangan, namun pengerahan kekuatan militer, intimidasi, tekanan-tekanan fisik maupun administratif, pemberian stigma politik, dan manipulasi bukti-bukti hak penguasaan atau penyerahan hak penguasaan merupakan kenyataan yang harus mereka hadapi (*Bachriadi, 1997: 130*).

Sementara itu, terbukanya katup demokrasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada medio tahun 1998 menjadi momentum yang tepat bagi munculnya kembali kasus-kasus pertanahan yang sekian lama mengendap. Selama ini petani selalu gagal merebut hak atas tanah kembali akibat benturan yang keras dari repressifitas kekuasaan. Pada saat simbol-

simbol kekuasaan beserta institusi birokrasinya melemah, giliran para petani merebut haknya kembali dengan caranya sendiri. Di antaranya dengan cara melakukan aksi-aksi pendudukan lahan yang menurut mereka menjadi haknya tersebut.

Aksi pendudukan lahan atau klaim ulang ini pada dasarnya adalah gerakan rakyat merebut hak atas tanahnya sendiri sebagai sebuah tuntutan pewujudan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat (*Laporan KOMPAS, 3/01/00*). Bisa dikatakan inilah substansi gerakan petani yang cukup fenomenal pada awal-awal masa reformasi. Untuk Jawa Timur saja, aksi-aksi klaim ulang ini membentang mulai dari ujung timur pulau Madura, yaitu Sumenep, Sampang, Bangkalan, Malang, Pasuruan, Lumajang, Situbondo, hingga Blitar dan Malang (lihat tabel).

Sebagaimana pula yang terjadi di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebagai pilihan lokasi dalam studi penelitian ini. Pada tahun yang sama, para petani desa Sumberanyar bergerak menuntut dikembalikannya sejumlah besar lahan yang sejak 1961 dikuasai oleh Angkatan Laut. Aksi klaim ulang yang mereka lakukan ini disertai dengan pilihan pengorganisasian diri lewat apa yang mereka namakan FKTS (Forum Komunikasi Tani Sumberanyar).

### Peta Konflik Pertanahan di Jawa Timur

No	Nama Kasus	Lokasi	Subyek	Perkiraan Luas (Ha)
1	Pegaraman	Sumenep	Perum Garam	4.000
2	Nipah	Sampang	Dep.PU/Pemda	6.000
3	Alas Prajah	Bangkalan	Perhutani	Ratusan
4	Raci	Pasuruan	TNI AU	2000
5	Nguling	Pasuruan	TNI AL	Ribuan
6	Banongan	Situbondo	PD Situbondo	3.000
7	Ketajek	Jember	PD Ketajek	1.000
8	Sukorejo	Jember	TNI AD	300
9	Kaliputih	Jember	PT Kaliputih	6.000
10	Kertosari	Jember	PTPN X	Ratusan
11	Tempursari	Lumajang	Perhutani	Ratusan
12	Kunir	Lumajang	TNI AD	Puluhan
13	Senduro	Lumajang	Perhutani	Ratusan
14	Simojayan	Malang	PTPN XII	
15	Sumbermanggis	Malang	PTPN XII	Ratusan
16	Tirtoyudo	Malang	PTPN XII	Puluhan
17	Harjokuncaran	Malang	TNI AD	400
18	Nyamil	Blitar	TNI AD	Puluhan
19	Gambar	Blitar	NV Gambar	168
20	Ponggok	Blitar	TNI AU	35
21	Banyuurip	Blitar	Pemda	262
22	Nyunyur	Blitar	TNI AD	100
23	Sekargadung	Blitar	PT Blitar Putra	36
24	Penataran	Blitar	PTPN XII	82
25	Karangnongko	Blitar	PT Karangnongko	150
26	Sumberpetung	Kediri	Swasta	300

Sumber: Kompas

Penduduk desa Sumberanyar sebagian besar berasal dari etnik Madura, pola hidup mereka menetap secara berkelompok dan sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani-peternak. Lahan yang tersedia tidaklah mempunyai saluran irigasi, yaitu lahan kering dan tadah hujan, dengan

demikian setiap tahun akan muncul kerawanan pangan bila tiba musim kemarau. Karena itu, banyak dari lahan-lahan yang tersedia ditanami rumput gajah dan tumbuhan pakan ternak lainnya.

Sengketa agraria yang muncul di desa Sumberanyar sendiri, menurut laporan mereka, bermula dari pelepasan lahan milik masyarakat dengan pemaksaan kepada pihak Angkatan Laut pada tahun 1961. Lahan yang diambil alih ini kurang lebih seluas lima ribu hektar yang meliputi enam desa di dua kecamatan. Untuk desa Sumberanyar kecamatan Nguling sendiri lahan yang diambil alih adalah seluas 543,5 hektar. Pengambilan lahan oleh Angkatan laut ini dimaksudkan untuk pembangunan lapangan udara, gudang peluru dan rumah dinas Angkatan Laut. Pelepasan lahan ini disertai pula jaminan dari pihak Angkatan Laut bahwa sebelum proyek dimulai para pemilik lahan masih berhak menggarap sawah ladangnya dengan cara bagi hasil.

Pada tahun 1974, proyek mulai berjalan di sebagian lahan – utamanya di pinggir jalan – untuk pemukiman purnawirawan Angkatan Laut yang dijalankan oleh satu badan hukum yang bernama **Prokimal** (Proyek Pemukiman Angkatan Laut, dahulu Kodamar), dan selebihnya masih dikuasagarap oleh petani dengan cara yang masih sama yaitu bagi hasil namun pola penanaman yang selalu berubah-ubah sesuai kehendak pihak Prokimal. Puncaknya, pada tahun 1978, pihak Prokimal mulai menutup akses para petani

penggarap terhadap lahan-lahan yang tersisa berbarengan dengan mulai masuknya perusahaan perkebunan modern. Perusahaan ini menggarap sejumlah besar lahan yang semula menjadi lahan garapan petani atas dasar suatu perjanjian dengan pihak Prokimal. Terakhir yang menggarap lahan tersebut adalah PT Rajawali.

Bagi para petani desa Sumberanyar – kebanyakan merupakan generasi kedua dari sejak pelepasan lahan –, proses pengambilalihan tanah garapan mereka itu mengandung unsur ketidakadilan serta manipulatif. Apalagi rencana yang semula diungkapkan oleh pihak Prokimal sebagian kecil saja yang direalisasikan, saat inipun proyek tersebut telah terhenti. Masuknya perusahaan perkebunan untuk menggarap sebagian besar lahan dan dengan sendirinya meminggirkan para petani penggarap merupakan klimaks dari keresahan mereka.

Pembentukan organisasi FKTS yang dimaksudkan untuk dapat mewadahi gerakan mereka ini sesungguhnya merupakan aksi turunan dari beberapa langkah pendahuluan yang bermula dari demonstrasi oleh sejumlah besar penduduk desa dan segera disusul dengan aksi-aksi pembakaran dan perusakan.

Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali menggelar aksi massa baik di kantor DPRD Kabupaten maupun di Surabaya. Apa yang

diharapkan dari pembentukan FKTS sendiri adalah, menurut H Mustofa, Koordinator FKTS, pengorganisasian diri adalah di antara cara yang rasional guna memfasilitasi setiap langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam rangka memperkuat *bargaining position* agar berujud sebagai aksi bersama, tidak sendiri-sendiri. Tanpa pengorganisasian dikhawatirkan gerakan akan sulit dikembangkan dan begitu mudah dipatahkan.

Upaya ini tentu saja tidak dilakukan oleh mereka sendiri, namun mendapat bantuan dari LBH Surabaya lewat bironya di Malang. Keterkaitan dengan LBH dengan sendirinya memberi implikasi-implikasi baik dari sisi organisasi maupun dalam pengembangan gerakan. Implikasi yang paling nyata adalah terbangunnya jaringan para petani Sumberanyar dengan petani-petani kasus lainnya, khususnya di Jawa Timur, dengan melibatkan aktor-aktor yang bukan petani.

Fenomena di atas memberikan pengertian bahwa ketika tanah telah begitu lekat bagi penegakan kehidupan petani desa Sumberanyar, setiap upaya yang memisahkan kelekatan ini tak pelak lagi akan menimbulkan reaksi. Tekanan-tekanan struktural yang datang baik dari negara atau militer maupun sebagai akibat penetrasi kapital dengan hadirnya perkebunan modern adalah realitas yang sudah barang tentu menggerakkan mereka untuk menggeliat atau

bahkan protes. Pilihan-pilihan aksi perlawanan akan terus diambil selama tekanan masih dirasakan.

Apa yang terjadi di desa Sumberanyar ini sesungguhnya paralel atau merupakan suatu kelanjutan dari gerakan petani era 80-an dan 90-an. Karakter yang menonjol di antaranya adalah munculnya pengelompokan-pengelompokan petani yang terlibat konflik agraria sebagai bentuk lain dari perlawanan petani terhadap represifitas negara dan arus modal. Penelitian yang dilakukan Tim Bina Desa (1999) menyebutkan, pada awalnya pengelompokan-pengelompokan petani tersebut hanyalah berupa kelompok-kelompok usaha ekonomi yang dikelola oleh petani. Pada tahapan berikutnya, kelompok itu berkembang menjadi alat perjuangan petani terutama dalam menghadapi pengusuran tanah yang mereka miliki atau dalam menghadapi kemungkinan buruk lainnya.

Meskipun bukan bentuk baru sepanjang sejarah perlawanan petani di Indonesia, terbentuknya kelompok independen dalam gerakan petani dewasa ini secara umum mengesankan mulai terpikirkannya akses kelembagaan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam berhadapan dengan negara dan para pemilik modal. Ini artinya gerakan petani sedikit beringsut dari aksi-aksi yang sifatnya reaksioner, sporadis dan tidak terukur, karenanya mudah dipatahkan. Dalam rangkaian itu, tumbuhnya kelompok tani independen ini mengiringi memuncaknya gerakan perlawanan menentang kasus-kasus pengusuran tanah

milik petani. Bentuk yang diambil pada umumnya bersifat paguyuban tanpa struktur, cair, sangat bergantung pada elit dan sering kali membutuhkan campur tangan kelas yang bukan petani.

Sementara itu, berbagai kajian dan hasil penelitian tentang perlawanan petani telah begitu banyak bertebaran dalam khazanah ilmu-ilmu sosial di Indonesia, mulai dari zaman kolonial dahulu hingga dewasa ini. Hal ini menunjukkan bahwa wacana tentang perlawanan petani bukan lagi sebuah wacana pinggiran. Ia telah menjadi arus utama dalam setiap kajian-kajian tentang ekonomi politik maupun hubungan negara dan masyarakat. Anggapan bahwa kaum petani sebagai komunitas yang statis, apatis, tidak rasional dan enggan berubah dengan sendirinya terbantahkan.

Nama-nama seperti *Sartono Kartodirdjo* (1984), *Suhartono* (1995), *Anton Lucas* (1989), *Sugijanto Padmo* (1975) adalah di antara para peneliti yang menyibak tabir perihal berbagai pergolakan dan perlawanan kaum tani di Indonesia. Kebanyakan mereka melakukan penelitian historis yang lebih menekankan watak dinamis dalam radikalisisasi gerakan petani.

Beberapa penelitian kontemporer seperti halnya yang dilakukan oleh *Pratikno* (1995) perihal gerakan rakyat /petani menentang konstruksi saluran transmisi tegangan tinggi PLN di Gresik, ataupun *Hotman M. Slahaan* (1996) tentang pembangkangan terselubung para petani tebu dalam program TRI, juga

menunjukkan bahwa petani yang begitu kuat dicap sebagai kelompok yang pasrah, *manut*, *narimo* ternyata tiba-tiba bisa melakukan protes secara eksplosif, menunjukkan siasat cerdas untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan secara berani.

Kendati demikian, kajian yang menitikberatkan pada gerakan-gerakan petani yang terorganisir melalui akses-akses kelembagaan, baik lewat pembentukan organisasi-organisasi petani independen maupun lewat para pegiat Ornop yang cukup concern dalam melakukan advokasi terhadap mereka, tidak cukup banyak terlihat.

Pada kasus-kasus perlawanan petani sebelum kurun 80-an dan 90-an, pergerakan petani di Indonesia dapat begitu mudah dipatahkan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa umumnya gerakan petani waktu itu bersifat arkais, pengorganisasian, strategi dan taktiknya masih sederhana sehingga jauh berbeda dengan gerakan sosial modern. Meski hal ini sama sekali tidak menghilangkan watak dinamis dari gerakan itu sendiri. Karena itu tidak banyak yang melihat gerakan petani dari sudut pengorganisasiannya secara lebih mendalam.

Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Tim Bina Desa* (1999) adalah di antara yang sedikit itu. Laporan ini merangkum 8 penelitian lapangan di 8 lokasi kasus-kasus pertanahan tentang gerakan dan pertumbuhan

organisasi petani pada era 80-an. Dari laporan ini didapatkan temuan bahwa tujuan gerakan perlawanan petani bukanlah untuk menumbangkan atau mengubah suatu sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan pun masih bersifat sporadis, lokal, dan belum terorganisir dengan baik. Kalaupun kemudian mulai tumbuh organisasi-organisasi tani terutama pada akhir dekade 80-an, ini merupakan sejarah panjang perjalanan kaum tani yang tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan para tokoh yang berasal dari kaum kelas menengah, seperti aktivis mahasiswa atau Ornop, yang melakukan pendampingan dan pengorganisasian.

Keterlibatan aktivis mahasiswa dan Ornop dalam pengorganisasian petani ini juga ditemukan dalam hasil penelitian *Dianto Bachriadi* dan *Anton Lucas* (2001) tentang radikalisasi dan perlawanan petani di Tapos dan Cimacan. Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada penjelasan peta kasus dan kronologi aksi-aksi klaim ulang para petani Cimacan dan Tapos.

Dua hasil penelitian yang tersebut terakhir belum lagi memberikan penjelasan yang mendalam tentang berbagai aspek yang mengitari pilihan para petani dalam mengorganisasikan gerakan mereka sembari memberikan kerangka teoretik yang memadai. Dengan kata lain, sesungguhnya fenomena pengorganisasian petani tidak hanya melulu dijelaskan lewat keterlibatan aktor-aktor bukan petani. Sejauh bahwa pilihan pengorganisasian diri merupakan

upaya rasionalisasi petani dalam mengoptimalkan daya dukung terhadap gerakan mereka maka keterlibatan aktor-aktor bukan petani tidak lebih merupakan fasilitator-fasilitator gerakan yang tidak cukup menentukan.

Hanya persoalannya adalah apakah pengorganisasian petani ini merupakan suatu tindakan kolektif yang muncul dari pilihan dan kesadaran petani sendiri ataukah ia tidak lain sekadar improvisasi-improvisasi yang lebih merupakan inisiatif elite petani berikut kepentingan-kepentingan mereka atau bahkan kelompok-kelompok bukan petani. Soal ini menjadi titik perhatian dalam studi penelitian ini.

## **1.2. Permasalahan Penelitian**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong sekelompok petani desa Sumberanyar melakukan gerakan klaim ulang terhadap lahan yang dikuasai oleh Prokimal (Proyek Pemukiman Angkatan laut)?
2. Bagaimanakah pengorganisasian kelompok petani tersebut dilakukan sehingga menggerakkan sebuah perlawanan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memahami dan memperoleh gambaran dengan melakukan eksplorasi, di samping melakukan rekonstruksi terhadap pengorganisasian petani dalam sebuah aksi klaim ulang. Karena itu penelitian ini bertujuan:

1. Ingin memperoleh gambaran mengenai pengorganisasian petani dalam suatu aksi klaim ulang di desa Sumberanyar.
2. Ingin mengetahui apakah pengorganisasian petani dalam aksi klaim ulang di desa Sumber Anyar merupakan tindakan yang didasarkan pada pilihan dan kehendak sendiri atau merupakan improvisasi kelompok-kelompok lain bukan petani.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Semakin terbukanya ruang-ruang studi yang intensif bagi penelaahan peran-peran petani dalam perspektif yang tidak melulu berdasarkan pada doktrin-doktrin modernisasi, namun berangkat dari konstruksi kesadaran para petani sendiri.
2. Sebagai kontribusi bagi konsep-konsep perlawanan petani di Indonesia, utamanya dalam konteks reformasi di Indonesia dewasa ini.

## BAB II

### KERANGKA TEORETIK

#### 2.1. Perlawanan Petani di Indonesia

Jika perlawanan petani dapat diartikan sebagai reaksi kolektif atas keadaan yang dirasakan tidak adil, maka gerakan demikian memang memiliki tradisi yang panjang dalam sejarah bangsa ini. Orang bahkan menganggap, aksi *pepe* atau menjemur diri di depan istana sultan untuk memohon keadilan pada zaman Mataram merupakan embrio gerakan masyarakat di Jawa. Demikian juga migrasi bersama untuk menghindari tekanan atau penindasan penguasa setempat adalah gerakan yang lumrah di Jawa, tentu saja ketika penduduk masih jarang dan jumlah penduduk (cacah) masih menjadi semacam ukuran yurisdiksi kekuasaan lokal (*Mahasin, PRISMA, 1989*).

Sejak masa kolonial, protes-protes yang dilancarkan oleh petani menentang penindasan yang mereka terima telah menampakkan bentuknya. Dalam periode ini berbagai bentuk protes dan perlawanan petani muncul dengan variasi yang beragam, mulai dari protes sosial yang bersifat keagamaan hingga yang berupa kerusuhan. Di antara bentuk kerusuhan tersebut adalah "perbanditan sosial" sebagai protes sosial petani dalam suatu pergerakan sosial.

Dari penelitian historisnya, **Suhartono** (1995) menemukan fenomena *kecu* sebagai sebuah wujud perbanditan pedesaan yang merupakan salah satu

bentuk resistensi petani melawan penindasan pemerintahan kolonial. Resistensi dalam bentuk perbanditan pedesaan ini sebagai akibat dari manifestasi kapitalisme agraris yang diwujudkan dalam bentuk komersialisasi tanah dengan melakukan penyerapan faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang sudah barang tentu merugikan petani.

Gerakan perbanditan itu sendiri dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi, karenanya disebut perbanditan sosial, bukan hanya semata-mata kriminal. Khusus untuk perbanditan pedesaan di Jawa, tampaknya belum mengarah pada kegiatan politik untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dilakukan di tempat lain. Akan tetapi perbanditan itu baru merupakan tipe protes petani dan belum sampai pada tingkat pemberontakan (*Suhartono, 1995: 94*)

Lebih jauh **Suhartono** menjelaskan bahwa perbanditan sosial dengan demikian mempunyai pengertian sebagai protes petani untuk memodifikasi atau menghilangkan sistem kolonial yang merugikan petani. Protes ini merupakan kesadaran petani, baik individual maupun kolektif dengan organisasi sederhana, untuk mendapatkan hak-haknya kembali tanpa harus konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial maupun pihak perkebunan.

Pada beberapa daerah perbanditan pedesaan ini muncul secara beragam. Di daerah Banten dan Batavia, perbanditan pedesaan merupakan resistensi terhadap penghisapan tuan-tuan tanah partikelir baik orang Belanda maupun

Cina. Di Yogyakarta dan Surakarta perbanditan pedesaan didominasi oleh *kecu* yang menolak dominasi agroindustri pemerintah maupun swasta. Sedangkan di Pasuruan dan Probolinggo resistensi itu diwujudkan dalam bentuk pembakaran tebu (*Suhartono, 1995: 153*).

Selanjutnya, gerakan protes petani kerap kali juga muncul dalam bingkai gerakan keagamaan yang menurut **Sartono Kartodirdjo** dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk *millenarianisme* (ajaran akan datangnya zaman keemasan), *messianisme* (kepercayaan pada ratu adil), *nativisme* (gerakan untuk kembali kepada adat kuno), *prophetisme* (kenabian) dan *revivalisme* (perang suci/jihad) (*Kartodirdjo, 1984: 37-85*).

Aksi-aksi protes petani sebagai ledakan ketegangan dan permusuhan ini dimungkinkan dengan adanya ideologi keagamaan yang mampu menggugah kesadaran bersama untuk membentuk solidaritas rakyat pedesaan dalam aksi-aksi kolektif. Selain ideologi terdapat juga lembaga-lembaga tradisional yang potensial dalam proses mobilisasi gerakan rakyat pedesaan, yaitu lembaga pesantren dan aliran-aliran tarekat. Hubungan guru-murid atau patron-client mendasari ikatan hubungan rakyat termasuk para santri dengan kyai sehingga mampu mengintegrasikan segmentasi lokal dalam solidaritas keagamaan dan di bawah hubungan vertikal dengan tokoh pemimpin keagamaan.

Secara lebih eksplisit, **Michael Adas** menjelaskan bahwa gerakan berbasis keagamaan demikian lebih banyak mendapatkan dukungan

terutama berasal dari kelompok yang telah kehilangan kekuasaan dan status sosial serta mengalami kondisi ekonomi yang memburuk karena masuknya orde kolonial Eropa. Namun demikian, kelompok-kelompok elit pribumi menunjukkan peran penting dalam menggerakkan gerakan protes sosial sebagai respon terhadap kesengsaraan mereka sendiri di luar kekhawatiran mereka atas pengikut mereka yang menderita, yakni kaum tani (*Adas, 1988: 327-329*).

Karena itu, secara tradisional gerakan petani memiliki basis ideologi, kepemimpinan dan kesadaran yang lengkap untuk melancarkan aksi-aksi protesnya terhadap sasarannya, yang tidak sedikit mengambil jalan kekerasan yaitu dengan melancarkan pemberontakan atau pergolakan yang dibenarkan oleh ajaran-ajaran yang dianutnya (*Suryo, PRISMA, 1985*).

## **2.2. Teori Perlawanan Petani**

Secara umum, munculnya perlawanan petani cenderung dianggap sebagai akibat logis dari tekanan-tekanan struktural yang mendera mereka. Gerakan perlawanan mereka tidak lain adalah perjuangan menentang struktur yang mereka rasa tidak adil. **Wolf** (1969) menyatakan bahwa penetrasi "Kapitalisme Atlantik Utara" mendorong tekanan penduduk, menggosur wewenang tradisional dan menimbulkan krisis ekologis yang semuanya merangsang pemberontakan petani. **Moore** (1966) menunjuk proses

kapitalisme sebagai komersialisasi pertanian. Ia menyatakan bahwa penetrasi ini meruntuhkan keseimbangan tradisional dan meletupkan rasa ketidakadilan yang akan mempengaruhi para petani melakukan pemberontakan (*Roxborough, 1986: 105*).

**James C. Scott** cenderung untuk menempatkan *etika subsistensi* pada pusat analisisnya tentang pemberontakan kaum tani dalam bingkai pendekatan *moral ekonomi*, yaitu ketika eksploitasi yang terus menerus merongrong pengaturan subsistensi petani maka cenderung akan menimbulkan pemberontakan. Namun bagi **Scott**, eksploitasi saja tidak cukup, ia harus disertai beberapa kondisi utama mulai dari konteks struktural dari pemberontakan sampai dengan anatomi penindasan yang akan memperbesar kemungkinan munculnya pemberontakan petani. Dalam bingkai pendekatan moral ekonomi, etika subsistensi berkaitan dengan pengertian petani tentang keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi. Sebagai satu prinsip moral dan satu hak akan subsistensi, ia merupakan norma yang dipakai yang bila dilanggar akan segera meletupkan perlawanan (*Scott, 1981: 7–10*).

Dalam konteks struktural, **Scott** menunjuk struktur agraris yang lebih rapuh merupakan produk interaksi antara tiga kekuatan: perubahan demografis, produksi untuk pasar, dan pertumbuhan negara. Implikasinya, arah perkembangan demografis – yaitu pertumbuhan penduduk dan okupasi semua tanah pertanian – justru memperlemah kedudukan petani terhadap orang-orang

yang menguasai tanah, di samping terdapatnya "kerwananan struktural" yang melibatkan ekologi, sistem harga dan monokultur.

Dengan konstruksi ini, **Scott** sesungguhnya ingin menghindar dari kemungkinan bahwa struktur sosial petani membuat sejumlah dari mereka secara inheren mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk memberontak dibandingkan dengan kaum tani lainnya. Setidaknya ada dua faktor yang ia ungkap sebagai alasan. *Pertama*, keterbukaan petani terhadap kejutan-kejutan bagi kerawananan struktural berbanding terbalik dengan keseragaman respon petani terhadap kejutan-kejutan itu, *kedua*, struktur-struktur yang lebih komunal seringkali mampu meredistribusi sedemikian rupa rasa takut sehingga mencegah atau menanggukhan krisis-krisis subsistensi (*Scott, 1981: 299-312*).

Karenanya, **Scott** begitu menaruh perhatian pada perlawanan sehari-hari para petani daripada gerakan-gerakan yang bersifat massif. Bentuknya bisa berupa organisasi anonim yang informal atau perlawanan kecil-kecil yang penuh kesabaran dan kehati-hatian dengan menghindari konfrontasi langsung. Dengan cara demikianlah kaum petani menyatakan kehadiran politisnya. Basis yang diambil dari perlawanan ini adalah kepentingan diri sendiri para petani sebagai suatu kebutuhan untuk menjamin kelangsungan kehidupan. Basis ini begitu pentingnya bagi **Scott**, karena dari sinilah letak seluruh gagasan dan sumber-sumber perlawanan petani (*Scott, 2000: 389-392*).

Hanya saja, **Scott** bukan tidak menaruh perhatian bagi perlawanan petani yang terorganisir. Menurutnya bahwa kaum petani dapat menjadi gerakan politik massal yang terorganisir hanya dalam konteks historis tertentu; Yaitu ketika kekurangan materi telah sedemikian rupa mengancam dan disertai pula runtuhnya institusi-institusi penindasan yang ditandai oleh adanya perlindungan hukum bagi aksi politik terbuka. Akan tetapi, situasi demikian sangat langka dan biasanya berusia pendek, sekalipun ia turut andil dalam meletuskan revolusi.

Namun demikian, **Scott** juga menulis:

... hampir dapat dipastikan bahwa keterlibatan petani dalam suatu gerakan sosial terjadi hanya melalui kelas-kelas bukan petani. Dilihat pada dirinya sendiri, senjata kaum tani yang paling umum dan tahan ialah perlawanan sehari-hari yang belum sampai menjadi bentuk-bentuk protes atau konfrontasi yang lebih berbahaya. Di situ, kaum tani tidak terlalu memperhitungkan perubahan-perubahan formal dan legal dalam aturan-aturan, katakanlah mengenai hak milik dan perpajakan, dibandingkan usaha untuk mengatasi, menghalangi, menghindari dan mengurangi dampak-dampak paling menyakitkan dalam aturan-aturan itu. Biasanya tanpa akses kelembagaan untuk mempengaruhi aturan perundangan dan pemerintahan, kaum tani membela kepentingan mereka ketika aturan itu sudah dilaksanakan... (*Scott, 1993: 326*).

Sementara itu, **Jeffrey M. Paige** dalam identifikasinya terhadap lima sistem agraria di Amerika Latin menggunakan titik tekan pada sistem agraria dalam melihat fenomena perlawanan petani, kendati ia batasi analisisnya pada pertanian ekspor. Lima sistem itu adalah:

1. *Manor komersial* atau *Hacienda*. Ini merupakan perusahaan perkebunan yang bersifat individual, tidak menggunakan tenaga mesin, dikerjakan

secara hak usaha oleh buruh upahan lokal atau buruh upahan yang pulang pergi setiap hari dari lahan subsisten di dekatnya.

2. Perkebunan bagi hasil; bersifat individual, tidak menggunakan tenaga mesin, dikelola oleh petani bagi hasil atau petani penyewa. (**Paige** membagi tipe ini ke dalam sistem bagi hasil yang tersentralisasi dan yang desentralisasi)
3. Perkebunan dengan menggunakan buruh migrasi; bersifat individual, tidak menggunakan tenaga mesin dan diagarap oleh buruh pindahan.
4. Perkebunan besar; dimiliki baik oleh perusahaan swasta maupun pemerintah atau bahkan oleh individu, menggunakan tenaga mesin dan tenaga upahan yang tinggal di wilayah tersebut untuk jangka waktu setahun atau lebih.
5. Pertanian kecil milik keluarga; dimiliki secara individual dan digarap oleh pemilik dan keluarganya (**Paige, 1975: 79**).

Sistem agraria di atas akan memunculkan tanggapan-tanggapan politik tertentu. Menurut **Paige**, jenis gerakan politik yang mungkin terjadi di setiap tipe tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Event Revolusi Sosialis*; dipelopori oleh partai sosialis yang menginginkan terjadinya perubahan politik lama digantikan dengan negara sosialis serta struktur agraris lama digantikan dengan pertanian kolektif.

2. *Event Revolusi Nasionalis*; dipelopori oleh partai nasionalis dengan tujuan terjadinya perubahan politik yang fundamental dengan cara menggantikan pemimpin lama dengan kelompok-kelompok nasionalis berdasarkan etnik dan ras.
3. *Event Agraris*; suatu gerakan yang bertujuan redistribusi tanah tetapi tidak mengharapkan terjadinya perubahan politik atau ekonomi yang radikal. Gerakan ini akan berhenti jika pembagian tanah telah terpenuhi. Karena itu fenomena ini lebih mengarah pada gerakan daripada revolusi. Dari sisi pengorganisasian gerakan yang mengiringi redistribusi tanah dalam event ini, **Paige** melihatnya lebih mewujudkan sebagai "*organized crowd*" (kerumunan yang terorganisir), karena itu sangat temporer, daripada melibatkan kehadiran organisasi yang berkelanjutan.
4. *Event Buruh* ; gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki upah buruh yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, serta hak-hak berorganisasi. Gerakan ini tidak menghendaki perubahan pemerintahan, nasionalisasi ataupun pembagian tanah.
5. *Event Komoditas*; gerakan yang bertujuan untuk mengubah bekerjanya pasar komoditas pertanian. Gerakan ini menginginkan adanya kredit dengan bunga rendah, bantuan modal, pengawasan pedagang perantara, program-program yang memperbaiki harga, penguasaan pasar dan harga melalui produsen.

Hanya saja, sistem-sistem agraria ini tidak mesti dan tidak dengan sendirinya mengakibatkan jenis-jenis tanggapan politik seperti dijelaskan di atas. Dalam banyak kasus mungkin tidak ada tanggapan politik yang berarti sama sekali. Faktor-faktor lain dibutuhkan untuk memberikan kondisi-kondisi yang mencukupi bagi tanggapan politik yang diramalkan oleh suatu teori. Misalnya dalam kasus perkebunan dengan buruh migrasi, adanya kuasa kolonial yang menduduki dan kemampuan komunitas petani untuk menghasilkan kepemimpinan dari dalam, merupakan kondisi yang perlu bagi pengembangan gerakan nasionalis revolusioner. Dalam kasus sistem *hacienda*, kehadiran partai politik reformis merupakan salah satu kondisi yang diperlukan bagi pemberontakan agraria yang bertujuan menduduki tanah *hacienda* (**Paige, 1975: 93-100**).

Preposisi pokok **Paige** dalam hal ini adalah:

1. Protes hanya terjadi bila terdapat konflik total (*zero sum game*) antara kepentingan buruh dengan kepentingan pemilik. Ini akan terjadi bila pemilik tidak dapat meningkatkan produktifitas kecuali dengan merugikan kaum buruh tani.
2. Protes hanya akan terjadi bila fasilitas organisasi tersedia bagi kaum buruh tani.
3. Tipe-tipe protes dan tujuan gerakan akan merupakan fungsi dari tipe struktur agraria.

### **2.3. Kesadaran dan Rasionalitas dalam Perlawanan Petani**

Studi tentang gerakan masyarakat telah begitu kaya dengan berbagai pendekatan dan perspektif di dalam ruang-ruang perdebatan sosiologis. Beragam definisi telah dilekatkan pada gerakan masyarakat ini, baik oleh para penganut fungsionalisme yang lebih melihat gerakan masyarakat sebagai suatu penyakit sosial maupun oleh para penganut teori konflik yang lebih melihatnya sebagai fenomena positif atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial.

Hanya saja, seringkali masyarakat yang melakukan suatu perlawanan sosial atau suatu gerakan sosial digambarkan sebagai obyek yang seluruh aktifitasnya dibatasi oleh struktur-struktur yang membelenggu mereka. Mereka cenderung tidak dianggap sebagai subyek yang memiliki otoritasnya sendiri. Berbagai studi tentang gerakan masyarakat membuktikan bahwa masyarakat tidaklah selalu tunduk sebagai obyek sejarah, bahkan mereka mampu membuat sejarahnya sendiri.

Dalam tradisi pemikiran sosiologi yang merelasikan dimensi agen dan struktur, terletak asumsi bahwa orang tidak bisa mereduksi fenomena-fenomena sosial sekadar sebagai hubungan-hubungan produksi. Sebaliknya ia harus dipahami juga dalam pengertian tentang kemampuan makhluk manusia sebagai aktor-aktor sosial dalam menciptakan sistem-sistem signifikansi atau struktur-struktur makna serta menangani tingkah laku sosialnya sehari-hari. Itu sebabnya, gagasan mengenai saling pengaruh dialektik antara hubungan

produksi dan agen manusia menjadi sangat penting dipahami, dalam rangka menghindari pandangan sebelah mata atau sepihak (*one-side*) mengenai realitas sosial (*Hikam, 1996: 530*).

Posisi teoretik demikian di antaranya diambil oleh **Anthony Giddens** lewat *Teori Strukturasi*-nya. Pusat konsepsi teori strukturasi **Giddens** terletak pada gagasan tentang *struktur*, *sistem sosial* dan *dualitas struktur*. **Giddens** tidak menolak bahwa struktur dapat membatasi tindakan manusia, namun menurutnya, di samping ia membatasi (*constraining*) ia juga memungkinkan kebebasan aktor (*enabling*). Di sinilah titik penting dalam teori strukturasi yang mengandung gagasan bahwa antara *agen* dan *struktur* (*obyektifitas dan subyektifitas*) bukanlah dua hal yang berdiri sendiri sebagai sebuah dualisme, tapi keduanya merupakan *dualitas* (*duality of structure*). Dengan begitu strukturasi sesungguhnya melibatkan hubungan yang dialektik antara agen dan struktur. Struktur dan agen adalah dualitas, salah satunya tidak akan ada tanpa yang lain (*Giddens, 1989: 25-27*).

Dalam konteks gerakan perlawanan petani, relasi antara agen dan struktur yang dibawa oleh **Giddens** ini akan sangat bermanfaat dalam melihat perlawanan petani sebagai sebuah dialektika yang memahamkan proses sosial sebagai interaksi sosial yang kompleks antara aktor-aktor dan struktur sosial. Dapat dikatakan rasionalisasi menempati posisi yang penting dalam tindakan para aktor tersebut dengan mengedepankan kemampuan aktor untuk mengatur,

berupa tindakan-tindakan reflektif maupun rasional di dalam memunculkan atau tidak suatu gerakan perlawanan petani.

Konsepsi tentang aktor sebagai agen dalam struktur sosial di atas juga berkaitan dengan inti kesadaran dalam tindakan-tindakan manusia, yang oleh **Giddens** disebut *kesadaran diskursif*. Yaitu apa yang dapat dikatakan oleh para aktor, atau apa yang diekspresikan secara verbal, perihal situasi-situasi sosial. Hal ini menyangkut situasi-situasi yang muncul dari tindakan para aktor sendiri. Karena itu kesadaran diskursif lebih merupakan kemampuan untuk mengungkapkan realitas sosial sebagai implikasi dari tindakan dalam kata-kata. Kesadaran diskursif adalah tingkat lebih lanjut dari apa yang disebut **Giddens** sebagai *kesadaran praktis*, yaitu sesuatu yang dari karakteristik tindakannya memang mudah dikerjakan, tanpa harus dikatakan.

Karena itu, agen dan kesadaran adalah dua faktor utama yang menentukan gerakan perlawanan petani. Dan bahkan keduanya mungkin juga dapat mempengaruhi tipe-tipe gerakan di dalam konteks dan situasi yang berbeda. Ini disebabkan adanya kenyataan bahwa terdapat kemerdekaan dari para petani sendiri dalam memelihara ideologinya sendiri serta kemampuan untuk mengartikan kesadaran mereka sendiri. Para petani akan sangat aktif dan terus menerus mengevaluasi pengalaman mereka sendiri. Apakah perlawanan mereka mengambil bentuk yang tersembunyi atau terbuka, sebagian besar sangat tergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk mengantisipasi

situasi-situasi yang ada dan tidak hanya sekedar menanggapi kekuatan-kekuatan dari luar (*Hikam, 1996: 168*).

Teori tentang kesadaran sendiri, seperti dimunculkan oleh **Paulo Freire**, berangkat dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang hidup di dalam dan dengan dunia. Dengan kata lain, dalam proses kemanusiaan sebagai makhluk yang sadar, manusia bukan hanya hidup di dunia namun juga bersama dengan dunia. Hanya manusia sebagai makhluk yang 'terbuka' yang dapat melakukan transformasi terhadap dunia secara berkesinambungan dengan aksi, pemahaman dan pengungkapan kenyataan dalam bahasa yang kreatif.

Selanjutnya, manusia dapat hidup bersama dengan dunia karena dia dapat menjaga jarak dengannya secara obyektif (*obyektivasi*). Dalam kesadarannya, manusia sebagai makhluk praksis mentransformasikan dunia sama dengan memanusiakannya (*to humanize*). Berangkat dari asumsi ini **Freire** mencoba melihat kesadaran manusia dalam ragam tingkatannya yang dapat dikenali dari konfigurasi historis-kultural, yang dengannya dapat dikenali perbedaan dari karakteristik hubungan antar tingkat kesadaran yang fundamental.

Pengenalan terhadap berbagai tingkat demikian, dimulai **Freire** dengan mengetengahkan budaya bisu dalam masyarakat. Budaya ini merupakan bentuk superstruktur yang mengondisikan sebuah bentuk kesadaran khusus. Budaya bisu sangat menentukan infrastruktur di mana budaya itu berlaku. Dari

sini dapat ditentukan adanya model kesadaran yang berkorespondensi dengan kehidupan nyata masyarakat yang belum mandiri. Katanya;

... Kesadaran semacam ini secara historis terbentuk karena struktur sosial. Ciri pokok kesadaran ini, seperti masyarakat yang belum mandiri, adalah ketaatan semu (*quasi adherence*) pada kondisi yang ada, atau seolah-olah mengikuti arus namun sebenarnya tidak (*quasi immersion*). Kesadaran seperti ini (*dominated consciences*) tidak cukup menjaga jarak dengan realitas sehingga sulit mengobyektivasinya secara kritis... (**Freire, 1999: 135**).

Bila ketaatan semu di atas berjumpa dengan situasi transisional yang meledakkan aksi-aksi kekerasan, maka dapat dikatakan bahwa massa yang bisu tersebut mulai berani menunjukkan dirinya. Perubahan struktural telah menyebabkan munculnya kekuatan massa tersebut dan dengan sendirinya memunculkan kesadaran baru, yang disebut **Freire** sebagai kesadaran semi intransitif. Kesadaran ini muncul karena kebutuhan biologis menemukan tantangannya. Dalam proses runtuhnya budaya bisu, kesadaran semi intransitif telah membuat masyarakat mampu memvisualisasikan dan membedakan apa yang sebelumnya tidak dipahami secara jelas.

Karena itu, merebaknya gerakan-gerakan massa menekan penguasa akibat transformasi struktural yang terjadi adalah konteks nyata bagi tersemainya kesadaran manusia atas keberadaannya dalam struktur sosial. Hanya saja, meski aksi massa itu cukup menampakkan pengaruhnya, namun bukan berarti lantas masyarakat dapat berbicara atas nama kepentingannya sendiri. Paling jauh yang bisa dimunculkan dari situasi ini, menurut **Freire**,

adalah sebuah kesadaran transitif yang naif (*naïve transitivity*). Sebab, bagi **Freire**, suatu kesadaran penuh yang memberikan kebebasan pada manusia mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara terbuka untuk tidak tunduk pada penguasa yang menindas, hanya bisa muncul bila terdapat aksi-aksi budaya dan proses-proses penyadaran sebagai gerakan revolusioner. Menurutnya, revolusi itu selalu bersifat kultural. Dalam masyarakat baru, proses revolusi menjadi revolusi budaya.

#### **2.4. Pengorganisasian Perlawanan Petani**

Tekanan terhadap pengorganisasian perlawanan petani ditunjukkan **Samuel L. Popkin** lewat pendekatannya yang ia sebut *ekonomi politik*. Pendekatan ini berusaha menelusuri realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya dari petani dalam kerangka analisis yang didasarkan pada aktor individual yang selalu berusaha mencapai kepentingan-kepentingannya sendiri. Asumsinya, manusia pada dasarnya egois, rasional dan selalu berupaya memaksimalkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya. Kritik Popkin terhadap pendekatan moral ekonomi di antaranya adalah absennya realitas pembonceng (*free-rider*) yang memanfaatkan keuntungan-keuntungan suatu gerakan tanpa harus terlibat di dalamnya (*Popkin, 1986: 23-26*).

Bagi **Popkin**, protes-protes politik petani bukanlah reaksi-reaksi defensif dari krisis subsistensi ataupun kerawanan-kerawanan struktural,

sebaliknya ia merupakan suatu tindakan kolektif yang memerlukan lebih dari sekedar konsensus atau intensitas kebutuhan. Tindakan itu memerlukan kondisi-kondisi yang mendorong para petani melihatnya menurut kepentingan-kepentingan individual mereka dalam rangka mengalokasikan sumber-sumber daya yang mereka miliki pada kepentingan kolektif – dan tidak sebagai pembonceng.

Sebagai sebuah tindakan kolektif, maka perlawanan petani sangat terkait dengan pengorganisasian petani itu sendiri. **Popkin** melihat pertanyaan mendasar bagi keberhasilan suatu pengorganisasian adalah bagaimana dan di bawah kondisi-kondisi apa sumber-sumber daya untuk proyek kolektif itu dapat dikumpulkan bersama-sama dan diaplikasikan? Sebab menurutnya, setiap usaha untuk mengorganisir suatu tindakan kelompok harus mengenal perbedaan antara individu dan kelompok dan harus menyediakan kepemimpinan efektif serta insentif-insentif yang cukup untuk mengatasi perlawanan/resistensi individual terhadap tindakan kolektif (*Popkin, 1986: 202*).

Hal ini berarti bahwa para petani sangat sadar akan adanya hubungan resiprokal antara kepentingan-kepentingan individualnya dengan kepentingan-kepentingan umum di dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki. Petani hanya akan mau mengalokasikan sumber dayanya pada kepentingan kelompok sejauh kepemimpinan kelompok yang mengorganisir tindakan

kolektif mereka mampu menyediakan insentif-insentif khusus. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus bisa meyakinkan orang-orang bahwa dengan berpartisipasi dalam organisasi atau bahkan menyumbang melalui organisasi maka hasilnya paling menguntungkan mereka. Hasil dari tindakan kolektif inilah merupakan insentif khusus yang berhak mereka terima.

Dengan demikian perlawanan petani adalah juga mengenai kalkulasi untung rugi perihal hasil-hasil yang diharapkannya, dan ia juga menyangkut cara petani dalam membuat estimasi-estimasi subyektif atas kredibilitas dan kapabilitas organisatornya dalam mendatangkan hasil-hasil tersebut. Dalam hal ini **Popkin** mempertegas:

Maka, dalam semua situasi, tidakan kolektif melibatkan resiko dan ketidakpastian. Secara logika adalah tidak tepat untuk mempersamakan intensitas kebutuhan dengan kemungkinan respon kolektif tanpa mempertimbangkan juga kemampuan individu-individu untuk berjudi pada suatu perbaikan dalam *status quo*. Seorang petani yang memiliki sedikit surplus dapat lebih siap untuk mengambil resiko-resiko dibanding seorang petani yang betul-betul sedang berada di pinggir... (*Popkin, 1986: 207*)

Di samping itu, kredibilitas seorang organisator, yang menurut **Popkin** sebagai seorang *enterprenuer politik*, sangat ditentukan oleh bagaimana ia meyakinkan para petani bahwa tujuan-tujuan organisasinya dapat dipercaya (*credible*) dan bahwa ia tidak hanya dapat dan akan berbuat segala apa yang ia janjikan dengan partisipasi dan sumbangan para petani itu, tapi juga menyangkut segala apa yang dia janjikan dan lakukan tersebut maka nasib

petani akan menjadi lebih baik. Cara lain untuk mendorong kredibilitas adalah dengan menggunakan pemimpin-pemimpin yang dikenal baik oleh para petani.

## 2.5. Kerangka Pemikiran Berdasarkan Teori

Struktur sosial masyarakat petani, dalam konteks penelitian ini adalah petani desa Sumberanyar, secara inherent telah menempatkan petani pada wilayah yang tersudutkan. Hal ini setidaknya ditandai dengan realitas penguasaan lahan yang tidak seimbang yang mengiringi terjadinya proses diferensiasi sosial. Menurut **Scott** hal ini merupakan produk interaksi dari tiga kekuatan yakni perubahan demografis, produksi untuk pasar dan pertumbuhan negara. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kerawanan struktural.

Hanya saja, struktur sosial yang eksploitatif demikian tidak serta merta akan meletupkan perlawanan. Ia harus disertai pula mulai dari konteks struktural perlawanan itu sendiri hingga persoalan anatomi penindasan yang merongrong pengaturan subsistensi petani yang akan memperbesar kemungkinan munculnya perlawanan. Lebih dari itu, perlawanan itu sendiri mewujud dalam suatu tindakan kolektif yang memerlukan lebih dari sekedar konsensus atau intensitas kebutuhan.

Mengikuti **Paige**, konteks penelitian ini lebih menunjuk event yang ketiga dalam perlawanan petani: yaitu *event agraris* yang pusat gerakannya diorientasikan pada redistribusi tanah. Meskipun demikian, tidak tertutup

kemungkinan akan terdapat karakter-karakter khusus – yang berbeda dengan penggambaran Paige – dalam aksi-aksi reclaiming yang dilakukan petani desa Sumberanyar. Semisal, preposisi Paige tentang adanya *zero sum game* bagi terletusnya sebuah perlawanan boleh jadi tidak mutlak ada dalam perlawanan di Sumberanyar. Terdapat situasi-situasi lain yang mungkin lebih mampu menjelaskan fenomena ini.

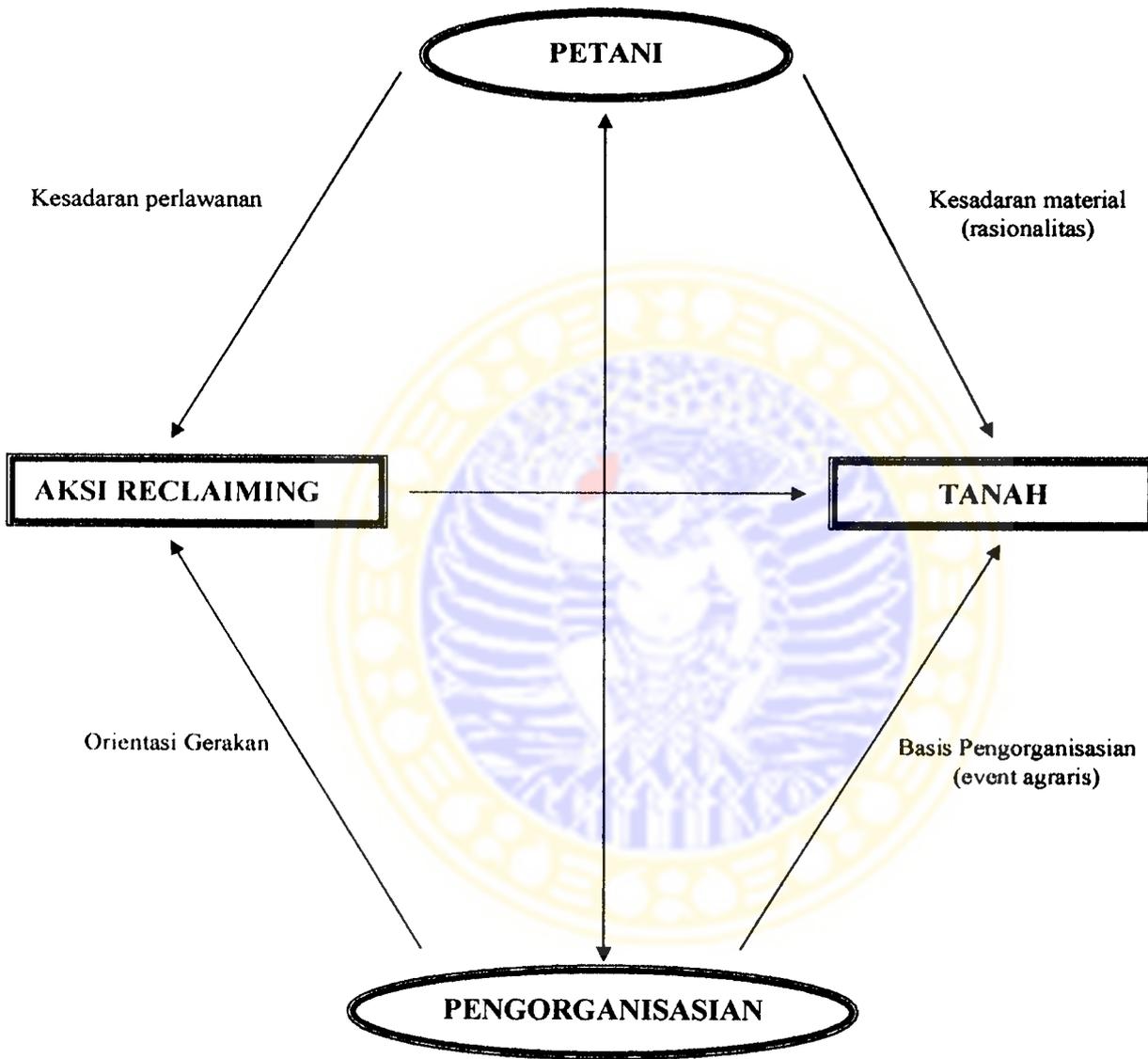
Pusat analisis dalam penelitian ini akan lebih tertuju pada proses pengelolaan kesadaran petani desa Sumberanyar sendiri dalam memunculkan perlawanan yang terorganisir. Karena itu, petani sebagai seorang agen dan kesadaran mereka adalah dua faktor utama yang menentukan perlawanan yang muncul serta tipe gerakan dalam situasi dan konteks aksi reclaiming di desa Sumberanyar.

Untuk melihat kesadaran yang bekerja di tingkat petani sebagai agen di atas, mengikuti **Freire**, situasi transisional adalah titik penting bagi munculnya kesadaran perlawanan petani, pada konteks Sumberanyar ditandai oleh angin perubahan yang terjadi mengiringi gerakan-gerakan reformasi di negeri ini. Kesadaran demikian dinamai kesadaran semi intransitif di mana ditandai oleh munculnya gerakan massa pendudukan lahan. Kesadaran ini timbul karena kebutuhan biologis-material menemukan tantangannya. Ia adalah tingkat lanjut dari runtuhnya budaya bisu petani sehingga mereka mampu memvisualisasikan dan membedakan apa yang sebelumnya tidak dipahami secara jelas.

Mengikuti **Popkin**, kesadaran ini juga digunakan dalam menilai hubungan resiprokal antara kepentingan-kepentingan individualnya dengan kepentingan-kepentingan umum di dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki. Proses pengalokasian tersebut membutuhkan kepemimpinan efektif yang mengorganisir tindakan kolektif mereka berikut insentif-insentif khusus yang berhak mereka terima. Sebagai sebuah tindakan kolektif, maka perlawanan petani sangat terkait dengan pengorganisasian petani itu sendiri.

Namun, tidak jarang kepemimpinan gerakan justru datang dari orang-orang bukan petani yang boleh jadi akan membuat kesadaran petani menjadi bias oleh faktor-faktor lain. Misalnya adalah kepemimpinan keagamaan yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan *ratu adil*. Dari sudut pengorganisasian itu sendiri juga dimungkinkan munculnya *free-rider* atau pembonceng yang tidak turut serta berpartisipasi dalam gerakan (tidak mengalokasikan sumberdayanya) namun turut memetik hasil dari gerakan tersebut.

Dalam peta analisis seperti inilah, penelitian ini hendak dikonstruksikan untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah terdahulu. Sebagaimana terlihat dalam gambar:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode *studi kasus intrinsik*. Studi kasus menyangkut dua hal, proses mempelajari suatu kasus, dan hasil dari proses tersebut. Kasus sendiri adalah suatu sistem yang terbatas. Para peneliti mencari apa yang berlaku umum di satu sisi dan di sisi lain apa yang partikular dari kasus tersebut, namun hasil akhir biasanya menghadirkan sesuatu yang unik. Apa yang terjadi dalam suatu kasus diobservasi secara mendalam dan pada dasarnya *reflektif/interpretatif*. Sedangkan studi kasus intrinsik dimaksudkan untuk memahami sebuah kasus yang partikular. Studi demikian diambil karena ada sesuatu yang menarik secara intrinsik dalam suatu kasus, oleh sebab itu studi ini tidaklah bertujuan untuk membangun suatu teori.

Kasus yang dimaksud adalah fenomena pengorganisasian gerakan di Sumberanyar. Sebagai sesuatu yang dipahamkan sebagai perlawanan petani, munculnya gerakan di Sumberanyar adalah sekelumit kisah tentang perlawanan petani di Indonesia, terutama dalam konteks Indonesia kontemporer. Tentu saja, hal ini tidak dapat memberikan penjelasan yang utuh terhadap bangunan sejarah perlawanan petani di negeri ini. Yang dapat dimunculkan tidak lebih adalah kekhasan-kekhasan lokal yang melingkupi terjadinya gerakan

pendudukan lahan di desa Sumberanyar, dengan demikian dijelaskan dalam konteks yang sangat lokal dan terbatas.

### **3.2. Setting Penelitian**

Setting dalam penelitian ini adalah desa Sumberanyar kecamatan Nguling kabupaten Pasuruan. Desa ini adalah di antara enam desa di dua kecamatan (Lekok dan Nguling) yang penduduknya sebagian besar petani yang hingga saat ini sedang menduduki lahan perkebunan milik Prokimal (Proyek Pemukiman AL) yang bekerja sama dengan salah sebuah perusahaan perkebunan swasta nasional. Penelitian ini sengaja dilakukan di desa tersebut didasarkan pada dua alasan:

- a. Pendudukan lahan perkebunan sebagai sebuah aksi klaim ulang (reclaiming) yang dilakukan oleh kelompok petani di desa tersebut adalah alasan utama.
- b. Di antara enam desa tersebut, hanya kelompok petani di desa Sumberanyar yang mengorganisasikan diri dalam melangsungkan gerakan mereka lewat suatu organisasi yang mereka namakan FKTS (Forum Komunikasi Tani Sumberanyar).

Desa Sumberanyar sendiri bukanlah termasuk desa yang makmur. Sebagian besar penduduknya lebih tepat dikatakan miskin dan tidak bertanah.

Hingga mereka menduduki lahan perkebunan, tidak membuat mereka menaikkan secara tajam tingkat ekonominya. Sebagian besar dari mereka pun memiliki kesadaran literasi yang rendah. Tidak banyak yang mengenyam pendidikan formal lebih dari pendidikan dasar. Sementara itu, mereka memiliki memori kolektif tentang kemakmuran di desa ini. Orang desa ini pernah menikmati tingkat kemakmuran tertentu yang dihasilkan oleh produksi tanah mereka sendiri yang harus sirna karena masuknya TNI AL. Dalam situasi demikian, munculnya gerakan pendudukan lahan yang disertai dengan pengorganisasian tentunya menjadi fenomena yang menarik

### 3.3. Unit Analisis

Mengikuti Ritzer, analisis sosial berkenaan dengan jenis realitas yang hendak diteliti terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu *makro-obyektif*, *makro-subyektif*, *mikro-obyektif* dan *mikro subyektif*. Dalam penelitian ini, jenis realitas yang hendak didekati adalah *makro subyektif* berupa kesadaran kelompok yang dipahami secara subyektif oleh petani-petani yang tergabung dalam kelompok tersebut, di mana kesadaran tersebut merupakan milik bersama kelompok.. Dengan demikian unit analisis yang hendak diambil adalah *kelompok*, yaitu kelompok petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Sumber Anyar (FKTS) yang melakukan aksi pendudukan lahan.

### 3.4. Pemilihan Informan

Jumlah penduduk Sumberanyar kurang lebih sekitar 5000 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak kurang lebih 1500 kk. Mereka terbagi dalam 9 dusun, ada dua dusun yang harus terpisah dari ketujuh dusun lainnya yang terbelah oleh jalan negara yang menghubungkan Pasuruan dan Probolinggo. Dua dusun ini tidak termasuk yang dikuasai oleh TNI AL. Karenanya, tidak semua penduduk Sumberanyar terlibat dan berpartisipasi dalam gerakan, partisipan gerakan lebih banyak datang dari 6 dusun lainnya.

Secara purposive, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Para petani yang menjadi anggota FKTS (Forum Komunikasi Tani Sumberanyar) yang akan memberikan agregasi cerita (*aggregation of story*) mengenai berbagai pengalaman mereka sehingga dapat direkonstruksi kesadaran mereka secara kelompok. Informasi ini menghasilkan detail yang dapat digunakan untuk memahami konteks perlawanan mereka serta proses rasionalisasi pilihan pengorganisasian diri.
2. Elit pemimpin dan beberapa pengurus FKTS, sebagai sumber informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kelompok secara keseluruhan.

Kedua kelompok informan tersebut di atas bisa dianggap sudah dapat digunakan menjawab dan menjelaskan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Sejauh jumlah informan yang didapatkan dirasakan memadai

untuk mengkonstruksi peristiwa ini, maka jumlah tersebut dianggap cukup. Selain itu, dalam penentuan informan juga digunakan teknik *snowballing* (bola salju), sebab gambaran detail tentang informan-informan tersebut tidak dapat atau sulit diperoleh.

Meskipun dalam proses penelitian, peneliti mendapatkan informasi dari sejumlah informan lain yang cukup banyak, namun berdasarkan pertimbangan dan teknik di atas, informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang secara rigid akan digunakan dalam memahami dan mengkonstruksi fenomena perlawanan petani di desa ini. Ini juga menyangkut kejenuhan dan pengulangan informasi yang diungkap. Secara rinci, keenam belas informan ini dapat diprofilkan dengan sederhana sebagai berikut;

NO	NAMA	UMUR	TEMPAT TINGGAL	PEKERJAAN ASAL	PENDIDI-KAN	di FKTS
1	Moch. Kholil	23 th	Belung	Buruh	SD tidak tamat	Anggota
2	Mahmud	26 th	Wonokaton	#	STM	Sekretaris
3	Sumarji	28 th	Wonokaton	Buruh	SD	Kordus
4	Lasminto	29 th	Belung	Buruh	SD tidak tamat	Wakil
5	Muchdlori	30 th	Curah Timo	Guru Ngaji	Pondok	Anggota
6	Akim	32 th	Belung	Buruh	SD	Mantan Ketua
7	Sampurno	35 th	Alaskerbo	Persewaan	SD	Kordus
8	Purwo Eko	36 th	Curah Timo	Penjual Gamblong	SPG	Ketua
9	H. Mustofa (Gus Tofa)	40 th	Sumurwaru	Petani/Peternak	Sarjana	Koordinator
10	Muchtar	40 th	Curah Timo	#	SD tidak tamat	Anggota
11	Buraji	41 th	Curah Timo	Pedagang	SMP	Bendahara
12	Abdul Khamid	46 th	Curah Timo	Kepala Desa	Aliyah	
13	Sunar	50 th	Wonokaton	Mantan Peg. KGA	SD tidak tamat	Anggota
14	Karyono	63 th	Sumurwaru	Pensiunan Guru	SPG	Anggota
15	Abdul Latif	67 th	Belung	Pencari Rumput	#	Anggota
16	Nur Bai	73 th	Belung	Pencari Rumput	#	Anggota

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Proses penggalian data untuk kebutuhan penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### **3.5.1. Penelitian Dokumen**

Dokumen yang dimaksud bisa berupa surat-surat, memoranda, agenda, dokumen-dokumen administrasi dan sebagainya yang berhubungan erat dengan kebutuhan penelitian. Teks-teks dokumen ini diperlakukan dalam konteksnya masing-masing, yang akan memberikan pandangan-pandangan alternatif terhadap cara-cara yang dipersepsikan dan dipakai dalam kehidupan mereka. Pada gilirannya dokumen-dokumen ini berguna dalam membuat inferensi-inferensi tentang berbagai kejadian.

Dokumen dimaksud adalah dokumen-dokumen perihal desa Sumberanyar yang menyangkut profil desa, peta monograf dan sebagainya yang dapat digali dari berbagai instansi serta dokumen-dokumen organisasi yang berupa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, berbagai surat yang masuk maupun keluar dalam organisasi, pers release, peta tanah yang diklaim ulang, hingga dokumen-dokumen yang menggambarkan kronologi aksi yang terekam dalam buku agenda kegiatan, berita-berita di media cetak dan sebagainya.

Dalam konteks penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut diharapkan akan menjelaskan bagaimana gerakan-gerakan yang difasilitasi oleh organisasi dalam suatu konteks perlawanan dilakukan. Hal ini untuk menghindari reduksi-reduksi yang mungkin saja muncul dari apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka katakan.

### 3.5.2. *Wawancara*

Wawancara yang hendak dilakukan merupakan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam (*in-depth interview*) melalui kontak tatap muka (*face to face relationship*). Wawancara tak terstruktur digunakan dalam usaha untuk memahami perilaku yang kompleks dari para aktor tanpa harus menentukan berbagai kategorisasi yang apriori yang bisa jadi malah membatasi lapangan penyelidikan. Karenanya, esensi dari wawancara tak terstruktur yang lebih mengedepankan relasi antar manusia (antara peneliti dan subyek penelitian) adalah untuk memahami daripada untuk menjelaskan (*to understand rather than to explain*).

Dialog atau wawancara tersebut tidak hanya dilakukan secara tertulis, peneliti juga menggunakan *tape recorder*, sejauh tidak mengganggu kenyamanan informan, sehingga diperoleh deskripsi pengalaman sejumlah aktor. Selanjutnya dilakukan transkripsi serta pemeriksaan hasil dialog, mengamati kata per kata yang secara tidak langsung akan menggambarkan

suasana yang dibatinkan oleh subyek. Karena itu peneliti harus tampil lebih aktif untuk bertanya, merekam, mencatat dan melakukan klasifikasi selengkap mungkin.

### **3.5.3. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan melalui pengamatan dan pencatatan atau perekaman fenomena-fenomena yang tampak pada subyek penelitian pada saat peristiwa, keadaan atau situasi-situasi tertentu yang sedang berlangsung di lapangan. Ada dua jenis pengamatan yang digunakan di sini. Pengamatan langsung dan pengamatan partisipatif. Pengamatan langsung berguna untuk memahami suatu keadaan, membaca tindakan, reaksi dan semua yang dikonstruksi dalam berkelompok, di samping berguna untuk memberi informasi-informasi tambahan tentang topik yang diteliti. Pengamatan partisipatif membuat peneliti menjadi partisipan yang aktif di dalam setiap kejadian yang diteliti. Cara ini akan memberikan kesempatan-kesempatan yang tidak biasa dalam pengumpulan data, di mana peneliti secara intensif terlibat dalam interaksi sosial dengan subyek penelitian di dalam lingkungan si subyek sendiri.

Dalam hal ini peneliti akan mencoba secara intensif berada di lokasi penelitian untuk mencatat berbagai peristiwa yang nampak dengan asumsi bahwa realitas masyarakat terbentuk dalam proses yang terus menerus

utamanya berkaitan dengan proses-proses pengorganisasian. Seperti halnya perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan oleh organisasi maupun aktifitas-aktifitas lain (kerja bakti, pengajian, kegiatan di tempat kerja dan sebagainya) yang mampu menggambarkan dimensi kognitif, psiko-motorik, emosional dan intuisi para petani. Dari situ peneliti dapat melihat posisi aktor dalam membangun interaksi sosial, kerja sama, kekompakan maupun persahabatan mereka yang dalam konteks organisasi mewujudkan suatu tindakan kolektif.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Data kualitatif, yang lebih berwujud kata-kata daripada deretan angka-angka, merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif dapat diikuti dan dipahami alur peristiwa secara kronologis, dinilai sebab akibatnya dalam lingkup alam pikiran orang-orang setempat, dan diperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

Karena data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, maka analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun dengan menggunakan teks yang diperluas. Dalam penelitian ini analisis data

mengikuti tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *reduksi data*, *penyajian data* dan *penarikan kesimpulan* dan atau *verifikasi*.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan serta pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang dilakukan sejak mulai dan bahkan sebelum mengumpulkan bahan empirik. Kemudian berlanjut hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Yang dimaksud penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan kata lain, bahan empirik yang telah direduksi disajikan dalam bentuk bahan yang diorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur dalam bentuk teks naratif, jaringan atau diagram, matriks dan sinopsis.

Sedangkan Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sebagai upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang membentuk validitasnya.

Tiga langkah tersebut digunakan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dengan

demikian tiga jenis kegiatan analisis tersebut dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklik dan interaktif.

Sebagai suatu penelitian studi kasus berikut karakteristik yang dimilikinya, penelitian ini akan menggunakan metode yang relevan, yaitu penarikan kesimpulan dan atau *verifikasi situs tunggal* atau biasa disebut analisis di dalam situs. Di antara teknik yang diambil yaitu penggunaan *bagan konteks*, *matriks peranan tertata* dan *pemasukan peristiwa dalam daftar*. Bagan konteks secara grafis akan memetakan hubungan antara peranan kelompok dan organisasi yang dibentuk oleh konteks perilaku individu. Matriks peranan tertata berguna untuk menyortir data dari baris-barisnya yang telah dikumpulkan dari atau tentang gugusan peranan tertentu, yang merefleksikan pandangan-pandangan subyek penelitian. Dan memasukkan peristiwa dalam daftar berarti peneliti menyusun suatu rangkaian peristiwa nyata dalam periode waktu secara kronologis dan menyortirnya ke dalam beberapa kategori.

### **3.7. Proses Penelitian**

Proses yang dilakukan dalam penelitian berlangsung selama 8 bulan, terhitung mulai bulan Juli 2001 hingga bulan Februari 2002, meski sebelumnya peneliti telah beberapa kali mengunjungi lokasi untuk memperoleh data-data

awal hingga tersusunnya proposal penelitian. Selama itu, peneliti tidak sepenuhnya berada di lokasi penelitian. Variasi kunjungan kebanyakan dilakukan dengan mengatur jadwal di mana setidaknya dalam seminggu selama dua hari peneliti berada di lokasi. Selebihnya digunakan untuk menyalin dan menyusun hasil-hasil wawancara maupun catatan lapangan yang diperoleh. Namun untuk beberapa peristiwa yang peneliti sendiri merasa perlu hadir di lapangan, semisal rapat-rapat, frekuensi kunjungan menjadi lebih sering.

Tahap paling awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi adalah menemukan *key informant* (informan kunci) untuk dijadikan titik masuk bagi informan-informan lainnya (*snowballing*). Informan pertama yang peneliti temui adalah H. Mustofa atau Gus Tofa sebagai pemimpin gerakan di Sumberanyar. Dengan menentukan H Mustofa sebagai titik masuk, ternyata sangat memberikan keuntungan yang besar bagi peneliti untuk dapat mengenal lebih banyak anggota gerakan ini tanpa harus mendapati kecurigaan-kecurigaan dari mereka. H. Mustofa seakan menjadi jaminan bagi peneliti dalam berinteraksi dengan penduduk desa Sumberanyar, baik dengan mereka yang berpartisipasi dalam gerakan maupun yang tidak.

Karena, memasuki dunia gerakan bagi orang luar seperti peneliti, tidaklah semudah yang dikira. Terutama untuk para pengurus FKTS, kehati-hatian dalam menerima kehadiran orang luar menjadi semacam prasyarat

mutlak bagi kelangsungan gerakan mereka. Tidak jarang peneliti harus dicecar dengan banyak pertanyaan menyangkut keperluan penelitian ini dan manfaatnya bagi mereka. Hanya saja, 'restu' yang diberikan H Mustofa pada peneliti adalah kunci ampuh untuk memasuki dunia gerakan mereka. Selama di lokasi, peneliti memang tinggal di rumah tokoh ini.

Dalam menemui sejumlah informan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut; *pertama*, peneliti mencoba terlebih dahulu memosisikan diri tidak lagi sebagai orang luar, dan ini begitu sulit, agar didapatkan kedekatan dengan penduduk Sumberanyar tanpa harus menggali informasi lebih banyak dahulu. Dengan bantuan H Mustofa, pada tahap ini peneliti lebih banyak hanya sekadar beramah tamah dengan sejumlah pengurus FKTS sembari memberi pengertian maksud kehadiran peneliti di desa ini. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan dasar coba diajukan yang dapat digunakan sebagai petunjuk awal bagi proses wawancara selanjutnya.

*Kedua*, wawancara mendalam dilakukan pada beberapa informan yang telah ditentukan, mulai dari pengurus FKTS hingga para anggotanya. Pada tahap ini peneliti sangat aktif bertanya sesuai dengan informasi-informasi awal yang didapat dan jawaban-jawaban informan sendiri. Sebagai suatu wawancara yang tak terstruktur, peneliti mencoba mengkondisikannya sebagai obrolan biasa yang sama sekali tidak formal, terutama untuk informan-informan yang

bukan pengurus. Catatan-catatan kecil dipergunakan seperlunya agar tidak mengganggu suasana santai yang hendak dibangun. Hanya bagi informan yang merasa tidak terganggu dengan kehadiran tape recorder, alat ini digunakan, atau untuk merekam rapat-rapat yang diselenggarakan.

Penelitian ini sendiri dilakukan jauh setelah gerakan pendudukan lahan berlangsung pada Nopember 1999. Karenanya, wawancara mendalam pada beberapa informan menjadi penting dilakukan untuk dapat menangkap proses dan situasi yang berkembang yang mengiringi gerakan pendudukan lahan, terutama dari sisi pengorganisasiannya. Lebih dari itu, juga untuk mengenali dan membongkar suasana yang dibatinkan para informan menyangkut rasionalitas dan kesadaran mereka.

*Ketiga*, penelitian dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan baik tentang profil desa ini maupun peristiwa-peristiwa yang sempat tercatat dalam pengorganisasian. Dokumen-dokumen demikian banyak didapatkan peneliti dari Mahnud, sekretaris FKTS, yang begitu rajin mengumpulkan surat-surat dan mencatat setiap peristiwa hingga penelitian ini dilakukan.

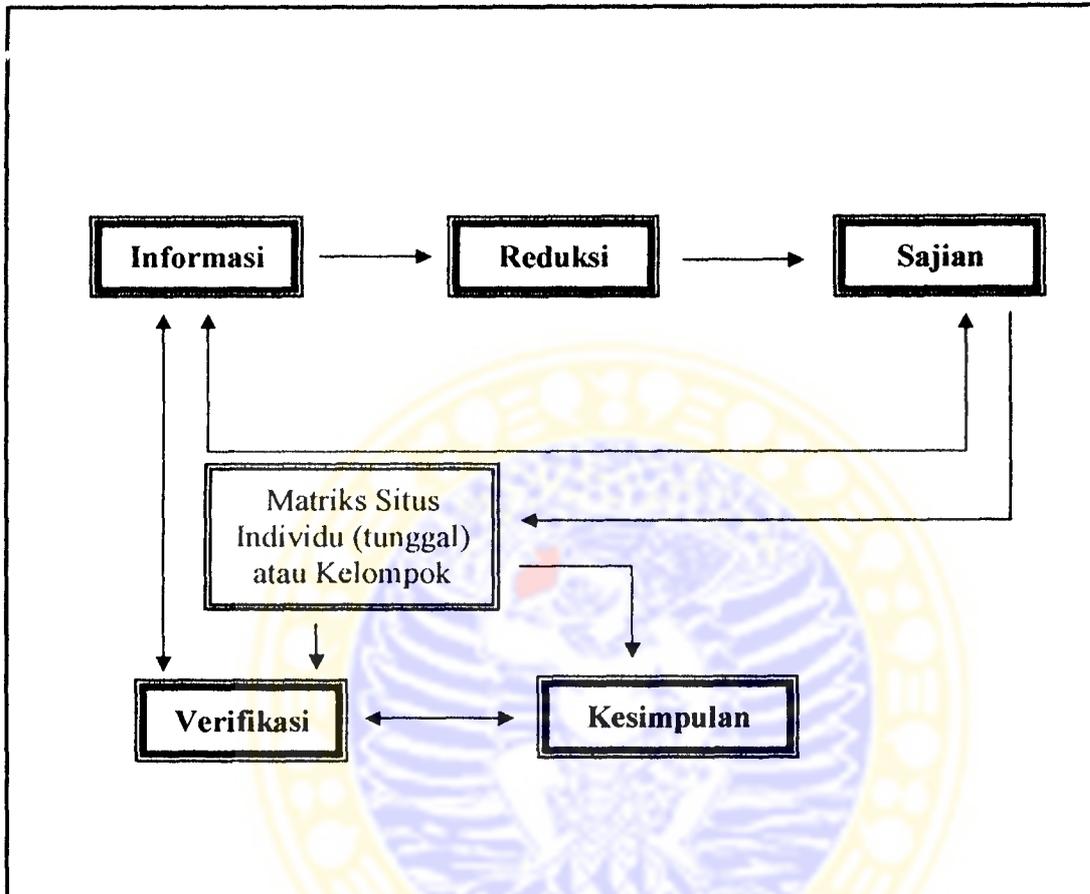
*Keempat*, peneliti juga melakukan beberapa kali kunjungan lapangan dengan berkeliling di desa Sumberanyar untuk mengenal lebih jelas kehidupan masyarakat di sana, dengan mencoba mendatangi beberapa rumah untuk beramah tamah, meninjau areal lahan yang telah diduduki, melihat lebih dekat

kerja-kerja pertanian yang mereka lakukan serta menghadiri beberapa pertemuan, apakah itu rapat atau sekadar *tahlilan* (berdoa bersama untuk keluarga yang meninggal).

*Kelima*, setelah data dan informasi terkumpul, dilakukan proses pemilihan informasi/data (reduksi data) yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Secara lebih khusus, reduksi data dimaksudkan untuk memilah pola-pola rekonstruksi individu dan kelompok dengan proses pengorganisasian yang dilakukan. Hasilnya disusun dalam matriks-matriks yang dibedakan menurut persoalan yang dibahas. Matriks yang ada di antaranya adalah matriks kronologi peristiwa dan matriks wacana-respon petani. Digunakannya matriks-matriks ini sangat bermanfaat untuk menyajikan data (*data display*) agar dapat dianalisis secara mudah.

Terakhir, dilakukan proses verifikasi dari temuan-temuan yang didapat dengan beberapa informan yang dipilih untuk mendapatkan rekonstruksi utuh dari realitas sosial yang diteliti. Dan berlanjut dengan analisis dengan menggunakan kerangka teoretik yang ada sebelum sampai pada kesimpulan.

Proses penelitian di atas, dapat terangkum dalam gambar sebagai berikut:



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

### **DESA SUMBERANYAR**

#### **4.1. Desa Sumberanyar dan Masyarakatnya**

Sumberanyar merupakan salah satu dari 341 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jarak desa ini dari ibukota kabupaten kurang lebih 25 km. Letaknya berada di sisi paling timur Kabupaten Pasuruan yang lebih dekat ke kabupaten Probolinggo. Desa inipun berada di ujung paling barat kecamatan Nguling. Jarak dari ibukota kecamatan sekitar 5 km. Luas desa Sumberanyar adalah 602 hektar yang terdiri dari tanah pertanian/perkebunan dan sebagian kecil untuk pemukiman (sementara yang dikuasai TNI AL  $\pm$  500 hektar). Desa ini dibelah oleh jalan negara (jalan Deandels) yang menghubungkan Pasuruan dan Probolinggo.

Posisi yang cukup jauh dari pusat birokrasi sedikit memberi gambaran bagaimana masyarakat menjadi tidak terlalu akrab dengan urusan-urusan administratif pemerintahan. Justru mereka lebih akrab dengan urusan-urusan kemiliteran akibat hadirnya TNI AL dalam kehidupan mereka. Posisi kantor Prokimal yang bersebelahan dengan desa mereka, tepatnya di desa Sumberagung, telah memberikan pengaruh penting dalam kehidupan sosial di desa ini. Sebagai wilayah yang sebagian besar tanahnya dikuasai oleh TNI AL,

praktis kekuasaan atas masyarakat di desa ini berada di tangan kesatuan militer ini. Perubahan dan proyek pembangunan apapun menyangkut sebagian besar warga desa ini di bawah kontrol sepenuhnya TNI AL.

Kabupaten Pasuruan sendiri secara geografis terletak pada  $112.30^{\circ}$  sampai dengan  $113.30^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7.30^{\circ}$  sampai dengan  $8.30^{\circ}$  Lintang Selatan. Secara geologis, Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi tiga bagian; (1) daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180 sampai dengan 3000 m di atas permukaan laut, daerah ini membentang di bagian selatan dan barat. (2) Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 sampai dengan 91 m di atas permukaan laut, daerah ini berada di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur. Dan (3) daerah pantai, dengan ketinggian 2 sampai dengan 8 m di atas permukaan laut, daerah ini membentang di bagian utara.

Wilayah Sumberanyar terdiri dari daratan yang berbukit, tampak tandus dan kering. Struktur tanahnya sendiri lebih banyak berupa tanah padas berbatu, dan sebagian kecil saja yang merupakan lahan subur untuk pertanian. Di tanah-tanah padas ini banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman berduri, semisal pohon widara. Dan selebihnya dapat ditanami jagung maupun kacang-kacangan. Tidak ada saluran irigasi yang dapat menyangga kehidupan pertanian di desa ini. Satu-satunya saluran irigasi berupa pipa-pipa sebagai

infrastruktur perkebunan telah banyak dirusak oleh masyarakat bersamaan dengan gejolak yang terjadi di desa ini pada 1998.

Penduduk desa ini pernah menikmati tingkat kemakmuran tertentu yang dihasilkan oleh produksi tanah mereka sendiri yang harus sirna karena masuknya TNI AL. Secara artikulatif, Purwo Eko memberikan ilustrasinya pada sebuah ungkapan anak-anak muda desa: *"Nek sek koyo mbiyen, tumpa'ane awak dhewe crystal"*, kira-kira maksudnya adalah; kalaulah tanah ini masih dikuasai oleh masyarakat setempat, kemakmuran akan didapati di desa ini sehingga sangat mudah bagi pemuda seperti Purwo Eko di atas membeli sepeda motor semacam Suzuki Crystal.

Satu ungkapan yang singkat, namun cukup memberikan gambaran tentang desa Sumberanyar, masa lalu dan masa kini. Pemuda-pemuda sekarang hanya mendengar kemakmuran dan kesejahteraan desa Sumberanyar di masa lalu. Beberapa monumen (rumah kuno) yang tersisa menjadi bukti di masa lalu Sumberanyar merupakan desa yang makmur. Rumah-rumah tersebut berangka tahun sepuluh dan duapuluh (1910 dan 1920-an).

Diceritakan paling tidak ada empat orang penduduk desa Sumberanyar yang waktu itu sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Kemakmuran leluhur desa Sumberanyar bertumpu pada hasil pertanian jagung, sehingga terkenal ke

luar desa, bahkan orang-orang Probolinggo juga mengenal desa Sumberanyar sebagai penghasil jagung yang besar.

Bila sejarah Sumberanyar dihitung sejak awal 1900-an sampai 2000, maka ada rentang waktu tertentu yang memberi kesempatan kepada kemiskinan untuk membebani masyarakat Sumberanyar. Masa-masa kolonial Jepang dapat disebut sebagai mula awal masuknya kemiskinan, meskipun Belanda juga ikut andil. Perusahaan-perusahaan perkebunan di zaman Orde Baru yang bekerja sama dengan pihak TNI AL, mulai dari KGA sampai Rajawali, merupakan pihak yang terakhir menancapkan dominasi eksplorasi dan eksploitasi atas hasil-hasil pertanian di Sumberanyar. Wajah Sumberanyar sekarang, hanyalah wajah kemiskinan, terlebih mereka yang tinggal di sebelah utara jalan Deandels. Rumah-rumah yang jadi tempat tinggal mereka juga kecil, sederhana, dan lebih terkesan kurang sehat.

#### **4.2. Struktur Ekonomi Masyarakat**

Desa Sumberanyar, dibandingkan dengan desa-desa lainnya, tampak unik. Umumnya kawasan pedesaan pedalaman di Indonesia, masyarakatnya adalah petani, namun tidak demikian pada desa Sumberanyar. Forum Komunikasi Petani Sumberanyar (FKTS) yang berdiri sejak 14 Agustus 1998, merupakan bentuk kebangkitan petani yang sesungguhnya. Sebelum aksi

pendudukan lahan, masyarakat Sumberanyar memang petani, namun mereka tidak punya sedikitpun lahan untuk pertanian. Dengan kata lain mereka petani, hanya namanya saja petani, kenyataannya mereka tidak menggarap sawah atau ladang. Hal ini nampak sekali, ketika aksi pendudukan lahan menghasilkan pembagian tanah garapan, mereka bingung dan asal-asalan dalam mengelola tanah pertanian. Mereka harus belajar dari awal lagi untuk menjadi petani. Perubahan ini dialami sebagian besar masyarakat Sumberanyar, lebih-lebih mereka yang lahir tahun 1960-an sampai sekarang.

Kehidupan masyarakat Sumberanyar dari sisi ekonomi sejak tahun 1961 (tahun dikuasainya tanah Sumberanyar bagi proyek AL), sudah bergeser dari petani yang memiliki lahan, menjadi petani penggarap lahan. Hasil maupun pola tanam yang diterapkan pun mengikuti apa petunjuk dari AL. Perekonomian mereka lebih memprihatinkan sejak tahun 1980-an, ketika tanah sudah disewakan kepada pihak swasta untuk kepentingan perkebunan tebu. Sebagian masyarakat menjadi pegawai perkebunan, itupun pegawai rendahan, *preman* (buruh) atau *waker* (penjaga perkebunan). Ungkapan yang sering dibuat sindiran masyarakat adalah : “*pekerjaan kasar kita diberi, tapi kalau jabatan yang atas mereka impor*”.

Perekonomian masyarakat Sumberanyar sejak itu tidak bergantung lagi kepada tanah. Mereka berusaha untuk *survive* dengan cara menjadi kuli

bangunan, tukang kayu, ikut kapal nelayan, buruh pedagang atau buruh pabrik. Hanya sejak berdirinya Koperasi Susu Suka Makmur di Grati, banyak dari mereka kemudian menjadi peternak sapi perah milik orang-orang luar desa yang dititipkan pada mereka untuk dipelihara. Satu kesepakatan yang bersifat kontraktual antara pemilik dan peternak telah sedikit membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Tidak demikian halnya dengan penduduk Semberanyar di sebelah selatan jalan. Tingkat ekonomi masyarakat ini sedemikian baiknya sehingga membuat jurang tajam dengan masyarakat di sebelah utara jalan, hal ini ditunjukkan oleh padatnya perumahan yang ada dengan kualitas rumah yang sangat memadai. Warga di sini asalnya juga sebagian besar adalah masyarakat sebelah utara jalan. Sejak awal mereka adalah orang-orang yang memang secara ekonomi lebih baik, hingga ketika TNI AL masuk, mereka segera pindah ke utara jalan untuk menghindari masalah yang lebih besar.

Mereka kebanyakan adalah pedagang dan peternak sapi perah, selebihnya adalah pegawai negeri maupun swasta. Tingkat pendidikan yang baik yang dicapai oleh masyarakat di sini ditambah oleh surplus ekonomi yang mereka rasakan menyebabkan mereka tidak sangat terganggu dengan hadirnya perkebunan. Kepentingan ekonomi mereka tidak banyak berhubungan dengan kepentingan ekonomi perkebunan. Lebih jauh, penderitaan yang dialami

masyarakat sebelah utara jalan pun secara ekonomi, dengan demikian, tidak berdampak yang serius bagi kehidupan ekonomi di wilayah ini.

### **4.3. Demografi Desa**

Ada satu hal yang menjadi persoalan besar bagi penulis, ketika mencoba mencari data demografi desa Sumberanyar. Hal tersebut, bisa disebut sepele, namun sebenarnya merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, menyangkut keberadaan desa Sumberanyar sendiri. Kantor desa Sumberanyar tidak menyajikan data demografi desa, sementara itu kepala desa juga kurang memperhatikan persoalan ini. Papan monografi desa dibiarkan kosong tanpa angka-angka. Betapa sulitnya mencari gambaran desa Sumberanyar dalam angka. Alasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Abdul Khamid adalah bahwa sebagian besar wilayah desa ini dikuasai oleh TNI AL sehingga dia merasa cukup kesulitan untuk mencatat dan mengatur berbagai hal yang menyangkut data kependudukan di desa ini kecuali yang berkaitan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Setelah dilacak ke BPS, ternyata juga mengalami kesulitan. Ada persoalan-persoalan politis, etika maupun teknis yang menghalangi BPS Pasuruan mengeluarkan data demografi desa Sumberanyar. Kesulitan dalam pengumpulan data ini ternyata semakin terbukti dari peta tentang desa

Sumberanyar. Ada dua versi mengenai peta desa Sumberanyar, yang dibuat oleh AL dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), diketahui oleh camat, dan kepala desa serta kedua yang dibuat oleh FKTS setelah adanya gerakan protes (aksi *reclaiming*). Untuk perbandingan ini dapat dilihat pada lampiran.

Peta pertama, memberikan gambaran bahwa di desa Sumberanyar tidak dihuni oleh penduduk. Selama ini memang data tentang kependudukan tidak pernah tercatat dengan baik. Penduduk desa Sumberanyar seakan sudah terhapus dalam peta; tidak ada gambar bangunan rumah, masjid, sekolah. Yang ada hanya gambar perkebunan. Pada peta ini yang diakui keberadaannya adalah perkebunan dan pemukiman AL. Sedangkan peta kedua sudah menyebutkan adanya penduduk, dan bangunan di atas tanah desa Sumberanyar. Realitas ini seakan menunjukkan tengah terjadi pemusnahan administratif desa Sumberanyar.

Satu-satunya informasi yang dapat menjadi bahan untuk diolah tentang demografi adalah data yang diberikan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) kecamatan Nguling. Data tersebut menyangkut keluarga sejahtera dan pra-sejahtera. Jumlah keluarga di desa Sumberanyar adalah 1491 keluarga dengan kepala keluarga laki-laki sejumlah 1224 dan perempuan 267, dengan total penduduk sebanyak 4986 jiwa terdiri dari laki-laki 2411 jiwa, perempuan 2575 jiwa.

**TABEL KELUARGA SEJAHTERA  
DESA SUMBERANYAR TAHUN 2000**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN KELUARGA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pra-Sejahtera	167 K	Alasan ekonomi
2.	Pra-Sejahtera	191 K	Bukan ekonomi
3.	Sejahtera I	59 K	Alasan ekonomi
4.	Sejahtera I	560 K	Bukan ekonomi
5.	Sejahtera II	232 K	
6.	Sejahtera III	282 K	
7.	Sejahtera Plus	15 K	

Sumber : PLKB Kec. Nguling Kab. Pasuruan Th 2000

Penduduk yang usia sekolah (7-15 tahun) 730 anak, sedangkan 50 anak tidak sekolah. Anak-anak tersebut sekolah di empat SDN yang ada di Sumberanyar dan SLTP di Nguling. Separoh lebih dari keluarga di Sumberanyar masih dalam tahap pra-sejahtera dan sejahtera I (padahal batas ini sangat minin dan masih memicu kontroversi berbagai pihak). Kemiskinan nampaknya menjadi beban terbesar dari desa ini, terlebih lagi persoalan infrastruktur lainnya, seperti jalan dan listrik. Baru tahun 1999 listrik masuk desa ini, itupun harus ditanggung oleh masyarakat sendiri biayanya.

#### 4.4. Pemerintahan Desa

Sejarah pemerintahan desa Sumberanyar dapat diurut sejak zaman kolonial Belanda, tahun 1902. Waktu itu Kepala Desa dipegang oleh Haji Sulthon, dan Sekretaris desa Gunaron. Saat itu pula desa Sumberanyar sudah terbagi ke dalam beberapa pedukuhan, yaitu:

1. Pedukuhan Sumurwaru Timur
2. Pedukuhan Sumurwaru Barat
3. Pedukuhan Curahtimo
4. Pedukuhan Belung
5. Pedukuhan Wonokaton
6. Pedukuhan Karanganyar
7. Pedukuhan Jurangjero
8. Pedukuhan Gunungbukor
9. Pedukuhan Alaskerbo

Jumlah dan nama pedukuhan sampai sekarang masih tetap seperti semula. Haji Sulthon berasal dari Wonokaton. Pada kepemimpinan berikutnya akan nampak keragaman asal kepala desa yang memimpin Sumberanyar.

Tahun 1935 diadakan pemilihan desa yang dimenangkan oleh Tamon dari Karanganyar. Kepemimpinannya tidak sempat berumur panjang, hanya dua tahun, akibat dari sikapnya sendiri yang kurang adil terhadap rakyat. Tahun 1937, diadakan pemilihan kepala desa, dan saat itu ada dua calon kuat, yaitu Arendho dan Dekemis. Proses pemilihannya dilakukan dua kali, pada tahap pertama diikuti lima orang calon, dan tahap kedua diikuti dua calon tersebut. Akhirnya Bapak Arendho yang terpilih, dan sejak 1937 dipimpin oleh

Arendho yang berasal dari dukuh Karanganyar. Sekdes dijabat oleh Maisa, dan setelah dua tahun diganti oleh Ngatimin. Namun Ngatimin hanya berjalan tiga bulan, dan diganti oleh Bunasir yang bertahan 6 bulan. Pergantian sekdes dilanjutkan Sanip yang bertahan dua bulan, dan akhirnya diganti oleh Dulmuki.

Tahun 1952, pemilihan kepala desa dilakukan, karena Arendho meninggal dunia. Saat itu muncul tiga calon, yaitu: Sumo/Hasyim, Sugan, dan Mughni. Pemilihan dimenangkan oleh Sumo/Hasyim asal pedukuhan Sumurwaru. Namun sayang, jabatannya hanya bertahan satu tahun akibat didesak oleh masyarakat. Hasyim dituduh telah menghabiskan lumbung persiapan paceklik dan menjual pohon Asem kepada pabrik gula Kedawung.

Pemilihan terpaksa dilakukan lagi. Tiga calon berlomba dalam pemilihan tersebut, yaitu: Sukari, Kamar, dan Sugan. Kamar terpilih menjadi kepala desa dibantu sekdes Qusyen. Jabatan sekdes biasanya lama (bisa seumur hidup), namun karena Dulmuki dianggap tidak taat pada atasan, maka oleh Kamar diganti. Peristiwa pengalihan/penjualan tanah dari masyarakat kepada pihak KKO (Angkatan Laut) terjadi pada saat kepala desa dipegang oleh Kamar.

Pada tahun 1968, masyarakat menuntut kepada camat untuk memberhentikan Kamar sebagai kepala desa, karena dianggap telah menjual tanah rakyat. Camat Nguling menunjuk Syajab sebagai kepala desa sementara

untuk tahun 1968-1970. Dengan demikian, saat itu kepala desa didasarkan atas penunjukan. Baru tahun 1970, diadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Sarmeli. Nasibnya juga tragis seperti pendahulunya, diganti tidak terhormat akibat menghabiskan uang PBB, kemudian ditunjuk Arpati sebagai kepala desa sementara. Namun sayang dia mengikuti jejak Sarmeli.

Akhirnya camat Nguling menunjuk Soenari (purnawirawan AL) sebagai kepala desa. Tahun 1976, Sumberanyar dipimpin kepala desa yang berasal dari militer. Sesuai dengan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka jabatan kepala desa hanya berlaku sampai delapan tahun. Dengan demikian secara otomatis, Soenari berakhir jabatannya, dan tahun 1993 diganti oleh kepala desa sementara, yaitu Edy (pegawai kantor kecamatan Nguling). Pemilihan baru memunculkan kepala desa baru, yaitu Abdul Khamid dan menjabat sampai sekarang.

#### **4.5. Sistem Sosial Keagamaan**

Masyarakat Sumberanyar sering menyebut dirinya sebagai percampuran orang Jawa-Madura, hal ini dapat terlihat dari bahasa maupun bukti kesejarahan yang ada yang menegaskan banyak di antara mereka adalah keturunan etnis Madura. Ada makam tua, yang dianggap sebagai orang pertama yang melakukan *babat alas* desa Sumberanyar yang keduanya adalah

Madura Pendalungan. Bahasa mereka seperti orang-orang yang berada di pantai utara tapal kuda Jawa Timur adalah bahasa Madura, hanya sedikit kasar. Namun demikian mereka tetap bisa berbahasa Jawa. Hanya sebagian orang-orang lanjut usia, yang masih mempertahankan bahasa Madura (tidak bisa berbahasa Jawa). Generasi mudanya sudah biasa menggunakan dua bahasa tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat Pasuruan, yang sangat dipengaruhi kehidupan santri, masyarakat Sumberanyar juga sangat hormat kepada para kyai atau ulama. Meskipun tidak semua pedukuhan yang ada mempunyai fasilitas keagamaan yang memadai atau kegiatan keagamaan yang rutin, namun dalam keseharian mereka tetap memegang teguh cara hidup santri. Masjid yang berada dekat kantor desa nampak bagus; untuk tiap pedukuhan memiliki musholla, meskipun itu seadanya. Ada satu musholla yang mempunyai jama'ah banyak, yaitu yang ada di Curah Timo. Memang di pedukuhan tersebut dari dulunya dekat dengan kehidupan keagamaan, dan dekat dengan kyai.

Hubungan masyarakat sangat dipengaruhi pola hubungan santri-kyai, di mana santri harus selalu patuh dan taat kepada kyai. Penghormatan masyarakat tidak terbatas pada pribadi kyai, tetapi juga kepada keluarga serta keturunan kyai. Merekalah yang biasa disebut 'Gus' oleh masyarakat. Posisi 'Gus' mempunyai kedudukan yang penting, karenanya begitu disegani.

## **BAB V**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

#### **5.1. Sengketa Agraria dan Aksi Reclaiming**

Pada penghujung 90-an, ketika banyak masyarakat mulai dengan berani mempertanyakan kekuasaan negara atas hak-hak ekonomi yang telah bertahun-tahun lepas dari tangan mereka, secara eksplosif tersingkap beragam kasus-kasus pertanahan yang menggelinding dan menjadi perbincangan serius di dalam ruang-ruang publik. Tuntutan demi tuntutan yang disuarakan masyarakat yang merasa menjadi korban-korban pembangunan telah begitu nyata menggambarkan betapa persoalan yang satu ini telah membentangkan kenyataan akan keseriusan sengketa agraria yang terjadi di negeri ini.

Data yang diungkap oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) menyebutkan tidak kurang dari 1.743 kasus sengketa agraria muncul di seluruh penjuru tanah air dalam rentang waktu antara tahun 1970 hingga 2000 dengan melibatkan lahan seluas 8.370.573,44 hektar (**Sumber: Database Sengketa Agraria, KPA, 2000**). Sengketa agraria dalam hal ini dimaksudkan sebagai sengketa atas sebidang tanah beserta apa yang tumbuh di atasnya dan apa yang terkandung di dalamnya. Hal ini dimulai oleh proses negaraisasi dan nasionalisasi tanah dan sumberdaya alam petani. Atas dasar klaim negara ini, pemerintah memberikan ijin-ijin dan hak-hak pemanfaatan atas tanah tersebut

untuk perusahaan-perusahaan bermodal besar atau proyek-proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah (Fauzi, 200: 207).

Beragam kasus yang mengemuka dengan disertai pula keragaman kepentingan yang ikut bermain di dalamnya menjadikan sengketa agraria di republik ini menyiratkan hubungan yang problematis antara *tanah* sebagai basis sosial ekonomi masyarakat --khususnya kaum tani-- dan *pembangunan* sebagai proyek negara dalam kerangka modernisasi dan kapitalisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kebutuhan proyek-proyek pembangunan atas tanah adalah basis konflik yang utama terjadinya sengketa pertanahan tersebut. Setidaknya, dapat terlihat bahwa kebijakan ekonomi yang kapitalistik dan lebih berorientasi pada pertumbuhan mampu mendesakkan kekuasaan modal dan intervensi negara terhadap pemanfaatan tanah secara besar-besaran sembari menyisakan ketidakpuasan masyarakat yang harus kehilangan hak atas tanahnya. Hal ini lebih disebabkan adanya semacam “keharusan struktural” negara demi mengakomodasi percepatan pertumbuhan dan perluasan modal, misalnya untuk keperluan pembangunan pabrik.

Pada gilirannya, terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lahan pada para pemilik modal ataupun penguasaan oleh negara. Sebagai contoh, 10 resitor terbesar di Jawa Timur pada tahun 1980-an rata-rata memiliki/menguasai ratusan hektar tanah. Hotman Siahaan melaporkan lahan

tambak seluas 4.069.035 hektar hanya dimiliki oleh 290 orang, secara individual maupun sebagai badan hukum (Siahaan, 1988: 7).

Laporan KPA menyebutkan berbagai ragam kasus tanah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:

**Sengketa Agraria (1970-2000) dan Luas Lahan di Jawa Timur**

No.	Jenis Sengketa Tanah	Jumlah Kasus	Rank	Luas Lahan (ha)	Rank	Keterangan
1	Kawasan Industri/Pabrik	8	5	3.055,00	3	
2	Tourisme/Hotel/Resort	10	4	76,60	9	
3	Perumahan/Kota Baru	13	3	1.683,00	4	
4	Sarana Militer	3	9	1.173,00	6	
5	Kehutanan Produksi	4	8	221.341,00	1	
6	Perkebunan	34	1	26.133,22	2	
7	Pertambangan	-		-		
8	Pertambakan	7	6	1.387,60	5	
9	Peternakan	-		-		
10	Konservasi Hutan	3	9	714,00	8	
11	Perairan	-		-		
12	Bendungan/Pengairan	7	6	172,00		
13	Sarana Umum/Fasilitas	30	2	1.145,90	7	
14	Sarana Pemerintahan	6	7	45,21	10	
15	Obyek Land Reform	-		-		
16	Lain-lain	36		21,00		Karena jenis multivarian, tidak dirank
	Jumlah	161		256.947,53		

*Diolah dari 'Database Sengketa Agraria, KPA, 2000'*

Dari data tersebut ada beberapa catatan penting. *Pertama*, secara berurutan yang menjadi sumber sengketa tanah adalah sengketa perkebunan, sarana umum, dan perumahan/ kota baru. Demikian juga lahan perkebunan yang disengketakan menempati urutan kedua dari seluruh kasus

yang ada, yaitu seluas 26.133,22 ha. *Kedua*, khusus sengketa dengan militer, maka menempati urutan yang terakhir (sembilan) bersama dengan konservasi hutan. Jumlah kasus yang ada hanya tiga, namun melihat lahan yang disengketakan maka satu kasus dengan militer rata-rata tanah yang disengketakan 391 ha. Luas tersebut merupakan jumlah yang besar, bisa seluas satu desa. Khusus tanah Sumberanyar seluas 543,5 ha. *Ketiga*, dari luas wilayah Jawa Timur 48.344,53 ha, sebesar 0,53% menjadi sengketa.

Lebih tragisnya, 42,8% kasus sengketa tanah di Jawa Timur diikuti dengan tindak kekerasan dengan korban mencapai 11.854 orang. Khusus menyangkut kekerasan, maka banyak ragam yang muncul dari setiap kasus sengketa tanah. Data berikut memberikan gambaran yang lebih rinci.

**Perbandingan Jenis Kekerasan dan Korban dalam Kasus Sengketa Tanah di Jawa Timur pasca rezim Soeharto**

Jenis Kekerasan	Jumlah Sengketa Tanah dan Kekerasan	Jumlah Korban	Keterangan
Teror Langsung	9	256	$r = 1/28,4$
Intimidasi Langsung	22	273	$r = 1/12$
Penculikan	1	6	$r = 1/6$
Penangkapan	15	216	$r = 1/14,4$
Penembakan	5	13	$r = 1/2,6$
Penganiayaan	7	7	$r = 1/1$
Pembunuhan	4	8	$r = 1/2$
Pemeriksaan	-	-	-
Babat/ Merusak Tanaman	2	11000	$r = 1/5.500$
Bakar, Rusak Rumah/Pondok	4	68	$r = 1/17$
Orang Hilang	-	7	
Jumlah	69	11.854	

*Diolah dari 'Database Sengketa Agraria, KPA, 2000*

Kekerasan yang tersaji dalam data tersebut, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang diderita oleh individual dan kelompok. Kekerasan yang diderita oleh individual terdiri dari penculikan, penangkapan, penembakan, orang hilang, penganiayaan, dan pembunuhan. Sementara yang diderita kelompok terdiri dari teror langsung, intimidasi langsung, pembakaran rumah, pembabatan tanaman. Selanjutnya ada dua catatan penting menyangkut kekerasan dan sengketa tanah. *Pertama*, jenis kekerasan dalam kasus sengketa tanah di Jawa Timur akan diikuti oleh kekerasan berupa; intimidasi langsung. Hal ini sangat logis dilakukan untuk meredam gejolak perlawanan dari masyarakat. *Kedua*, kekerasan juga dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perlawanan, misalnya pembabatan tanaman, dan ini merusak areal yang sangat luas dan melibatkan massa yang banyak.

Secara nasional jumlah kasus agraria di Jawa Timur menempati urutan keempat setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Tabel berikut memberikan gambaran yang jelas.

**Kasus Tanah di Jawa Timur di antara Daerah-daerah lain di Indonesia**

No.	Jenis Sengketa Tanah	Jumlah Kasus	Rank Nasional	Kasus di Indonesia
1	Kawasan Industri/Pabrik	8	4	112
2	Tourisme/Hotel/Resort	10	2	81
3	Perumahan/Kota Baru	13	3	252
4	Sarana Militer	3	4	42
5	Kehutanan Produksi	4	5	71
6	Perkebunan	34	4	337
7	Pertambangan	-	-	45
8	Pertambakan	7	2	37

9	Peternakan	-	-	1
10	Konservasi Hutan	3	2	15
11	Perairan	-	-	7
12	Bendungan/Pengairan	7	4	84
13	Sarana Umum/Fasilitas	30	3	278
14	Sarana Pemerintahan	6	3	59
15	Obyek Land Reform	-	-	1
16	Lain-lain	36	3	321
	Jumlah	161		

*Diolah dari 'Database Sengketa Agraria, KPA, 2000'*

Bila melihat ranking Jawa Timur di antara kasus-kasus serupa di Indonesia, maka Jawa Timur menyimpan potensi kasus yang sangat besar. Sejumlah jenis sengketa tanah menempati urutan atas, dari urutan kedua, ketiga, dan keempat. Artinya bila dari jumlah menempati ranking empat, namun bila dilihat dari jenis sengketa maka Jawa Timur dapat disebut sebagai wilayah yang penuh sengketa tanah.

Dari berbagai ragam kasus agraria tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa peran negara, militer, dan swasta dalam kasus sengketa tanah sangat dominan. Persoalan konsep “tanah negara” menjadi kunci penting dalam berbagai kasus yang muncul. Keterlibatan negara (juga militer) dalam sengketa tanah, telah menyeret pihak swasta sebagai pemilik modal (kapital). Persekongkolan ini semakin membingungkan konsep “tanah negara” dan peruntukan tanah demi “kepentingan negara” atau “kepentingan umum”. Negara secara langsung turut menjadi agen kapitalisme yang memanfaatkan hak rakyat demi kepentingan para pemilik modal.

Sementara itu, gejala sosial yang ditunjukkan oleh aksi-aksi klaim ulang yang dilakukan oleh para petani di banyak tempat dapat dilihat sebagai bagian dari bentuk pergulatan panjang dalam sejarah sengketa agraria dan sumber daya alam lainnya tersebut di atas. Karenanya, ia tidak dapat dilepaskan dari konteks perlawanan atau protes petani yang telah berlangsung begitu lama. Klaim ulang menjadi realitas yang begitu kompleks yang perwujudannya tidaklah sebagai sesuatu yang berdiri sendiri tanpa adanya latar belakang struktural, hingga ia menjadi hal yang niscaya bagi para petani yang merasa hak ekonominya telah terampas. Masalah agraria, khususnya tanah, merupakan salah satu persoalan yang sangat prinsip bagi terbangunnya gerakan protes petani sejak jaman penjajahan hingga sekarang.

Bagi para petani, aksi klaim ulang demikian jelas memberikan energi baru untuk tidak gampang menyerah pada nasib mereka selama ini. Momentum demi momentum digunakan sembari mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka yang terabaikan. Hal ini lebih nampak sebagai perebutan kendali atas sumber-sumber penghidupan mereka dan sekaranglah tiba giliran bagi mereka merebut manfaat dari lahan yang sekian lama diserap untuk kepentingan lain.

Proses berlangsungnya aksi klaim ulang ini berjalan begitu cepat, biasanya tanpa mampu diantisipasi oleh pemilik atau penguasa lahan sebelumnya, dengan melibatkan massa petani dalam jumlah banyak. Beramai-

ramai mereka menduduki lahan untuk kemudian mereka tancapkan patok-patok kepemilikan oleh mereka. Patok-patok ini menjadi tanda bagi siapapun bahwa kekuasaan atas lahan kini telah berpindah, dengan demikian tidak ada satu kepentingan atau kekuasaan apapun yang dapat dibenarkan oleh mereka untuk menguasai lahan tersebut selain mereka sendiri.

Kekuatan legal formal atas penguasaan lahan menjadi tidak penting pada fase ini. Walaupun kemudian proses pencarian bukti-bukti legal yang menjelaskan kepemilikan lahan sebelum lepas dari tangan mereka juga menjadi bagian dari aksi ini pada fase selanjutnya. Hanya saja, bagi para petani, ketidakadilan yang mereka rasakan adalah alasan yang paling absah mengapa aksi ini harus dilakukan. Hitungan resiko yang harus mereka hadapi tidak mampu lagi menyurutkan langkah mereka.

Dilaporkan, misalnya, aksi klaim ulang oleh para petani di Malang selatan terhadap lahan perkebunan berstatus hak guna usaha (HGU) yang dikuasai perusahaan perkebunan swasta maupun BUMN telah menghabiskan ribuan hektar lahan di kawasan itu. Aksi itu mengakibatkan terjadinya alih pemanfaatan lahan besar-besaran. Tanaman kopi, karet, dan cokelat dibabat, diganti tanaman jagung untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Pos Malang, yang sejak semula mendukung aksi-aksi klaim sepihak itu, dalam laporan tahunan pelanggaran HAM yang

disampaikan pada peringatan 52 tahun HAM mengungkapkan, tak kurang dari 5.200 hektar lahan perkebunan, kini telah beralih penguasaan ke petani. Tidak diketahui, berapa luas lahan perkebunan swasta dan BUMN yang semula tercatat. Aksi-aksi sudah berlangsung sejak tahun 1995, dan proses yang perlahan namun pasti terus berlangsung hingga kini, hingga ke wilayah Kabupaten Blitar ( **Laporan Kompas, 8 Januari 2001**).

Muara dari aksi-aksi ini tentu saja adalah redistribusi tanah. Artinya, tuntutan esensial bagi mereka adalah kemauan politik negara untuk kembali menyerahkan kepemilikan lahan tersebut kepada mereka. Namun hal ini adalah kebutuhan formal, dan inipun disadari akan memerlukan waktu yang cukup lama. Karenanya hal yang paling sederhana adalah mencangkuli dan menanami lahan setelah lahan tersebut telah terbagi-bagi secara keseluruhan di antara mereka.

## **5.2. Basis Sengketa Tanah di desa Sumberanyar**

Di desa Sumberanyar, aksi klaim ulang ini telah berlangsung sejak 1999, dengan mengambil alih lahan perkebunan yang pada saat itu sedang digarap oleh PT Rajawali. Menurut laporan TNI AL sendiri, dari keseluruhan lahan yang digarap oleh perkebunan, 1000 ha tebu dibabat, 5 ha anggur dirusak, 50 ha pohon mangga ditebang dan 100 ha lainnya dijarah serta 5 ha jeruk dan 7 ha

tanaman semusim dibabat habis. Hingga kini, tak kurang dari 500 hektar lahan telah dibagi-bagi kepada kurang lebih 1000 petani.

Apa yang sedang dilawan oleh petani desa Sumberanyar sebenarnya mengarah pada dua sisi kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan militer yang ditunjukkan oleh kehadiran TNI AL di wilayah tersebut, selainnya adalah kepentingan pemilik modal (investor) yang mencoba memanfaatkan lahan kosong yang telah dikuasai TNI AL tersebut sebagai lahan perkebunan. Namun yang disebut terakhir adalah sekadar penyewa yang sangat bergantung hak-hak penguasaannya kepada TNI AL. Kedua kepentingan ini seolah bergandeng tangan meminggirkan kepentingan petani yang secara tradisional adalah penguasa lahan tersebut.

Masuknya TNI AL sendiri di desa Sumberanyar diawali dengan propaganda nasional tentang penyelamatan Irian Barat dari kekuasaan Belanda (hal ini merupakan cerita yang diyakini sebagian masyarakat sebagai kebenaran, pen). Pasukan organik yang ditempatkan dan menyisir wilayah Sumberanyar sebagai salah satu pangkalan militer bagi operasi pembebasan itu adalah Korps Komando (KKO) TNI AL. Dari sinilah kisah ini bermula; yakni pada tahun 1961 ketika KKO berhasil mengambil alih lahan sebelah utara jalan negara (jalan Deandels) milik petani desa Sumberanyar tanpa pergolakan yang berarti (**wawancara dengan Gus Tofa**).

Proses pelepasan lahan petani kepada KKO diawali dengan pengumpulan petani di Balai Desa pada Januari 1961. Dengan dibantu Kepala Desa Sumberanyar waktu itu, Kamar, pihak KKO mencoba melakukan negoisasi dengan menjanjikan ganti rugi kepada petani sembari menjelaskan bahwa lahan hendak digunakan sebagai lapangan terbang, gudang peluru dan rumah dinas KKO. Ganti rugi yang ditetapkan adalah Rp 25.000,- per hektar untuk tanah tepi jalan raya dan Rp. 15.000,- per hektar untuk tanah paras **(Wawancara dengan Bp. Sunar).**

Tidak seluruh petani menerima tawaran ini, bahkan sebagian besar dari mereka menolak melepaskan lahan. Sampai di sini pihak KKO tidak kehilangan akal. Masih menurut Sunar, aksi-aksi kekerasan dan intimidasi gencar dilakukan sebagai upaya paksa bagi sebagian besar petani yang enggan berkompromi. Hal ini sedikit menjelaskan akan adanya ketidakrelaan dan keterpaksaan bagi sebagian besar petani terhadap pengambilalihan lahan mereka. Kalaupun kemudian seluruh tanah desa Sumberanyar di utara jalan negara (jalan Deandels) berhasil dikuasai KKO TNI AL, maka bukan berarti penguasaan ini tidak menyisakan beragam persoalan di kemudian hari.

TNI AL hingga tahun 1992 tercatat menguasai lahan seluas 2.754,02 hektar yang meliputi 6 (enam) desa di 2 (dua) kecamatan. Untuk desa Sumberanyar sendiri, mereka menguasai lahan seluas 543,5 hektar yang

meliputi 5 (lima) dusun. Hal ini dibuktikan oleh Surat Badan Pertanahan nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur no. 278/HP/35/1992 tanggal 8-7-1992 tentang Hak Pakai oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional c.q. TNI AL di wilayah tersebut.

Hanya antara 1962 hingga 1974, maksud awal dari KKO di atas tidak pernah terujud. Sepanjang tahun tersebut petani masih berkesempatan menggarap lahannya masing-masing dengan cara bagi hasil dan pola tanam yang sudah ditentukan oleh KKO. Petani hanya diijinkan menanam wijen, pohon jarak dan jagung. Seperlima dari hasil panen ini menjadi hak mereka dan selebihnya harus disetorkan ke pihak KKO.

Pada tahun 1974 Proyek Pemukiman Purnawirawan Angkatan Laut (PROKIMAL) mengambil alih pengelolaan lahan dengan membangun sejumlah rumah bagi purnawirawan AL di pinggir jalan negara. Pada saat yang sama, petani yang berdiam di lokasi ini harus tergusur tanpa ganti rugi. Penggusuran petani tidak berhenti sampai di sini, dengan cara yang lebih halus Soenari (caretaker kepala desa, purnawirwan AL) berusaha menghimpun warga agar mau bertransmigrasi ke Kalimantan. Namun tidak banyak yang menghiraukan ajakan ini.

Puncaknya, pada tahun 1978 TNI AL menyewakan sebagian lahannya kepada sebuah perusahaan kapas dari Situbondo. Akibatnya, akses petani

terhadap sebagian lahan garapannya mulai tertutup, bahkan beberapa rumah petani harus tergusur, inipun tanpa adanya ganti rugi. Kalau mereka enggan maka ancamannya rumah-rumah mereka akan *didoser* (dibolduser/diratakan dengan tanah). Dari sinilah bermula kepentingan pemodal mulai masuk dan menjadikannya sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan terhadap lahan desa Sumberanyar.

Akses petani terhadap lahan garapannya benar-benar harus tertutup ketika pihak TNI AL menyerahkan hak sewa penggarapan lahan kepada PT Kebun Grati Agung (KGA) yang menguasai sebagian besar lahan, kecuali rumah dan pekarangannya yang dibangun oleh PROKIMAL. PT KGA memanfaatkan lahan ini untuk tanaman tebu dan buah-buahan, terutama mangga. Sebagai sebuah perkebunan besar yang menguasai tak kurang dari 2.500 hektar lahan tak pelak lagi membutuhkan sarana dan infrastruktur yang memadai. Sarana jalan dibangun membelah pemukiman petani, pemasangan pipa-pipa irigasi yang mengitari lahan perkebunan dan penggusuran besar-besaran berlangsung tanpa memedulikan hak-hak tradisional petani setempat.

Beberapa dari petani direkrut menjadi pegawai di perkebunan ini, terutama dipilih yang gagah dan kuat untuk dijadikan *waker* perkebunan. Selebihnya harus kehilangan lahan yang dengan sendirinya juga kehilangan pekerjaan. Nestapa petani Sumberanyar sebelah utara jalan negara (*wong lor*)

memasuki babakan baru. Alih penguasaan lahan ini menjadikan mereka tidak hanya tuna kisma tapi juga kehilangan sumber penghidupan satu-satunya. Sebagian dari mereka kemudian menyebar mencari pekerjaan di kota sebagai kuli-kuli bangunan. Kendati begitu, beberapa perkampungan petani masih bertahan meski hanya sekadar sebagai tempat bernaung tanpa kepemilikan atas tanah yang ditempatinya, alih-alih lahan yang bisa digarap.

Masuknya perkebunan besar ini secara langsung mendorong kehidupan sosial di desa Sumberanyar, utamanya di sebelah utara jalan negara, berjalan secara involutif dan stagnan. Dengan ketiadaan basis ekonomi, petani Sumberanyar seakan menjadi “gelandangan” di desanya sendiri, sesuatu yang tidak terjadi pada petani desa Sumberanyar di selatan jalan negara (*wong kidul*) yang memang sejak awal tidak berurusan dengan persoalan ini. Sarana-sarana fisik seperti listrik, pasar, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana layaknya terdapat dalam sebuah pemukiman menjadi hal yang tak terjangkau bagi petani di sana. Listrik baru menerangi perkampungan mereka sejak 1999, itupun karena usaha keras kepala desa Abdul Khamid yang sedikit menentang upaya-upaya penghalangan dari pihak TNI AL. Boleh dikata program pembangunan sama sekali tidak sampai menyentuh mereka.

Represi dan tekanan dari pihak perkebunan dengan dukungan TNI AL semakin menambah penderitaan mereka. Bangunan-bangunan milik petani

yang tersebar di beberapa dukuh meski telah berdiri sebelum TNI AL masuk seakan dianggap bangunan liar yang harus terus diawasi oleh sang penguasa tanah. Setiap pemugaran ataupun perbaikan rumah haruslah mendapat izin dari pihak TNI AL, kalau penghuninya tidak mau berurusan dengan aparat kekerasan ini.

Kehadiran negara melalui aparat desanya bukan lagi sebagai tempat berlindung masyarakat namun tidak lebih dari penjaga kepentingan TNI AL dan pihak perkebunan sebagai salah satu *client* yang patuh. Subordinasi TNI AL terhadap aparat pemerintah desa tampak begitu nyata sejak jabatan kepala desa dipegang oleh seorang purnawirawan TNI AL pada tahun 1974. Anehnya, walau seluruh lahan telah diklaim di bawah penguasaan TNI AL, petani yang berdiam di perkampungan-perkampungan di tengah lahan tersebut tetap dikenai PBB tiap tahun oleh aparat desa. Alasan yang dikemukakan, tanpa PBB mereka tidak bisa mengurus KTP serta surat-surat desa lainnya.

Akibat lain dari masuknya perkebunan ini adalah menonjolnya disparitas tajam antara *wong lor* dan *wong kidul*. *Wong kidul* atau petani yang bermukim di sebelah selatan jalan kehidupannya jauh lebih sejahtera serta lebih berkesempatan menikmati hasil-hasil pembangunan daripada *wong lor*. Diferensiasi sosial yang ada kendati tidak memunculkan permusuhan yang terbuka antara dua petani ini tetapi tetap saja menyembunyikan ketidaksukaan

dan saling curiga. *Wong kidul* yang jumlahnya relatif sedikit selalu merasa kedudukannya lebih tinggi dan lebih berpendidikan, karenanya mereka merasa lebih merasa terpandang dan berhak mendapatkan kedudukan di organisasi setempat, di organisasi NU misalnya. Sementara itu, *wong lor*, merupakan sebagian besar petani Sumberanyar, merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan selalu merasa direndahkan, karenanya mudah tersinggung dan meletupkan kemarahan.

Pada tahun 1997, PT KGA sebagai penyewa lahan tersebut digantikan oleh PT Rajawali yang menguasai lahan dan menjadikannya perkebunan tebu dan mangga sebagaimana yang dikuasai dan lakukan oleh PT KGA. Tidak ada perubahan sikap dan perilaku TNI AL dan pihak perkebunan menyusul pengalihan sewa lahan ini. Justru intimidasi dan teror yang dirasakan petani malah semakin intens dan memberikan efek ketakutan yang luar biasa, untuk sekadar protes misalnya.

### **5.3. Perlawanan "tercecer" Petani**

Dalam situasi apapun, petani bukanlah benda mati yang gampang diatur dan dibentuk semaunya. Mereka bukanlah masyarakat statik yang tidak memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebagai manusia, ruang psikologis mereka sesungguhnya mampu merasakan sesuatu yang tidak benar

dan mengganggu kehidupan mereka. Ketiadaan respon aktual terhadap setiap tekanan yang mereka rasakan bukanlah menunjukkan bahwa mereka tidak menyimpan pertanyaan-pertanyaan serta kegelisahan-kegelisahan yang membutuhkan jawaban. Walaupun pertanyaan maupun kegelisahan demikian tidak secara ekspresif tampak, namun perilaku keseharian yang ditunjukkan akan sedikit menjelaskan betapa mereka berada di ruang yang salah dalam sejarah. Karenanya, kemunculan aksi-aksi yang berbau kriminal ataupun perbanditan dapat diletakkan dalam kerangka penjelasan di atas.

Di desa Sumberanyar, kehadiran perkebunan yang menampilkan kesenjangan sosial yang begitu mencolok ditambah represifitas dan kekerasan yang dipertontonkan oleh TNI AL bukanlah sebuah realitas yang begitu mudah menundukkan petani di sana tanpa hadirnya pula bentuk-bentuk perlawanan terselubung. Tekanan struktural yang mendera mereka memang begitu sulit memungkinkan munculnya protes secara terbuka. Hanya saja, mereka mempunyai cara lain untuk menerangkan kehadiran mereka di hadapan TNI AL dan pihak perkebunan, melakukan pencurian misalnya. Inilah yang disebut Scott sebagai senjatanya orang-orang lemah. Perlawanan terselubung petani Sumberanyar menampakkan dirinya dalam bentuk pencurian hasil perkebunan, secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, pembakaran tebu, ataupun penebaran hama tanaman.

Gambaran nyata perlawanan terselubung ini dapat diambil dari cerita Mahmud, pemuda 22 tahun tamatan sebuah STM di Kota Pasuruan. Meski bapaknya seorang mandor di PT KGA, sejumlah pertanyaan-pertanyaan besar terbersit di kepala Mahmud menyangkut kemiskinan masyarakat sekitarnya. Pertanyaan mendasar yang selalu menghantuinya adalah mengapa di tengah sebuah perkebunan besar, masyarakatnya begitu miskin dan harus berjuang keras untuk bertahan hidup.

“Saya merasakan ada yang tidak beres di masyarakat saya. ... Saya sering melihat kekejaman Angkatan Laut terhadap tetangga-tetangga saya. Ada yang rumahnya dirobohkan, katanya karena membangun rumah tanpa izin. Kawan saya harus pindah rumah sampai tiga kali, karena tanahnya mau dipakai KGA. Saya coba tanya ke Bapak, Bapak hanya diam. Lama-lama saya mangkel juga ke KGA dan Angkatan Laut. Saya sering merusak benih-benih tebu yang mau ditanam. Kadang saya masuk ke kebun mangga memetik sebanyak-banyaknya mangga, sebagian kecil saya makan dan bawa pulang yang lainnya saya injak-injak.”

Ulah Mahmud ini boleh jadi semacam kenakalan remaja biasa. Tapi dari cerita yang ia ungkap di atas, jalinan pengalaman dari apa yang ia saksikan lebih memberikan pengaruh terhadap tindakannya itu daripada sekadar kenakalan tak beralasan. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, pengalaman Mahmud ini bukanlah sebuah pengalaman tunggal, artinya ia telah menjadi pengalaman kolektif, hanya intensitas, bentuk dan keberanian yang ditunjukkan yang berbeda-beda.

## Pencurian

Modus pencurian adalah bentuk umum yang paling sering muncul. Tujuan dari tindakan ini tampaknya betul-betul untuk cari makan. Secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok, pada malam hari atau siang ketika ada pergantian penjaga, mereka menyusup ke kebun mangga memetik sebanyak yang bisa mereka bawa kemudian lari membelah luasnya lahan tanaman tebu. Hasil pencurian ini selain dimakan sendiri selebihnya dijual atau ditukarkan dengan jagung maupun beras.

Tidak jarang mereka harus tertangkap oleh *waker* perkebunan. Kalau demikian yang terjadi bukan hasil pencurian yang dibawa pulang tapi luka memar di sekujur tubuh. Hanya orang-orang yang berani saja, mampu melakukan perlawanan ini. Seorang Kholil yang mengalami pengusuran rumah beberapa kali, sangat jengkel dengan AL. Dia sering mencuri tebu di perkebunan. Dia menuturkan:

*engkok mon tero ngalak tebu... ye ngalak! Engkok tak takok, je' mon engkok ngecok lainna bengal kiya ngecok... engkok neka peloporra... mon dhisak ngibeh bedhil sengkok ngibeh arek".* (Saya ini kalau ingin ambil tebu, ya..tinggal ambil. Saya tidak takut, kalau saya mencuri yang lain berani mencuri...saya ini pelopornya... sana (AL-pen) pakai senapan saya pakai arit/parang).

## Perusakan Tebu

Bila musim tanam perkebunan akan tiba, masyarakat sebagian juga melakukan perusakan benih. Hanya satu tujuannya, tanaman rusak dan tidak menghasilkan. Mereka melihat dan menyaksikan perkebunan demikian besar di

depan hidung setiap hari, namun satu batangpun susah di dapat. Masyarakat merasa berhak atas tanah dan hasil dari tanah tersebut, meskipun susah mendapatkan kembali lahan mereka, paling tidak mereka bisa merasakan hasilnya. Itupun sangat sulit dilakukan.

Penduduk sekitar perkebunan sudah hafal betul kapan musim panen dan musim tanam. Dengan memperhatikan siklus tersebut, maka sebagian masyarakat melakukan perusakan terhadap perkebunan sesuai dengan siklus. Bila panen, maka dirusak tanaman yang akan dipanen. Perusakan benih dilakukan dengan cara menginjak benih tebu, atau mencabutnya. Purwo Eko bertutur:

“Dulu, pernah saya menginjak-injak tanaman tebu yang masih kecil..saya jengkel sekali kalau sekolah melihat tanaman tersebut... pokoknya jengkel waktu itu..”

Perusakan benih juga dilakukan oleh beberapa warga, yang sampai sekarangpun, jika ditanyakan siapa yang melakukan tidak pernah ada yang tahu. Tidak seperti Pur yang masih kecil (SD), bagi mereka yang sudah dewasa itu dilakukan dengan cara mencabuti langsung di tempat tanam tebu. Satu dua batang, dan itu dilakukan beberapa kali, berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan dari keamanan perkebunan.

### **Penebaran Hama**

Modus satu ini membutuhkan keahlian atau pengetahuan tentang hama. Masyarakat Sumberanyar bukanlah petani yang berpengalaman, atau bahkan

bukan petani. Proses pemilihan hama, dan memilih waktu penebaran sangat menentukan keberhasilan. Mereka tidak berpikir akan berdampak buruk kepada warga desa, sebab semua tanaman yang ada milik perkebunan. Jadi seandainya menyebabkan tanaman mati, maka yang mati adalah tanaman milik perkebunan.

Tingkat keberhasilan modus penebaran hama tidak seefektif pencurian atau perusakan benih, tetapi yang dimaksudkan adalah perusakan tersebut tidak diketahui, seolah-olah peristiwa alamiah. Warga tidak secara langsung berhadapan dengan pemilik perkebunan atau TNI AL. Masyarakat dalam kesadarannya berupaya untuk mengacaukan perkebunan, merusak tanaman yang ada; dan kalau perlu ditutupnya perkebunan. Ini adalah hasrat yang terpendam dalam benak masyarakat, yang sudah lama menderita.

#### **5.4. Reformasi Sebagai “Kunci Pembuka”**

Perlakuan negara semasa rezim Orde Baru terhadap kaum tani, seperti yang diungkap pada paragraf-paragraf sebelumnya, cukup sudah dirasakan oleh petani Sumberanyar. Berbagai tekanan, paksaan, kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya cukup pula mengakumulasi kebencian dan kemarahan terhadap negara, dalam konteks petani Sumberanyar berarti kemarahan terhadap TNI AL. Kejatuhan rezim ini di pertengahan 1998 memberikan

pengertian kepada mereka bahwa perlakuan negara pun, dalam hal ini TNI AL, juga sudah waktunya berakhir.

Dua komentar singkat berikut ini: tentang kejatuhan rezim Soeharto bagi petani Sumberanyar waktu itu dapat dianggap sebagai titik sambung antara kenyataan struktural yang mereka alami sebelum rezim ini jatuh dan kehendak mereka untuk memiliki kembali tanah yang dikuasai TNI AL.

Lasminto, seorang buruh bangunan yang tidak tamat SD, bapak dari seorang anak, dari dulu mengalami kesulitan menghidupi keluarganya. Ia tiap hari harus mengayuh sepedanya ke kota Pasuruan menjadi kuli bangunan dan baru menjelang maghrib sampai kembali di rumahnya. Pendapatan seorang kuli dihitung dari hari kerjanya per minggu. Sehari untuk pekerjaan yang ia lakukan mulai jam 8 pagi hingga 4 sore ia mendapatkan Rp. 12.500,-.

“Waktu itu kita selalu takut menghadapi Angkatan Laut. Mereka kejam, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya dengar di Jakarta rusuh, Soeharto lengser. Bagi kami ini adalah perubahan, makanya kami berani nuntut!”

Ungkapan lain datang dari Muchtar, seorang pengangguran yang tampak sangat miskin. Keadaan ini tercermin dari kondisi rumahnya yang seperti dibangun seadanya. Beberapa tahun menurut pengakuannya sendiri ia mengalami stress atau linglung, sebab kehidupan ekonominya yang serba kekurangan. Kehidupannya ditanggung oleh ibunya yang berjualan krupuk;

*“Seongguneh engkok riyah tako'an, napa pole mon ngetala'en tengkanah Angkatan Laut nga' ruwah. Keng ca'en ca-kancah zamanna wis berobah, ye koduh bengal.*

*Akhirrah bereng mbik petaneh dina' engkok norok bengal"* (Saya ini sebenarnya penakut, apalagi melihat tingkahnya Angkatan Laut seperti itu. Tapi kata teman-teman zaman sudah berubah, kita harus berani. Maka bersama petani di sini saya jadi ikut berani).

Ketakutan yang selama ini mendera mereka jelas datang akibat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak TNI AL maupun pihak perkebunan yang sama sekali tidak memberi ruang bagi mereka untuk melawan. Artinya, tekanan struktural yang mereka rasakan sedikit banyak menjadi determinan penting bagi baragamnya perasaan kesal dan marah yang terpendam. Munculnya momentum perubahan yang memberikan ruang bagi mereka mencurahkan kekesalan dan kemarahan itu secara ekspressif tak pelak lagi memunculkan keberanian. Apalagi keberanian yang muncul ini lebih berupa keberanian kolektif, oleh karena itu mereka tidak perlu memanggul resiko dari tindakan mereka secara sendiri-sendiri namun ditanggung secara bersama.

Hanya saja, persepsi tentang perubahan dan munculnya keberanian ini bukanlah sesuatu yang muncul secara *inherent* dari diri mereka, sebaliknya ia adalah sesuatu yang *given*. Artinya, terdapat faktor di luar diri mereka yang ikut mempengaruhi dalam memberi pengertian tentang perubahan yang sedang terjadi dan juga perlunya keberanian mereka dimunculkan. Faktor pemicunya (*triggering factor*) yang dengan mudah dapat dikenali adalah munculnya demonstrasi besar-besaran petani Sumberanyar ke Prokimal menuntut dikembalikannya lahan mereka.

Sebagaimana dituturkan oleh Machmud, demonstrasi besar-besaran ke kantor Prokimal di wilayah Grati terjadi pada tanggal 19 Agustus 1998 dan melibatkan hampir seluruh petani Sumberanyar, utamanya adalah *wong lor*. Demonstrasi ini sesungguhnya tidak diawali oleh petani Sumberanyar, tapi diprakarsai oleh petani Alastlogo kecamatan Lekok yang memang berbatasan dengan desa Sumberanyar. Rapat-rapat persiapan menjelang berlangsungnya demonstrasi itu lebih banyak diatur dan diorganisir di desa tersebut.

Di desa ini muncul nama Sumardi, seorang tukang becak, yang belakangan diketahui bahwa ia adalah seorang *pokrol* yang membantu Budi, seorang pengacara dari Probolinggo. Sosok Sumardi inilah yang dipercaya aktif mengajak petani di sekitarnya untuk merebut tanahnya kembali. Dari ajakan Sumardi ini, petani Sumberanyar mulai merasakan suasana perubahan bahwa mereka kini seakan boleh menuntut, sesuatu yang coba selalu mereka hindari terlintas dalam pikiran sebelumnya.

Ajakan Sumardi ini relatif sukses, 1000 orang lebih pada hari itu berbondong-bondong menuju kantor Prokimal meneriakkan tuntutan. Yang terlibat dalam demonstrasi ini tentu saja tidak hanya petani Sumberanyar, tapi juga sekitar desa mereka yang merasa mempunyai persoalan dengan pihak Prokimal. Budi terlibat aktif menegosiasikan persoalan ini dengan pihak Prokimal. Yang diketahui oleh massa hanyalah pada saat itu mereka sedang

menuntut dan isi tuntutan itu adalah hal yang paling mereka inginkan. Karenanya suasana saat itu menjadi sangat emosional bagi petani Sumberanyar, meski mereka hanya ikut-ikutan.

Efek dari aksi massa ini begitu kuatnya bagi petani Sumberanyar. Wacana tentang status tanah mereka tiba-tiba menjadi sesuatu yang penting dan selalu hangat untuk diobrolkan. Dan yang tidak bisa dihindari adalah munculnya pro dan kontra terhadap aksi massa tersebut. Suara-suara yang mendukung, setidaknya terhadap isiuntutannya, semakin mengeras serta menghendaki adanya lagi aksi-aksi serupa hingga tuntutan mereka terlaksana. Sementara suara yang menolak mencoba menghindar dari persoalan ini untuk tidak ikut-ikutan.

Akibatnya adalah terbelahnya petani Sumberanyar mengikuti pembelahan akibat masuknya perkebunan. Kalau dipetakan, dukungan lebih banyak datang dari *wong lor* sedangkan penolakan lebih banyak datang dari *wong kidul*. Sedikit banyak hal ini menunjukkan bahwa logika yang dipakai oleh dua kelompok ini memiliki basis yang saling bertolak belakang. Bagi *wong lor*, basis material berupa tanah mereka yang telah dikuasai TNI AL dan penderitaan panjang mereka tentu saja adalah alasan yang paling masuk akal mengapa mereka mendukung tuntutan ini. Sedangkan *wong kidul* melihat persoalan ini secara normatif dan legalistik dan tentu saja ada jarak antara

mereka dengan penderitaan yang dirasakan oleh *wong lor*, meski pada awalnya mereka atau orang tua mereka adalah *wong lor* juga.

Di atas semua itu, suasana perubahan telah mampu melingkupi atmosfer kehidupan petani Sumberanyar. Dari beberapa cerita yang dihimpun, mereka merasakan ada hal yang bisa dilakukan lebih daripada apa yang mereka lakukan sebelum ini dalam suasana ketakutan. Perubahan menjadi lebih bermakna daripada sekadar sebagai bahan pergunjungan setelah tergelarnya aksi massa tersebut. Buraji yang awalnya tidak pernah memikirkan untuk melawan tentara, tiba-tiba mempunyai keberanian.

“Saya pernah terlibat debat dengan salah seorang pemukim (purnawirawan AL yang mendapat jatah rumah dan pekarangan dari PROKIMAL, pen) tentang status tanah ini. Saya katakan tanah ini adalah milik rakyat, Angkatan laut merampasnya secara paksa. Rumah yang kamu tempati dulunya juga milik rakyat”

Secara langsung aksi massa tersebut adalah titik balik bagi mereka untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Dan zaman perubahan ini adalah momentum tepat untuk menunjukkan keberanian kepada pihak TNI AL bahwa mereka menginginkan lahannya dikembalikan. Ini artinya kehadiran mereka secara politis layak diperhitungkan oleh pihak TNI AL. Purwo Eko, Ketua FKTS, menuturkan bahwa kini petani Sumberanyar tidak lagi harus merasa serba salah di hadapan Angkatan Laut. “Posisi kami sekarang adalah setara, mereka tidak bisa semena-mena terhadap kami lagi”, katanya. Dia sering

bercerita tentang pengalamannya beradu argumentasi dengan investor dari Yogyakarta (Herly).

“Saya ini mewakili warga di sini. Bapak jangan teruskan pembangunan (pembangunan buat ternak-pen) ini. Saya kemarin sudah membuat kesepakatan dengan komandan AL di sini. Sebelum kasus tanah ini jelas, Bapak jangan melakukan pembangunan di tanah ini.”

### **5.5. FKTS sebagai Wadah Perjuangan**

Sebagaimana disebutkan di muka, moment perubahan yang ditunjukkan oleh aksi massa pada 19 Agustus 1998 telah memberikan keberanian bagi petani Sumberanyar untuk melawan TNI AL dan menuntut kembalinya tanah mereka. Dalam aksi massa itu, mereka menyaksikan terjadi negoisasi dan perundingan antara pihak TNI AL dan perwakilan massa yang didampingi oleh Budi, sang pengacara itu. Tak satupun dari perwakilan massa itu yang merupakan petani Sumberanyar.

Menjadi jelas di sini mereka hanyalah pengikut yang sama sekali buta terhadap proses yang sedang berlangsung. Bagi Machmud yang telah cukup lama gelisah akan status tanahnya, ketidaktahuan ini sama sekali tidak menguntungkan. Ia merasa harus melakukan sesuatu bersama masyarakatnya agar tidak hanya menjadi pengekor.

Keterlibatan Budi dalam kasus ini sedikitnya telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apalagi beberapa hari setelah aksi massa, Sumardi mengkampanyekan bahwa kasus ini akan diperjuangkan lewat pengadilan.

Untuk itu petani diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk mengurus perkara ini. Meski sebagian dari mereka ikut menyerahkan uang kepada Sumardi, setiap orang dilaporkan menyeter antara Rp. 5000,- hingga Rp. 25.000,-. Tapi sebagian yang lain masih bertanya-tanya; mengapa tiba-tiba ada “tarikan” sementara mereka tidak tahu sampai sejauh mana kasus ini diperjuangkan.

Kedudukan sebagai pengekor tampak tidak lagi menyenangkan. Di sisi lain, prakarsa perlawanan yang datang dari luar desa dirasakan sebagai sesuatu yang tidak lagi mampu menampung keinginan dan harapan petani Sumberanyar sendiri. Pikiran sederhana yang kemudian muncul adalah mengapa mereka tidak melakukannya sendiri tanpa harus tergantung pada orang dari desa lain. Hal ini secara simplistik lebih terlihat sebagai semangat dan sentimen lokal yang begitu mudah muncul mewarnai konfigurasi perlawanan petani yang hendak mereka gelorakan. Namun justru semangat lokal ini pula yang mampu menjalin kekompakan di antara petani Sumberanyar sendiri.

Kemudian mereka mencoba melakukan sendiri dan memilih bentuk-bentuk perjuangan yang sama sekali tidak tergantung pada apa yang sudah dilakukan petani desa Alastlogo. Titik paling sentral dari perjuangan petani Sumberanyar adalah terbentuknya FKTS (Forum Komunikasi Tani Sumberanyar).

Munculnya forum ini, seperti dituturkan oleh Purwo Eko, memberikan mereka semangat untuk berjuang tanpa tergantung pada orang luar. Dengan bahasa yang berbeda, Muhdlori, seorang guru ngaji, menjelaskan “*Kebentuke FKTS, masyarakat Sumberanyar gak perlu adoh-adoh nggolek bantuan, cukup nang FKTS*” (Dengan terbentuknya FKTS membuat masyarakat Sumberanyar tidak perlu jauh-jauh mencari bantuan, cukup kepada FKTS).

Bagi kalangan masyarakat awam, FKTS yang sering salah ucap menjadi *ka-te-es*, dipahami sebagai wadah bersatunya warga desa, *sekolah pengalaman*, dan perjuangan kelompok. Seperti dituturkan Pak Latif:

*“ka-te-es neka seh ngorosen tanah... poko'en mon eserahagi de' neka... ye berhasil! Neng disa' engkok oleh pengalaman, sekolah pengalaman (sambil ketawa, pen), je' engkok ta' toman sekolah. Mon reng bereng berjuang nekah, banyak manfaattah”* (*ka-te-es* [FKTS, pen] itu yang ngurusi tanah... pokoknya diserahkan padanya [FKTS, pen]... ya berhasil. Di sana saya mendapatkan pengalaman, sekolah pengalaman, wong saya tidak pernah sekolah. Kalau berjuang bersama akan banyak manfaatnya)

Baik bagi pengurus, maupun kebanyakan penduduk, FKTS adalah satu-satunya tempat bagi mereka memperjuangkan tanah mereka. Mereka merasa bangga dengan terbentuknya FKTS. Kholil mengatakan, “*Mon neng dissah laen, berjuang dibi-dibi', eh co kocoh teros, men neng dina' enjek, ade' seh co ngocoh*” (Kalau di desa lain, sama berjuang sendiri-sendiri, dibohongi terus. Kalau kami jelas tidak ada yang membohongi).

Anggaran Dasar FKTS menyebutkan, bahwa FKTS dibentuk berdasarkan pengalaman pahit mereka selama ini sebagai korban ketidakadilan, dan ketidakjelasan status tanah mereka. Dalam pembukaannya disebutkan:

“...kini tibalah saatnya angin reformasi yang digulirkan memberi peluang bagi kaum tani untuk berperan aktif sebagai subyek mandiri dalam memperjuangkan kesejahteraannya...demi memperteguh solidaritas sesama kaum tani...demi teguhnya hukum ....”

Pasal 11 Anggaran Dasar FKTS secara tegas menyatakan bahwa motto mereka adalah *bersatu kita teguh bercerai kita runtuh*. Kebersamaan bagi mereka adalah kemandirian, dengan adanya FKTS, mereka tidak akan mudah diprovokasi pihak-pihak lain, mudah menyatukan langkah, dan lebih memfokuskan perjuangan.

Dalam perjuangan masyarakat Sumberanyar menuntut hak tanahnya, terasa efektif dengan menggunakan wadah FKTS. Dengan forum tersebut mereka dapat melakukan kerjasama atau membuat jaringan sesama petani di daerah-daerah lain. Mereka lebih dihargai dan disegani pihak-pihak di luar. DPRD Kabupaten dapat menerima mereka dan lebih memperhitungkan keberadaannya. LBH dapat lebih leluasa memberikan bantuan hukum maupun pendampingan. Itu semua dapat terwujud dengan hadirnya FKTS.

Arah dan bentuk perjuangan masyarakat Sumberanyar yang semula tercecer dan mudah disusupi kepentingan-kepentingan lain, seperti yang terjadi sebelumnya, sekarang setelah terbentuknya FKTS lebih terarah dan lebih

mantap dalam setiap langkahnya. Soal hasil, bagi mereka adalah kejelasan persoalan; berhasil atau tidak. Seperti dituturkan oleh Purwo Eko: “yang terpenting adalah kejelasan status tanah tersebut...itu titiknya”.

### **5.6. Kerja-kerja Pengorganisasian dan Aksi Pendudukan Lahan**

Setelah masyarakat Sumberanyar bersatu dalam FKTS, maka dimulailah kerja-kerja pengorganisasian menggantikan gerakan yang tercecceh. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah pengumpulan data-data mengenai tanah Sumberanyar dan kasus-kasus yang selama ini terjadi, seperti pengusuran dan intimidasi oleh pihak Angkatan Laut. Dalam proses itu ditemukan bahwa sejarah tanah di Sumberanyar telah direbut oleh KKO atas nama kepentingan negara.

Koordinasi dan konsolidasi dalam FKTS dilakukan beberapa kali, yaitu seminggu sekali yang berlangsung di beberapa tempat; musholla H. Mustofa, Musholla Dukuh Curahtimo, Alaskerbo, Wonokaton. Pemilihan tempat musholla sebagai tempat koordinasi adalah untuk memberi kemantapan melalui simbol agama kepada masyarakat bahwa perjuangan mereka adalah benar.

Kelemahan yang paling dirasakan adalah kurangnya bukti-bukti hukum dalam kepemilikan tanah mereka. Upaya legal pertama yang mereka lakukan

adalah menghadap ke kantor BPN Pasuruan untuk memperoleh kejelasan tanah mereka. Sebagai bentuk dukungan yang hendak dimunculkan, mereka menghimpun ribuan nama yang dilampiri dengan KTP sebagai pemohon-pemohon pembebasan tanah untuk mereka. Upaya yang dilakukan oleh sekitar 20 orang masyarakat tersebut membawa sedikit kejelasan; *pertama* bahwa tanah Sumberanyar memang masih menyimpan persoalan, artinya sebenarnya belum ada pihak yang paling berkuasa atas tanah tersebut, sebab BPN sendiri tidak mampu menunjukkan bukti jual beli tanah dari masyarakat ke AL. *Kedua*, bahwa jalur penuntutan hukum lewat pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tentu saja ini sangat memberatkan masyarakat.

Masuknya LBH sebagai pendamping mereka dalam perjuangan ini telah memberikan banyak pelajaran berharga perihal berbagai strategi gerakan. Atas inisiatif Gus Tofa peran yang dimainkan LBH lebih mengarah pada pembekalan bagi penguatan pengorganisasian petani di desa ini. Beberapa pertemuan diselenggarakan dengan menghadirkan aktivis-aktivis LBH guna memantapkan konsolidasi gerakan dengan terus memompa semangat mereka untuk selalu berada dalam garis gerakan dan tidak gampang surut langkah. Ini yang mereka sebut sebagai 'sekolah pengalaman' atau dalam bahasa pengurus FKTS sebagai 'Sekolah Rakyat'

Beberapa pengurus FKTS secara intens berhubungan dengan aktivis-aktivis LBH ini sembari mengkonsultasikan segala hal perihal kebutuhan-kebutuhan pengorganisasian mereka hingga mengkomparasikan gerakan mereka dengan perlawanan petani di daerah lain di Jawa Timur. Hal yang disebut terakhir merupakan manfaat tak langsung dari pengorganisasian gerakan di Sumberanyar yang telah mampu membangun komunikasi atas bantuan LBH dengan petani-petani kasus di seluruh Jawa Timur. Bahkan beberapa pengurus FKTS memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LBH serta forum-forum petani baik regional maupun nasional.

Kegagalan aksi massa pada tanggal 19 Agustus 1998 yang dilakukan oleh warga, memberikan pelajaran bahwa aksi-aksi semacam itu akan menuai kegagalan yang sama. Apalagi sampai saat itu belum ada keputusan resmi dari pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah. Maka disusunlah rencana aksi massa, yang bertujuan untuk melumpuhkan perkebunan.

Dicapai kesepakatan bahwa untuk melumpuhkan perkebunan, perlu dilakukan tekanan-tekanan yang kuat, sehingga pihak perkebunan merasa risih, bosan, dan lemah menghadapi tekanan masyarakat. Cara yang paling ampuh saat itu adalah membatat tebu, namun tidak dilakukan oleh orang-per orang; ini sudah terencana matang dan bersama. Tanggal 23 Agustus 1999 dilakukan

pemababatan tebu pada siang hari. Ini dilakukan terus-menerus pada hari-hari berikutnya. Tanggal 25 September 1999 aksi pemababatan dimulai dan dilakukan pada malam hari, ini dilakukan hanya sebagai taktik. Pemababatan tidak dilakukan berurutan pada satu wilayah, tetapi berpindah-pindah dari satu area ke area lainnya. Aksi pemababatan tebu dilakukan sampai awal nopember 1999, dengan hasil sekitar 400 hektar tanaman tebu habis dibabat. Masyarakat ingin menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan besar untuk melumpuhkan perkebunan. Tidak hanya pemababatan, namun juga dilakukan penebaran hama pada tanggal 23 September 1999. Tanaman tebu seluas 2 ha di Wonokaton mati akibat aksi ini.

Aksi-aksi massa yang dilakukan ini nampak sekali sebagai aksi reproduksi, artinya mereka mencoba membangun aksi yang sudah dikenal oleh masyarakat. Perjuangan yang dilakukan FKTS tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi memori masyarakat Sumberanyar. Aksi-aksi penebaran hama, pemababatan, dan pembakaran sudah terbiasa dilakukan oleh warga. Sekarang dilakukan secara bersama-sama. Aksi-aksi massa selain untuk menunjukkan kekuatan kepada pihak lain, serta melemahkannya; maka di sisi lain hal ini terkait dengan kerja pengorganisasian, di mana melalui aksi-aksi tersebut telah menumbuhkan kekompakan, menggugah kesadaran bersama; bahwa

perjuangan mereka selama ini sudah tepat; tetapi sekarang harus dilakukan dengan semangat persatuan.

Aksi-aksi perusakan yang dilakukan oleh masyarakat, ternyata tidak mendapat reaksi yang keras dari Angkatan Laut. Iklim perpolitikan nasional yang melemahkan posisi TNI, menjadi kondisi yang memungkinkan itu terjadi. Oleh karena tidak ada reaksi yang keras, maka masyarakat Sumberanyar merasa yakin bahwa itulah saat yang tepat melakukan pendudukan kembali (*reclaiming*) lahan mereka.

Mereka merencanakan bahwa pendudukan dilakukan pada saat musim tanam, dengan tujuan pendudukan nantinya langsung diikuti oleh proses penggarapan tanah kembali. Pada tanggal 3,4,5 Nopember 1999, ketika tanaman tebu sudah habis, masyarakat secara serentak melakukan aksi pendudukan lahan. Pendudukan yang dilakukan masih dibawah kendali FKTS, sebagai organ yang mengatur dan membagi lahan yang dapat digarap oleh masyarakat. Sekitar 1000 pemohon mendapat bagiannya masing-masing; ada yang mendapat besar dan ada kecil. Rata-rata tiap pemohon mendapat 20 X 10 m<sup>2</sup>. Ada beberapa area tidak dapat dibagi, seperti di Wonokaton, karena berbatasan dengan desa lain, Alastlogo.

Tidak ada reaksi yang spontan dari pihak TNI AL, seperti mengerahkan kekuatan militer untuk menggagalkan aksi ini. Namun bukan berarti tidak ada

reaksi sama sekali. Teror-teror yang lebih bersifat psikologis secara perlahan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk reaksi ini. Seperti gerilya yang ditampakkan oleh orang-orang bersenjata untuk menakut-nakuti masyarakat untuk tidak meneruskan aksinya.

Berbagai teror dan bermacam bentuk reaksi lainnya nyatanya sama sekali tidak menyurutkan gerakan mereka. Masyarakat Sumberanyar seakan tidak peduli, mereka terus saja menanam lahan yang mereka peroleh sesuai dengan pembagian yang ada. Di sinilah terlihat efek penting dari kerja-kerja pengorganisasian yang mereka lakukan. FKTS seolah menjadi benteng mereka terhadap segala gangguan dari luar. Apapun resiko yang harus dihadapi petani Sumberanyar telah menjadi beban bersama dalam kelompok, hingga tidak mudah dipatahkan.

Sampai Februari 2002 petani Sumberanyar sedikitnya telah berhasil menikmati dua kali panen dari lahan yang mereka garap, berupa jagung dan kacang-kacangan. Meski hasil pertanian mereka sama sekali tidak bisa dibilang bagus namun ia menjadi penanda bahwa mulai saat itu mereka telah mendapati kemerdekaannya kembali atas hak tradisional mereka sekaligus menikmati hasilnya.

## **BAB VI**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini hendak menjelaskan bagaimana sekelompok petani Sumberanyar mendapatkan dan sekaligus mengelola kesadarannya dalam konteks gerakan perlawanan, sebagai jawaban pokok permasalahan dalam penelitian ini. Paparan akan dimulai dari bagaimana para petani memaknai konsep penderitaan yang mereka terima dalam bahasa dan praktek, lalu memperlihatkan bagaimana para petani berhasil menyusun informasi-informasi yang didapatkan sehingga memunculkan kesadaran perlawanan serta partisipasi dalam pengorganisasian. Rasionalisasi yang diikutsertakan dalam gerakan akan sangat menentukan corak pengorganisasian yang terjadi di Sumberanyar dan posisi para petani dalam pengorganisasian, di samping faktor kepemimpinan dan peran aktor-aktor dari luar desa. Akhirnya bab ini secara khusus akan ditutup dengan penjelasan dan implikasi teoretik penelitian ini berangkat dari berbagai teori yang digunakan.

#### **6.1. Kesadaran sebagai Basis Pengorganisasian**

“Keberhasilan” aksi pendudukan lahan di Sumberanyar pada Nopember 1999 secara tepat menggambarkan keberhasilan para petani Sumberanyar dalam mengelola tindakan bersama. Aksesibilitas para petani terhadap

informasi adalah tahap paling dasar dari munculnya kesadaran perlawanan. Informasi yang dimaksud di sini adalah isu, desas-desus, ajakan, pergunjungan ataupun bentuk-bentuk lain yang lebih merupakan informasi diam-diam. Dari sini akan muncul pewacanaan yang secara ekstensif menggelinding menjadi semacam bola salju perihal berbagai hal menyangkut kehidupan mereka dan kesempatan untuk berubah. Perubahan adalah kata kunci yang dalam segala hal mampu merebut kesadaran mereka mencairkan kebisuannya atas penderitaannya selama ini.

Kebisuan selama kurang lebih 35 tahun tidak mengubah apapun dalam kehidupan mereka. Sejarah seakan berjalan secara linear dalam suasana yang dalam segala segi mereka gambarkan sebagai penderitaan. Harapan untuk keluar dari penderitaan dan tuntutan akan perubahan kehidupan tentu saja tidak serta merta dapat menggerakkan perlawanan. Di sinilah letak penting permainan informasi yang berkembang di kalangan mereka.

Karenanya, kekuatan informasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan kesadaran. Jenis informasi yang beredar serta cara-cara persebaran informasi yang dilakukan bergerak secara simetris dengan substansi kesadaran petani dalam menilai situasi gerakan mereka. Berikutnya, ia juga menentukan rasionalisasi petani dalam mengekspresikan segenap kepentingannya dalam koridor tindakan bersama. Kepercayaan atau ketidakpercayaan, tingkat

partisipasi, pengorbanan dan konformitas dapat dibangun dari efektifitas tersampainya segenap informasi tentang hal-hal tersebut.

Bangunan kesadaran petani dalam meletupkan perlawanan tidak hanya bergantung dari berbagai informasi yang diterima. Ia juga dapat muncul dari desas-desus yang mereka buat sendiri. Pada tingkat tertentu yang disebut terakhir justru lebih efektif dalam memberikan sentuhan yang sangat individual dalam gerakan. Para petani sendiri yang mengkreasi dan mengelola desas-desus itu serta menyebarkannya untuk menegaskan bahwa dalam kebersamaan tindakan, kepentingan-kepentingan pribadi tidak seluruhnya harus dikalahkan. Mereka tetap membutuhkan ruang khusus bagi ekspresi-ekspresi pribadi yang lebih banyak menyangkut kebutuhan-kebutuhan ekonomi.

Selain itu, faktor kepemimpinan turut memberikan andil yang cukup penting dalam gerakan sekelompok petani Sumberanyar ini terutama dalam mengorganisir tindakan bersama. Kredibilitas dan kharisma yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dapat menjadi ukuran soliditas dan kebersamaan tindakan. Hal ini menyangkut keyakinan bahwa pemimpin mereka mampu memberikan ketenangan bahwa apa yang mereka lakukan kelak akan menguntungkan. Meski kepercayaan demikian dapat dengan mudah didapatkan secara tradisional menurut tradisi Weberian, tapi cara pemimpin memperlakukan mereka dan menunjukkan keberpihakannya tetap

membutuhkan proses rasionalisasi petani sendiri dalam menanamkan kepercayaan terhadap pemimpinnya.

Terdapat pula keterlibatan aktor-aktor dari luar desa dalam setiap aksi yang dimunculkan sejak awal pergolakan. Aktor-aktor ini turut berperan dalam menentukan pilihan bentuk-bentuk perlawanan dan pengorganisasian secara negatif maupun positif. Hanya saja sekali lagi, apapun yang dibawa oleh aktor-aktor tersebut masih harus melewati proses rasionalisasi dan kesadaran petani itu sendiri hingga mampu memunculkan sebuah tindakan bersama. Artinya, petani tidak serta merta dapat dimobilisir menjadi sebuah kekuatan perlawanan yang berkelanjutan tanpa melibatkan proses kesadaran mereka sendiri.

#### **6.1.1. Makna Penderitaan bagi Petani Sumberanyar**

Sebelum menjelaskan bagaimana kesadaran petani Sumberanyar dikelola dalam sebuah gerakan, adalah penting untuk diketahui konteks lokal yang dipahami dan dialami oleh mereka sendiri sebelum kesadaran ini membentuk dan menggerakkan sebuah perlawanan. Kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek sosial mereka selama hidup “berdampingan” bersama TNI AL menciptakan sebuah hubungan yang sama sekali tidak seimbang, hubungan antara yang menindas dan yang ditindas. Sebagaimana dalam banyak hubungan yang tidak imbang seperti ini, perasaan mendalam yang kerap tak mampu

terkatakan dari orang-orang yang ditindas dapat dicerminkan oleh lingkungan normatif dari wacana yang mereka munculkan.

Lingkungan normatif ini menyangkut apa yang mereka pahami mengenai sebuah kehidupan yang normal berlawanan dengan kenyataan sosial sehari-hari. Ia juga dapat berkenaan dengan seperangkat memori kolektif yang terus dipelihara perihal kelumrahan hidup mereka di masa lalu. Artikulasi yang kurang lebih cermat dalam mengekspresikan lingkungan normatif ini adalah kosa kata yang mereka gunakan sendiri dalam memberikan tekanan makna penderitaan yang telah mereka alami, dan dijalin lewat cerita-cerita yang mereka ungkap. Konteks sosial saat itu menjadi penting dalam memberikan batasan-batasan ruang dan waktu segenap pengalaman dalam merasakan penderitaan.

Kosa kata yang paling sering muncul dari cerita mereka ketika ditanya kondisinya waktu itu adalah kata “melarat”. Secara harafiyah, dalam bahasa Jawa kata ini memang menunjuk pada kemiskinan dan kepapaan. Secara umum, kelangkaan sumber-sumber ekonomi yang dapat mereka andalkan bagi kelangsungan hidup mereka menjadi faktor terpenting mengapa mereka menjadi miskin. Sumber ekonomi satu-satunya yang mereka andalkan, yaitu tanah, telah “direbut” oleh TNI AL. Sementara, sebagai orang kampung yang tidak punya keahlian lain kecuali bercocok tanam, saat mereka harus

kehilangan akses terhadap lahan garapannya maka sudah dapat dibayangkan betapa mereka harus jatuh menanggung beban berat kehidupan seterusnya.

Namun begitu, secara khusus penggunaan kosa kata “melarat” akan berbeda maknanya sesuai dengan konteks sosialnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan, petani Sumberanyar pernah menikmati tingkat kemakmuran tertentu menurut konsep mereka sendiri sebelum datangnya TNI AL. Kepemilikan atas tanah sebagai basis ekonomi utama membawa mereka pada kehidupan yang kurang lebih layak. Meski struktur tanah di sebagian besar wilayah Sumberanyar tidak semua dapat ditanami, sebagiannya adalah tanah padas yang keras yang hanya bisa ditumbuhi oleh tanaman-tanaman berduri semacam pohon mojo, namun dari hasil panen jagung yang mereka tanam, kemakmuran itu dapat benar-benar mereka nikmati. *“Dulu, kami petani di sini kalau panen jagung hasilnya sampai belum habis pada saat panen lagi”*, kata Pak Sunar. Menurut cerita Pak Sunar lagi, mereka sempat membangun lumbung desa untuk menyimpan hasil panen mereka, hanya sayang lumbung ini kemudian dijual oleh oknum perangkat desa. Dus, tidak ada ekspresi kata melarat dalam gambaran mereka terhadap situasi ini.

Ekspresi kata “melarat” baru muncul ketika cerita berlanjut memasuki fragmen penguasaan TNI AL atas sebagian besar tanah di Sumberanyar sebelum terlibatnya investor perkebunan besar. Konotasi yang dimunculkan

dari kata ini lebih mengarah pada kesulitan hidup dan ketakutan-ketakutan mereka yang tidak semata-mata diakibatkan oleh menurunnya tingkat ekonomi. Kata “melarat” juga dapat bermakna sulit atau repot, yang dapat digambarkan dengan situasi yang sangat berat dan tidak menguntungkan. Hadirnya TNI AL ke desa Sumberanyar digambarkan sebagai awal kesulitan hidup.

Bersamaan dengan itu pula, pihak TNI AL juga mencoba menerapkan sistem tanam paksa, seakan meniru *cultuur stelsel* gaya kolonial Belanda, dengan memerintahkan pada tiap petani menanam bibit pohon jarak dan wijen di lahan garapan mereka. Pada situasi inilah kata “melarat” secara ekspressif dimunculkan. Bagaimana mereka harus mengelola bagian subur dari tanahnya untuk ditanami pohon wijen dan jarak milik TNI AL tanpa kesempatan untuk menanam jagung, bagaimana orang-orang TNI AL begitu protektif terhadap tanaman jarak dan wijen mereka dan sama sekali tidak menolerir “pencurian”, atau bagaimana orang-orang itu juga menggunakan cara-cara kekerasan terhadap para petani ketika mendapati tanaman mereka tidak berkembang dengan baik, maupun ketika mereka berhasil menangkap “para pencuri” yang notabene adalah para petani yang memelihara tanaman mereka; adalah di antara cerita-cerita yang menegaskan “kemelaratan” ini.

Dengan begitu, kata melarat menjadi gambaran akan sebuah kehidupan yang sulit yang tidak saja disumbang oleh kemerosotan tingkat ekonomi, tapi

juga oleh suasana ketakutan yang muncul akibat praktek-praktek kekerasan pihak TNI AL. Dengan terampasnya lahan subur mereka, hasil yang dapat diperoleh dari lahan tersebut tentu saja sangat berkurang. Di samping mereka hanya mendapatkan sepertiga dari lahan garapannya sebagai sumber penghasilan, ongkos perawatan tanaman milik TNI AL pun menjadi tanggungan mereka. Pemaksaan yang mengiringi proses penanaman ini dan praktek-praktek kekerasan yang ditampilkan oleh pihak TNI AL telah menciptakan efek ketakutan yang luar biasa bagi petani Sumberanyar sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali sebisa mungkin menghindari masalah dengan TNI AL. “Teman saya sampai-sampai kalau malam harus tidur di *blumbangan* [sebuah lobang besar, biasanya untuk aliran air dan pembuangan sampah, pen] karena selalu takut dari kejaran TNI AL”, cerita Pak Karyono

Ketika perkebunan besar mulai memasuki wilayah Sumberanyar, tekanan kata “melarat” kembali menemukan artikulasinya yang utuh. Akses mereka terhadap lahan-lahan garapan benar-benar terhenti. Tertutup sudah sumber penghasilan satu-satunya. Proyek perkebunan besar ini telah betul-betul menggilas kehidupan mereka dengan terenggutnya hak-hak dasar mereka sebagai penduduk yang secara tradisional dan historis telah mendiami wilayah ini. Di beberapa dusun, penduduknya harus terusir karena kepentingan

perkebunan. Tidak ada kata menolak untuk segera pindah kalau tidak mau berhadapan dengan moncong senjata.

Para petani ini sungguh kehilangan identitasnya sebagai petani, seperti dijelaskan oleh Purwo Eko “merasa diri jadi petani tapi nggak ada lahan untuk ditanami”. Sistem subsistensi mereka hancur lebur, sehingga pekerjaan apapun demi kelangsungan hidup harus segera diperoleh. Banyak dari mereka kemudian memilih jadi buruh bangunan di kota. Yang tertinggal di desa mesti pandai-pandai mencari apapun yang bisa dimakan, termasuk harus mencuri dari perkebunan. Pak Sunar menceritakan:

*“Kulo se’ radi eco, diangkat dados waker dateng kebon. Namung tanggi kulo kathah ingkang kedah ngasak mados pangan. Sa’derengi diangkat dados waker, kulo mados pelok sampe’ tutuk pasar Pasrepan kangge ndamel jenang, dados panganan saben dinten”* (Saya termasuk lumayan enak, diangkat jadi *waker* [penjaga keamanan, pen] di perkebunan. Tapi tetangga saya banyak yang harus *ngasak* [mencari sisa-sisa beras di pasar-pasar atau pada saat musim panen di tetangga desa, pen] mencari makanan. Sebelum diangkat jadi *waker*, saya harus mencari *pelok* [biji buah mangga, pen] hingga sampai pasar Pasrepan [kurang lebih jaraknya dari Sumberanyar 30 km, pen] untuk dibuat jenang, jadi makanan setiap hari).

Tekanan pada kata “melarat” pada fragmen di atas menjadi gambaran akan semakin beratnya kehidupan mereka. Penderitaan menjadi konteks nyata bagi sebagian besar masyarakat Sumberanyar yang terkena dampak langsung dari penguasaan lahan oleh TNI AL. Bagi sebagian penduduk yang sebelumnya mempunyai sedikit surplus dari penghasilan mereka akan mempunyai kesempatan untuk segera keluar dari penderitaan ini, dengan pindah ke

Sumberanyar Kidul, misalnya. Tapi bagi mereka yang sama sekali tidak mempunyai surplus dan harus berdiam di tanah kekuasaan TNI AL, pilihan-pilihan sulit adalah bagian dari kehidupan seterusnya.

Mereka kemudian seperti menjadi penduduk liar di tanah kelahirannya sendiri. Proyek pembangunan apapun sama sekali tidak pernah dapat dirasakan. Mereka hidup dalam kegelapan di malam hari karena ketiadaan penerangan listrik. Paksaan dan tekanan yang didemonstrasikan orang-orang TNI AL tidak juga surut. Dan hasil dari perkebunan besar itu tak setitik pun merembes dalam kehidupan mereka kecuali penderitaan yang tak kunjung berhenti.

Namun ketahanan dan daya hidup para petani ini begitu luar biasa. Pola bertahan yang mereka peragakan menampilkan keliatan dan keterampilan masyarakat menghadapi tekanan berat ekonomi, meski harus sedikit mengganggu kepentingan pihak perkebunan. Munculnya perbanditan desa yang secara terus menerus mencuri dan mengganggu operasi perkebunan dan dapat dipandang sebagai bibit-bibit munculnya perlawanan petani di sana adalah di antara pola bertahan demikian. Pertahanan yang lain diperagakan oleh sebagian penduduk di sana bersamaan dengan hadirnya Koperasi Susu di Grati. Mereka mencari orang-orang kaya di tetangga desa yang mau menitipkan sapi perahnya untuk dapat mereka pelihara dengan imbalan tertentu. Mekanisme hubungan yang dibangun antara pihak pemilik sapi dan pemeliharanya sedikit

menyelamatkan nasib kehidupan mereka. Dan menariknya, inipun tetap harus mengganggu kepentingan perkebunan. Sering mereka memberi makan sapi-sapi ini dengan pucuk tebu yang dicuri dari perkebunan. *Waker* seperti Pak Sunar bahkan sengaja membiarkannya.

“Kemelaratan” yang terus menerus menjadi kenyataan sosial dan wacana kehidupan mereka, dengan demikian, telah meruntuhkan lingkungan normatif mereka sendiri, atau dalam istilah **Scott** disebut “*etika subsistensi*”. Terdapat jurang yang lebar antara konsep kemakmuran yang dapat mereka bayangkan, yang pernah terjadi di masa lalu, dengan kenyataan kehidupan mereka sehari-hari. Masih mengikuti **Scott**, kerawanan struktural seperti ini tidaklah sedemikian rupa dengan sendirinya langsung meledakkan perlawanan petani secara terbuka. Bagi **Scott**, ia harus disertai pula mulai dari konteks struktural perlawanan itu sendiri hingga persoalan anatomi penindasan yang merongrong pengaturan subsistensi petani yang akan memperbesar kemungkinan munculnya perlawanan. Lebih dari itu, perlawanan itu sendiri mewujud dalam suatu tindakan kolektif yang memerlukan lebih dari sekedar konsensus atau intensitas kebutuhan. Oleh karenanya, bibit-bibit perlawanan terbuka yang dimunculkan oleh sebagian masyarakat di sana menjadi penting dalam konteks ini. Ia merupakan perlawanan kecil-kecil yang penuh kesabaran

dan kehati-hatian dengan menghindari konfrontasi langsung terhadap baik pihak TNI AL maupun pihak perkebunan.

### **6.1.2. Penipuan “sang makelar”: uang atau tanpa uang**

Dijelaskan di muka, petani Sumberanyar tidak mempunyai sejarah perlawanan secara terbuka dan massif pada penguasa. Perlawanan diam-diam seperti pencurian dan pengrusakan baru muncul ketika TNI AL menggandeng perusahaan perkebunan dalam mengelola lahan ‘milik’ mereka. Perlawanan diam-diam inipun tidak secara pasti memberikan jalan bagi munculnya perlawanan yang lebih terbuka dan massif.

Berdasarkan situasi ini, ajakan penuntutan atas tanah ‘milik’ mereka yang dilakukan oleh Sumardi adalah momentum penting dalam membuka lembaran baru perlawanan petani di desa Sumberanyar. Demonstrasi besar-besaran yang digalang oleh Sumardi dan mereka ikuti, secara pasti menunjukkan deklarasi petani Sumberanyar perihal kekuatan politik mereka di hadapan penguasa dan keyakinan mereka akan hak-hak tradisional atas tanah yang dulu pernah mereka ‘miliki’. Ketiadaan pengalaman mereka dalam melakukan aksi-aksi perlawanan terbuka menjadikan penggalangan dan mobilisasi yang dilakukan oleh Sumardi menampakkan hasil yang nyata, setidaknya dia berhasil mengumpulkan begitu banyak massa petani.

Pada mulanya cara Sumardi tersebut tidak menimbulkan persoalan yang berarti bagi para petani ini. Bahkan ketika Sumardi selepas demonstrasi memungut sejumlah dana kepada mereka yang hendak memperjuangkan tanahnya, inipun disambut baik. Kepiawaian Sumardi dalam mengikutsertakan petani Sumberanyar dalam perjuangannya terletak pada cara dia memberikan informasi-informasi perubahan yang penting dilakukan dan kesempatan-kesempatan yang bisa diraih dalam memperbaiki kehidupan mereka. Basis material yang paling dapat diterima dalam perjuangan ini adalah soal tanah.

Terdapat beberapa alasan mengapa persoalan tanah ini membuat mereka merasa harus terlibat. *Pertama*, bahwa sejarah tanah Sumberanyar yang mereka dengar dari orang-orang tua secara pasti menunjukkan bahwa tanah ini dulunya adalah milik mereka. *Kedua*, penguasaan TNI AL terhadap tanah ini lebih merupakan pemaksaan daripada proses pengalihan normal. Walaupun dilaporkan terdapat ganti rugi yang diberikan oleh TNI AL namun tidak semua menerimanya, lagipula ganti rugi yang diterimakan jauh dari nilai jual tanah itu sendiri. Mengikuti kata-kata Pak Sunar, uang ganti kerugian itu bukan uang pembelian tanah tetapi sebagai kompensasi atau imbalan kesediaan pindah. *Terakhir*, masuknya perkebunan besar ke tanah mereka semakin membuat kehidupan mereka terjebak dalam penderitaan panjang. Pada titik ini lalu muncul semacam memori kolektif tentang kemakmuran desa sebelum

masuknya TNI AL. Harapan bahwa suatu saat kemakmuran itu akan kembali kepada mereka tak pernah lekang dari memori dan kesadaran mereka.

Dengan demikian, persoalan tanah adalah daya ikat mereka bergabung dengan apa yang hendak dilakukan oleh Sumardi. Dengan sukarela pula hampir seluruh penduduk Sumberanyar, utamanya yang berdiam di utara, menyerahkan sejumlah dana kepada Budi lewat Sumardi. Setiap kepala keluarga dimintai antara Rp. 15.000,- hingga 20.000,- sebagai biaya perkara.

Kurang lebih tiga bulan praktek di atas berlangsung hingga muncul kegelisahan di kalangan mereka sendiri. Pangkal kegelisahan tersebut adalah ketidakjelasan apa yang dilakukan oleh Budi dan Sumardi dalam memperjuangkan kasus mereka sementara telah beberapa kali mereka menyerahkan uang. Di sini uang menjadi ukuran rasional mereka dalam menyumbangkan sumberdaya kepada perjuangan Sumardi, karena itu tentu saja mereka menginginkan hasil cepat yang dapat mereka rasakan. Sebagaimana diceritakan oleh Nur Bai:

*"sengkok neka ampun telo' kaleh setor dek tari'anna Sumardi, pertama lembeles ebun, teros sepuluh ebun-sepuluh ebun. Tapeh engkok tak toman ebelehi mbek Sumardi bile persoalan neka beres. Poko'en ca'en orengah Sumardi masalah neka bede ahlina se ngorosen, be'en noro'-noro' behi". (Saya ini sudah tiga kali menyetorkan uang pada petugasnya Sumardi, pertama lima belas ribu dan seterusnya sepuluh ribu. Tapi saya tidak pernah diberitahu kapan persoalan ini beres. Pokoknya kata orangnya Sumardi masalah ini sudah ada ahlinya yang menangani, kamu ikut saja).*

masuknya TNI AL. Harapan bahwa suatu saat kemakmuran itu akan kembali kepada mereka tak pernah lekang dari memori dan kesadaran mereka.

Dengan demikian, persoalan tanah adalah daya ikat mereka bergabung dengan apa yang hendak dilakukan oleh Sumardi. Dengan sukarela pula hampir seluruh penduduk Sumberanyar, utamanya yang berdiam di utara, menyerahkan sejumlah dana kepada Budi lewat Sumardi. Setiap kepala keluarga dimintai antara Rp. 15.000,- hingga 20.000,- sebagai biaya perkara.

Kurang lebih tiga bulan praktek di atas berlangsung hingga muncul kegelisahan di kalangan mereka sendiri. Pangkal kegelisahan tersebut adalah ketidakjelasan apa yang dilakukan oleh Budi dan Sumardi dalam memperjuangkan kasus mereka sementara telah beberapa kali mereka menyerahkan uang. Di sini uang menjadi ukuran rasional mereka dalam menyumbangkan sumberdaya kepada perjuangan Sumardi, karena itu tentu saja mereka menginginkan hasil cepat yang dapat mereka rasakan. Sebagaimana diceritakan oleh Nur Bai:

*"sengkok neka ampun telo' kaleh setor dek tari'anna Sumardi, pertama lembeles ebu, teros sepuluh ebu-sepoloh ebu. Tapeh engkok tak toman ebelehi mbek Sumardi bile persoalan neka beres. Poko'en ca'en orengah Sumardi masalah neka bede ahlina se ngorosen, be'en noro'-noro' behi".* (Saya ini sudah tiga kali menyetorkan uang pada petugasnya Sumardi, pertama lima belas ribu dan seterusnya sepuluh ribu. Tapi saya tidak pernah diberitahu kapan persoalan ini beres. Pokoknya kata orangnya Sumardi masalah ini sudah ada ahlinya yang menangani, kamu ikut saja).

Kenyataan demikian membuat para petani Sumberanyar harus berpikir ulang untuk meneruskan perjuangannya bersama Sumardi dan pengacara Budi. Ketiadaan hasil yang semestinya mereka peroleh, walaupun bentuknya hanya sekadar informasi perkembangan kasus mereka, serta penggunaan pungutan yang tidak juga berhenti seakan menggambarkan bahwa sumberdaya yang telah mereka serahkan ternyata tidak membuahkan insentif apapun untuk mereka. Uang dalam hal ini tidak lagi sekadar bukti kesediaan mereka terlibat dalam perjuangan, ia kemudian menjadi alat ukur sekaligus alat tawar mereka terhadap Sumardi dan pengacara Budi. Sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang yang berjuang dengan menggunakan cara-cara pungutan seperti di atas bukanlah pejuang-pejuang murni. Orang-orang ini pada dasarnya adalah mencari keuntungan dirinya sendiri atas beban orang lain.

Dua komentar berikut memberikan gambaran betapa mereka sudah sangat kecewa terhadap Sumardi yang oleh mereka kemudian dikenai julukan “Mardi *Gamblong*”. *Gamblong* adalah sejenis makanan sapi yang menebarkan bau yang sama sekali tidak sedap. Komentar pertama datang dari Purwo Eko:

“Mulanya ya juga ada yang memperjuangkan tanah ini, tapi di situ disalahgunakan, ada penarikan dana dari masyarakat. Namanya Sumardi”.

Komentar berikutnya secara lebih emosional diungkap oleh Lasminto:

“Mardi *gamblong* itu nggak niat berjuang tapi cari uang. Wong asalnya dia itu tukang becak lha kok sekarang kaya ndadak, berarti uang kami ia pakai sendiri dan bosnya yang di Probolinggo itu. Berjuang kok pakai uang, *nek berjuang yo bondo awak, dudu duwe*’ (kalau berjuang mestinya modalnya adalah pengorbanan diri bukan uang, pen), saya gak mau lagi ikut dia, lebih baik ikut Gus Tofa yang tidak pakai uang, tapi pakai ini! (sambil menunjuk kepalanya, pen)”.

Di sisi yang berbeda, berdirinya FKTS seakan memberi obat penawar pada mereka. Para petani Sumberanyar yang hampir-hampir patah arang dalam memperjuangkan tanahnya seperti mendapatkan darah segar kembali dengan turun tangannya H Mustofa atau Gus Tofa yang menyertai perjuangan mereka. Sejak awal Gus Tofa telah memberikan semacam garis yang tegas bahwa perjuangan mereka melalui FKTS sama sekali tidak pakai uang. Hal ini terus dikampanyekannya sembari berusaha menutup akses Sumardi. Pengelolaan isu uang dan tidak pakai uang nyatanya cukup efektif menarik minat para petani untuk bergabung dalam barisannya sembari meneguhkan semangat perlawanan mereka.

Pemilahan yang tegas antara perjuangan dengan uang dan perjuangan tanpa uang kemudian memberikan rasionalitas dan kesadaran baru pada petani Sumberanyar dalam melihat gerakan mereka sendiri. Konsep gerakan dengan atau tanpa uang menjadi batas benar atau tidaknya sebuah perjuangan. Kesadaran yang muncul dalam konstruksi demikian memberikan ruang yang lebih bebas kepada para petani untuk menilai dan mengambil pilihan-pilihan gerakan yang layak mereka ikuti. Selanjutnya, kesadaran inipun turut

mengambil peran dalam mengontrol tindakan bersama mereka. Apapun tindakan bersama itu, maka uang bukan titik masuk yang dibenarkan, kesukarelaan menjadi penting bagi mereka yang diistilahkan sebagai “*bondo awak*” di atas.

### **6.1.3. Harapan Individu atau Bersama**

Sejarah panjang penderitaan di Sumberanyar memang menunjukkan kemampun luar biasa para petani di sana menemukan pola-pola bertahan dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan repressifitas militer. Walau begitu, kesadaran tertinggi mereka tidak diletakkan untuk hanya merefleksikan ketahanan dalam penderitaan dan sama sekali tidak melihat adanya alternatif-alternatif perubahan yang dapat mereka peroleh. Kesadaran ini lebih terletak pada harapan-harapan mereka pada kebaikan dan kesejahteraan yang barangkali akan didapatkan pada masa mendatang. Sumarji menggambarkan hal ini dalam kata-katanya “*Moso’ seh awak iki ngene terus!*” (Masa sih kita ini begini terus).

Pada puncaknya, harapan seperti ini menemukan artikulasinya secara bebas dalam sebuah gerakan perlawanan. Ketika perlawanan menjadi katup terurainya harapan-harapan, maka ia menjadi rasionalitas baru untuk

terwujudnya perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Searah dengan apa yang dijelaskan oleh **Freire**;

Selama masa transisi dari budaya bisu ke kesadaran, sifat tertutup dari masyarakat itu secara bertahap berubah menjadi terbuka dalam semua dimensi kehidupan. Konflik antara yang dikuasai dan yang menguasai kemudian tidak bisa dihindari karena kesadaran tersebut makin menuntut kebebasan dan menjadi sinyal yang berbahaya bagi penguasa. (**Freire: 1999, 139**)

Dalam konteks ini, perlawanan adalah soal perjuangan kepentingan dan pewujudan harapan yang lebih bersifat ekonomi, dengan demikian berbasis pada materi, daripada perjuangan menundukkan aturan-aturan yang menindas dan membongkar sistem yang ada. Yang disebut terakhir lebih mengarah pada sebuah perjuangan yang berbasis politis dan ideologis. Basis ideologis maupun politis, karenanya, bukanlah basis yang nyata dalam memunculkan kepentingan-kepentingan para petani di Sumberanyar.

Sepintas apa yang terjadi di Sumberanyar ini paralel dengan apa yang dijelaskan oleh **Scott** bahwa tujuan perlawanan kaum tani bukanlah untuk menumbangkan atau mengubah suatu sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup. **Scott** benar bahwa di Sumberanyar tidak muncul pretensi untuk menumbangkan suatu sistem dominasi yang lebih luas dan ia juga tidak salah bahwa ini adalah soal mempertahankan hidup. Hanya yang terjadi di Sumberanyar, perlawanan yang mereka tunjukkan sekurang-kurangnya mampu mengeliminasi dominasi yang telah sekian lama dimainkan oleh TNI AL pada

mereka. Keberanian yang ditampakkan dalam menghadapi orang-orang TNI AL sedikit menjelaskan hal ini. Selanjutnya, perlawanan mereka ini tidak semata-mata hanya soal bertahan hidup, tapi lebih dari itu yakni menyangkut harapan-harapan ke depan. Pak Sunar menegaskan sebagai "*kepingin enak nang anak putu*" (Agar menjadi enak bagi anak cucu kelak).

Hanya yang perlu diperhatikan, tingkat kesadaran secara personal yang ditunjukkan oleh para petani ini untuk terlibat dalam sebuah gerakan perlawanan tidaklah mencapai pada tingkat homogenitas kesadaran bersama yang tunggal dan tidak bersegi banyak. Pada kenyataannya, setiap orang mempunyai rasionalitasnya sendiri demi pemeliharaan kepentingan mereka masing-masing. Ia terekam dalam tindakan-tindakan individual yang dalam banyak hal tidak dapat disebut sebagai sebuah kesadaran kolektif. Hal ini berkaitan dengan cara orang-orang Sumberanyar sendiri dalam memahami kenyataan yang mereka hadapi dan berhubungan dengan tumbuhnya kesadaran perlawanan mereka. Batas akhirnya bermuara pada rasionalisasi yang mereka lakukan dalam memelihara kepentingannya.

Sebagaimana dalam sebuah konstruksi gerakan, kesadaran perlawanan adalah agregat kesadaran para partisipannya guna menemukan persamaan nasib dan musuh bersama mereka. Karena itu, yang sangat dibutuhkan dalam suatu gerakan adalah kolektifitas-kolektifitas tindakan yang berbasiskan pada

kesadaran bersama, hal ini menyangkut lingkup orang-orang yang terlibat, tingkat koordinasi dan pengorganisasian aksi. **Landsberger** menyebutnya sebagai tindakan ekspresif, yang di pihak lain bersandingan dengan tindakan instrumental.

Tindakan instrumental merupakan kata sifat yang dilekatkan bila suatu perkumpulan atau gerakan mengejar sasaran yang terletak di luar kegiatan langsung mereka, dan di mana kegiatan itu dilakukan pertama-tama untuk mencapai hasil akhir yang akan mereka capai: perubahan dalam penguasaan tanah, atau upah yang lebih tinggi (**Landsberger: 1984, 29**).

Jelas di sini, soal rasionalitas orang-orang Sumberanyar menjadi sangat signifikan untuk melihat bagaimana mereka menempatkan dirinya berikut kepentingannya dalam suatu tindakan bersama, dan untuk memperteguh sebuah kolektifitas gerakan. Pada saat yang sama ia memunculkan pula kepentingan instrumental yang mengiringi atau bahkan berbeda dengan kepentingan bersama. Di sisi lain, sebuah gerakan perlawanan yang membutuhkan kesadaran bersama dari segenap partisipannya kerap mempunyai penjelasan yang terlalu luas dan umum dibandingkan dengan yang ditampilkan oleh rasionalitas para partisipannya secara khusus dalam memaknai tindakan-tindakannya sendiri. Perlawanan bukan sebuah koor tunggal dengan pemaknaan kepentingan yang tunggal pula.

Kasus yang menarik untuk ditunjukkan di sini adalah persoalan penambangan pasir. Kasus ini terjadi pada saat mereka baru saja berhasil

mengambil alih lahan TNI AL sekitar bulan November 1999. Diawali dengan beredarnya petok D 'palsu' di dusun Belung atas nama beberapa orang di Sumberanyar dan dijual kepada ahli warisnya. Banyak di antara penduduk dusun ini yang kemudian membelinya. Akan tetapi di pihak lain, menurut keterangan Lasminto, petok D yang sama, yang juga 'palsu', dijual pula pada seorang investor penambangan pasir. Berdasarkan petok D yang dibelinya, si investor memulai usaha penambangan pasirnya di lahan yang ditunjuk oleh petok D tersebut. Tentu saja hal ini segera menyulut keresahan dan menggerakkan sebagian besar masyarakat berdemonstrasi menuntut penutupan penambangan. Puncaknya, mereka berhasil mencegah dan mengusir investor penambang tersebut dari desanya.

Yang penting diperhatikan di sini adalah kesediaan sebagian petani Sumberanyar membeli petok D 'palsu' tersebut. Terdapat harapan yang disertakan yang betul-betul berangkat dari rasionalitas mereka sendiri, yakni rasa aman dalam mengelola tanah yang mereka kuasai. Tawaran pembelian petok D ini seakan menjadi solusi dan antisipasi munculnya persoalan batas-batas tanah ini di kemudian hari. Luas tanah yang ditunjuk oleh petok D, sebagaimana diungkapkan oleh Akim, menjadi semacam penguat klaim atas kepemilikan tanah, meski objek atau lokasi tanahnya berbeda. Inilah yang dapat

disebut sebagai rasionalitas mereka dalam memaknai dan menegaskan kepentingan mereka sendiri.

Dan rasionalitas ini berbeda dengan rasionalitas gerakan yang mereka lakukan secara bersama dalam mengusir operasi penambangan pasir. Seperti dijelaskan oleh Lasminto, kehadiran penambangan pasir jelas mengganggu upaya sistematis gerakan mereka untuk memperjuangkan kembalinya tanah ini pada petani Sumberanyar. Dan menurutnya gangguan ini jelas bersumber dari TNI AL yang sama sekali tidak rela melepaskan lahan yang telah mereka kuasai sekian lama. Gerakan pengusiran oleh karenanya menjadi gerakan yang bersifat politis guna menunjukkan pada TNI AL bahwa mereka masih mempunyai kekuatan untuk melawan. Tapi bagi para pembeli petok D 'palsu', mengusir penambang pasir adalah mengusir ketidakamanan masa depan mereka atas tanah yang mereka kuasai.

Kasus di atas menggambarkan berjumpanya anasir tindakan ekspressif, mengikuti **Landsberger**, dengan anasir tindakan instrumental. Perjumpaan ini kurang lebih menegaskan bahwa kedua anasir ini bukanlah dua kutub yang berlawanan, hingga semakin instrumental suatu tindakan makin kurang ekspressif jadinya. Ini hanya menunjukkan terdapat dua dimensi yang berbeda dalam suatu gerakan. Jadi, orientasi instrumental yang digambarkan dalam kesempatan kasus di atas menjelaskan bahwa rasionalitas masyarakat dalam

suatu perlawanan tidak harus selalu paralel dengan motivasi-motivasi gerakan secara keseluruhan. Masyarakat selalu menemukan ruangnya sendiri dalam mengekspresikan kepentingan individualnya sebagai manusia yang rasional.

Hanya tidak dalam semua kasus kedua anasir ini bertemu. Pada kasus berikut ini didapati bahwa tindakan instrumental dalam sebuah perlawanan boleh jadi berbeda secara tajam dengan orientasi ekspresif yang ditunjukkan dalam kolektifitas. Kasus tersebut berkaitan dengan strategi gerakan dalam mengumpulkan sumber daya mereka pasca aksi pendudukan lahan. Ketika masyarakat mulai menanam lahan yang mereka kuasai dengan tanaman jagung dan kacang-kacangan, selang tiga bulan berikutnya mereka sudah dapat memetik hasilnya. Dijelaskan oleh Purwo Eko, demi menunjukkan bahwa hasil panen ini adalah makanan pokok yang sangat dibutuhkan (sebagai etnik madura, jagung adalah di antara makanan pokok mereka), maka diatur agar hasil panen tidak dijual tapi dinikmati sendiri. Di samping itu, hasil panen mereka jauh dari dikatakan bagus, "*Maklum, petani anyaran!*", kata Purwo Eko. Kalau hasil panen yang jelek ini diketahui oleh TNI AL dikuatirkan akan menimbulkan kesan bahwa mereka hanya tahunya menduduki lahan tapi tidak bisa menanam.

Aturan ini terus disosialisasikan oleh sebagian pengurus FKTS kepada segenap masyarakat. Tidak ada suara yang menentang, hanya diam-diam

banyak dari mereka tetap menjual hasil panennya kepada para tengkulak. Alasan mereka dikemukakan secara tepat oleh Sumarji “*Atene gak didol yopo, wong kene butuh duwek, piro-piro ae yo tak terimo!*” (Mau tidak dijual gimana, wong kita butuh uang, berapapun harganya ya saya terima).

Akhirnya, kesadaran ekspresif yang menghimpun tindakan bersama petani Sumberanyar dalam menggerakkan perlawanannya sesungguhnya berujung pada aksi pendudukan lahan itu sendiri. Bilamana tanah garapan yang mereka idam-idamkan telah dapat mereka kuasai, itu artinya tujuan mendasar dari sebuah gerakan perlawanan sepenuhnya telah tercapai. Pada tingkat ini, pengorganisasian gerakan di Sumberanyar menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang paling mampu mengelola kesadaran perlawanan masyarakat. Pada tingkat selanjutnya, kepentingan material mereka yang berbasis pada tanah yang telah diduduki tersebut akan tampak lebih mengedepan dalam merasionalkan tindakan-tindakan individual mereka dalam konteks gerakan. Sebuah tindakan bersama yang terorganisir akan mendapatkan konformitas masyarakat sepanjang tidak mengganggu kepentingan-kepentingan mereka secara khusus.

#### 6.1.4. Serangan Langit atau Bumi

Konteks gerakan yang dibangun di Sumberanyar adalah gerakan masyarakat, dengan demikian melibatkan sejumlah besar penduduk di desa itu. Kehadiran organisasi dalam perjuangan mereka tidak membuat gerakan mereka memiliki spektrum yang lebih sempit dan hanya sekadar gerakan sebuah organisasi. Karena itu, tubuh gerakan mereka tidak secara *rigid* terdiri dari pegiat-pegiat organisasi ini namun meluas menjadi gerakan masyarakat desa.

Walau diketahui tidak seluruh masyarakat desa Sumberanyar mengakui keberadaan organisasi ini atau terlibat dalam gerakan ini, tapi sekurangnya gerakan yang mereka gelorakan sepertinya mampu menegaskan posisi politik masyarakat di desa Sumberanyar secara keseluruhan. Bukan logika keterwakilan yang membuat gerakan ini menjadi besar namun efek yang ditimbulkan oleh gerakan membuatnya mampu mengonsolidasikan dirinya sebagai gerakan seluruh masyarakat Sumberanyar.

Ia bukan pula gerakan atau perjuangan hukum meski basis material gerakan mereka adalah tanah sebagai objek hukum. Akhir perjuangan mereka yang diorientasikan pada kembalinya hak tradisional mereka atas tanah pada dasarnya dapat ditempuh lewat pencarian keadilan di pengadilan, sebagaimana yang ditawarkan oleh pengacara Budi. Tetapi pilihan ini tidak diambil oleh mereka.

Pengalaman traumatik yang ditorehkan Sumardi dapat disebut sebagai awal ketidakpercayaan mereka pada jalur hukum. Sebagai antek seorang pengacara tentu saja Sumardi menawarkan jalur hukum bagi perjuangan mereka. Seperti diungkap di atas, peran Sumardi ternyata menimbulkan persoalan serius, tawaran jalur hukum yang dibawanya patut dipertanyakan keampuannya. Komentar Muhdlori menggambarkan hal ini:

*"Yoopo ate percoyo nang hukum nek carane koyok ngono, masyarakat ditariki terus-terusan tapi hasile ndak ono, jarene sek suwe. Nek koyo ngene masyarakat selak nggak serantan!"* (Bagaimana mau percaya pada hukum kalau caranya seperti itu, masyarakat dimintai pungutan terus menerus namun hasilnya nggak ada, katanya masih lama. Kalau seperti ini keburu masyarakat habis kesabarannya!)

Ketidaksabaran adalah kata kunci mengapa mereka mengesampingkan jalur hukum. Kesadaran akan perubahan situasi yang lebih memberi kesempatan mereka untuk menuntut hak-hak mereka kembali dan segera keluar dari penderitaan panjang tidak akan mampu diwadahi oleh proses yang lama dan rumit. Secara praksis seakan mereka hendak mengatakan bahwa momentum perubahan harus segera direbut sebelum ia kembali sirna. Karenanya, jalan lain yang lebih masuk akal adalah merebut tanah itu dulu dalam sebuah gerakan masyarakat yang cepat dan massif, persoalan bukti-bukti dan segala macamnya dapat menyusul belakangan.

Oleh sebab itu, aksi pendudukan lahan adalah manifestasi langsung dari kerangka kesadaran di atas. Aksi pendudukan lahan menjadi pilihan terbaik

dalam menegaskan kebutuhan mereka akan perbaikan hidup dan perubahan nasib serta mengartikulasikan kekuatan mereka secara politik di hadapan negara, militer maupun pihak perkebunan.

Aksi pendudukan lahan ini tentu saja tidak berdiri sendiri sebagai sebuah gerakan. Ia menyangkut segenap aktifitas-aktifitas perlawanan yang telah muncul secara diam-diam seperti pencurian, pembakaran dan pembabatan tebu ataupun pengrusakan lewat penebaran hama. Aksi-aksi perlawanan model ini menjadi pra kondisi dan menemukan sumbu ledaknya dalam aksi pendudukan lahan tersebut. Dengan begitu, gerakan petani di desa Sumberanyar telah menemukan konteksnya sebagai sebuah perlawanan dalam konjungtur dan sejarah perlawanan petani di Indonesia. Dalam bahasa Purwo Eko, gerakan yang mereka lakukan ini ia sebut sebagai 'serangan bumi',

".....ini namanya *serangan bumi*, yaitu dengan cara melakukan reclaiming, sebelum itu dilakukan penggemosan, bagaimana tanaman yang ditanam oleh KGA supaya tidak jalan, setelah serempak dan menjaga kemungkinan yang terjadi maka terjadilah reclaiming, dan sampai sekarang dianggap lancar, berkat kebersamaan yang kompak"

Dengan menyebut gerakan mereka sebagai serangan tampaknya dimaksudkan bahwa mereka betul-betul hendak melawan kepentingan TNI AL dan perkebunan yang telah merampas hak atas tanah mereka, karenanya mereka merasa absah menyerang dan merebut tanahnya. Istilah bumi dapat menunjuk tiga hal, *pertama*, ia menunjuk pada tanah yang mereka rebut kembali. *Kedua* adalah bahwa gerakan ini dilakukan oleh masyarakat lapisan

bawah dengan segenap kepentingannya untuk membedakan dengan istilah langit yang menunjukkan lapisan atas masyarakat. *Terakhir*, istilah ini menunjuk level bawah gerakan yang secara praksis melakukan aksi-aksi politik perlawanan langsung yang berbeda dengan gerakan langit yang menunjuk pada level gerakan politik tingkat tinggi.

Dalam konteks gerakan di desa ini, makna yang disebut terakhir lebih mampu menjelaskan posisi gerakan mereka dan bagaimana gerakan ini berjalan. Pengandaian akan level gerakan dapat mencerminkan dua spektrum gerakan yang terdapat di desa Sumberanyar. Sebagai sebuah gerakan petani, partisipasi dari sejumlah besar petani adalah syarat mutlak. Ia harus melibatkan dan menghimpun berbagai kepentingan berikut kesadaran mereka sendiri-sendiri dalam sebuah kolektifitas tindakan dan harapan akan hasil perjuangan yang dapat diraih secara bersama. Aksi pendudukan lahan yang telah mampu menggerakkan mereka secara serempak adalah contoh yang tepat bagaimana sebuah gerakan mengelola kolektifitasnya.

Pada spektrum yang berbeda, posisi gerakan mereka bersama dengan gerakan-gerakan masyarakat di desa-desa lain, khususnya di Jawa Timur, telah mampu membangun kesadaran bersama terhadap posisi politik mereka. FKTS memang telah membangun jaringan dengan masyarakat-masyarakat kasus lain di Jawa Timur di bawah payung LBH Surabaya. Kesadaran akan posisi politik

ini dengan sendirinya memunculkan pula gerakan-gerakan yang lebih meluas yang dapat dipandang sebagai sebuah gerakan politik. Spektrum ini disebut sebagai *serangan langit*.

Dengan mengambil dua spektrum gerakan, beberapa keuntungan didapatkan. *Pertama*, kesadaran petani Sumberanyar sendiri dalam mengorganisir tindakan mereka sebagai tindakan bersama dapat dimunculkan dan dikelola dalam konstruk gerakan. Kekompakan dan kebersamaan menjadi ruh dan semangat dalam mengonsolidasi gerakan. Pada titik ini petani Sumberanyar telah berhasil mendapatkan keuntungan dari kekompakan tindakan bersama, sekurang-kurangnya adalah keberhasilan mereka menguasai lahan dan menanaminya kembali. *Kedua*, beberapa penduduk Sumberanyar, utamanya pengurus FKTS, mendapatkan manfaat secara khusus dari jaringan yang mereka bentuk dengan terlibat dalam berbagai pertemuan, baik skala regional maupun nasional, sehingga mereka mempunyai kesempatan belajar lebih banyak.

*Terakhir*, mereka mendapatkan solidaritas dan bantuan atas jaringan yang mereka bangun sehingga kekuatan politik mereka tidak lagi dilihat dalam skala yang sangat kecil, yaitu Sumberanyar, namun jauh meluas sebagai kekuatan politik petani di Jawa Timur. Dengan begitu, kasus mereka akan lebih mudah diangkat sebagai sebuah isu regional atau bahkan nasional yang tidak

hanya akan melibatkan mereka sendiri tetapi juga dapat menggandeng simpati dan sentuhan dari kekuatan-kekuatan strategis lainnya.

#### **6.1.5. Peran Elit dan Aktor Aktivistis Ornop**

Kehadiran H Mustofa atau Gus Tofa dalam gerakan perlawanan petani Sumberanyar memberikan arti tersendiri sekaligus menorehkan warna yang dominan bagi pengorganisasian gerakan di desa ini. Posisi kepemimpinan yang diperankan oleh Gus Tofa adalah faktor penguat dan pemersatu petani Sumberanyar dalam kolektifitas tindakan mereka. Menurut pengakuan Mahmud, kata-kata tokoh ini begitu sulit dibantah dan sering menjadi aturan itu sendiri. Ketokohan yang ditunjukkan dari predikat 'Gus', julukan penghormatan bagi anak kyai, mampu menebarkan kharisma yang sangat dipercayai oleh masyarakat Sumberanyar. Walaupun ia tidak hadir sebagai tokoh agama, malah lebih mengesankan sebagai pedagang kaya, masyarakat seakan memperoleh keteguhan keagamaan dan ikatan komunalnya dari sosok ini.

Ia sesungguhnya tidak sendirian sebagai orang yang dijuluki 'Gus' di Sumberanyar. Terdapat seorang lagi tokoh agama bernama Gus Asnawi yang justru mempunyai sebuah pesantren di Sumberanyar, tepatnya di sebelah selatan jalan. Masyarakat Sumberanyar juga melihat sosok ini sebagai tokoh

agama, selain sebagai pemangku pesantren ia juga dikenal sebagai penceramah agama. Hanya saja, wilayah yang ia rambah dalam kegiatan ceramah agamanya sama sekali tidak termasuk wilayah penduduk Sumberanyar di sebelah utara jalan. Hal ini sedikit menunjukkan jarak yang ia ciptakan sendiri dengan masyarakat di sana. Kendati begitu, ketokohan keagamaannya sama sekali tidak berkurang. Beberapa penduduk Sumberanyar Lor, misalnya, menyerahkan pendidikan anaknya pada si 'Gus' ini.

Posisi kedua 'Gus' ini menjadi berbeda saat menyangkut pandangan dan keberpihakan keduanya dalam sengketa tanah di Sumberanyar. Meski bukan orang yang terlibat sejak awal dalam sengketa tanah ini, posisi Gus Tofa sedemikian jelasnya bagi para petani yang secara tegas membela kepentingan mereka, bahkan tokoh inilah yang menggerakkan pengorganisasian gerakan di sana. Sebaliknya, Gus Asnawi sama sekali tidak menunjukkan keberpihakannya. Dikatakan, kerap kali dalam pengajian-pengajiannya, ia mempertanyakan kekuatan legal dan normatifitas tindakan masyarakat dalam merebut tanah "milik" TNI AL itu. Perbedaan posisi ini dengan sendirinya memetakan keduanya secara diametral. Sudah barang tentu, petani yang melibatkan dirinya dalam gerakan perebutan lahan akan sangat dekat dengan Gus Tofa daripada Gus Asnawi. Yang disebut terakhir terkesan agak dijauhi

penduduk Sumberanyar lor, meski sekali lagi tidak sampai mempuskan ketokohan keagamaannya.

Sekilas paparan di atas menggambarkan betapa posisi elit dalam sebuah gerakan perlawanan akan sangat menentukan pandangan, sikap dan ketundukan petani pengikut gerakan. Elit yang mendukung tentu akan mendapatkan ketundukan yang hampir-hampir paripurna daripada elit yang tidak mendukung. Modal yang dimiliki elit seperti ini sangat berguna dalam menunjukkan kredibilitas kepemimpinannya. Kesadaran perlawanan petani menjadi tampak nyata karena kepemimpinan dan caranya dalam mengelola kesadaran, sehingga dengan mudah diikuti.

Peran penting dalam gerakan yang sangat membutuhkan sentuhan kepemimpinan tokoh ini adalah bagaimana menghimpun kekuatan petani menjadi sebuah kekuatan perlawanan dan bagaimana sebuah gerakan dapat diatur secara strategis. Kedua fungsi ini menjadi sangat penting mengingat kekuatan lawan yang mereka hadapi sangatlah besar dan terikat penuh dengan kepentingan-kepentingan yang jauh lebih luas daripada kepentingan mereka sendiri. Mereka yang hanya sebuah komunitas lokal dan sama sekali belum berpengalaman dalam membangun organ-organ gerakan yang harus melawan sebuah kekuatan yang di belakangnya ada kepentingan militer, negara dan pemodal besar yang tentu saja mempunyai uang, senjata dan kebijakan-

kebijakan politik. Kepandaian dan kredibilitas seorang pemimpin dalam mengelola gerakannya benar-benar diuji dalam situasi seperti itu.

Peran yang begitu strategis di atas nyatanya mampu dijalani dengan baik oleh Gus Tofa. Peran sentral yang dimainkannya ini dapat tergambar dari proses-proses yang ia lalui dalam mendampingi gerakan di desa ini. Menurut pengakuannya sendiri, ia pada awalnya bukanlah orang yang begitu peduli pada nasib penduduk Sumberanyar Lor sejak sekian lama. Ia sendiri, meski asli Sumberanyar dari garis ibunya, baru berdiam di desa ini sekitar tahun 1990 untuk menempati rumah warisan kakeknya. Orang tuanya sejak lama telah tinggal di kota Pasuruan, memangku sebuah pesantren di sana. Di desa ini walaupun ia sudah dikenal sebagai seorang Gus, ia belum menyadari betul apa sesungguhnya yang dihadapi oleh masyarakatnya hingga ia belum tergerak untuk membantu mereka. Sampai pada suatu hari ia kedatangan Mahmud yang meminta kesediaannya untuk membantu mereka dalam memperjuangkan tanahnya. Dengan berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk melibatkan diri dalam gerakan masyarakat Sumberanyar.

Dari sisi pengorganisasian kesadaran petani sendiri dan berbekal kredibilitas yang ia bangun, tampak dia cukup mampu mengelola gerakannya dengan berhasil menjaring sebagian besar petani Sumberanyar bergabung bersamanya. Ketepatannya memilih *langgar* (musholla di kampung) sebagai

tempat melakukan konsolidasi menjadi begitu penting, dengan begitu ia sekaligus bisa menyentuh rasa keberagaman masyarakat yang semakin mendapatkan ketentraman batin bahwa gerakan mereka tidaklah keluar dari jalur keagamaan. *Langgar* juga dianggap sebagai wilayah yang suci, jauh dari niat-niat busuk pribadi, sebuah cara untuk mengingatkan mereka bahwa gerakan mereka berbeda jauh dengan apa yang telah mereka alami bersama Sumardi.

Bagi petani Sumberanyar pengikut gerakan sendiri, sosok Gus Tofa adalah jaminan keberhasilan gerakan mereka, seperti kata Buraji "*nek gak ono Gus Tofa, mboh dadi opo gerakan ndek Sumberanyar iki!*" (Kalau tidak ada Gus Tofa, entah jadi apa gerakan di Sumberanyar ini). Atau kata-kata Kholil "*Saya yakin, kalu seorang 'Gus' tidak akan membohongi dan makan uang rakyat untuk perjuangan. Saya memang tidak kenal Gus Mustofa, tetapi seorang 'Gus' pasti baik*". Petikan-petikan pernyataan semacam ini dapat dengan mudah digali untuk menyatakan kekaguman pada tokoh ini. Sebegitu berpengaruhnya peran tokoh ini hingga tidak ada satu kalimat pun yang terbuka diucapkan untuk menyatakan semacam ketidaksetujuan atau lainnya atas keputusan-keputusannya. Terlebih bagi para pengurus FKTS, kehadiran Gus Tofa adalah penyelamatan gerakan mereka. Terdapat semacam keyakinan

bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Tofa tidak akan pernah menjerumuskan mereka.

Secara lebih khusus, cara pandang Mahmud terhadap Gus Tofa berbeda dari yang lain. Ia adalah salah seorang pengurus FKTS yang lain dan anak muda inilah yang pertama kali mengambil inisiatif melibatkan Gus Tofa dalam gerakan mereka. Melibatkan Gus Tofa adalah di antara kecermatan dan kecerdikan Mahmud melihat faktor kepemimpinan tradisional yang bisa dimanfaatkan dari Gus Tofa demi kelanjutan gerakan perlawanannya. Mahmud bukanlah orang yang punya akses yang luas terhadap berbagai informasi dan kekuatan gerakan di luar desanya. Hanya ia seperti mempunyai pemikiran bahwa sebuah gerakan sangat memerlukan kepemimpinan yang efektif, dan ini bisa didapatkan dari seorang pemimpin tradisional yang bisa diperankan oleh Gus Tofa. Meskipun akhirnya ia harus menjadi subordinat dari tokoh ini.

Hanya rasionalitas yang ia bawa membuatnya tidak secara absolut tunduk pada kepemimpinan tokoh ini. Pada level bagaimana tokoh ini menghimpun kolektivitas tindakan petani Sumberanyar, ia akan lebih banyak menunjukkan konformitasnya demi menempatkan kepemimpinan tokoh ini yang sangat bermanfaat pada gerakan. Namun pada level bagaimana tindakan-tindakan individu dapat dikelola untuk tetap berada dalam garis gerakan, ia lebih banyak bertindak sendiri di luar pengetahuan Gus Tofa. Ia merasa

dirinyalah yang paling banyak tahu perihal petani Sumberanyar berikut segenap penderitaan mereka dan pengalaman perlawanan yang ia sendiri telah sejak awal terlibat. Bahkan ia menyebut dirinya adalah di antara sebagian kecil orang yang pertama kali mempunyai kesadaran perlawanan secara terbuka, yang tentu saja bukan termasuk Gus Tofa.

Contoh kasus dalam hal ini di antaranya adalah persoalan penambangan pasir di atas. Ia sudah lama tahu bahwa di masyarakatnya telah beredar pethok D palsu dan di sisi lain terdapat penjualan pethok D yang sama pada investor penambangan pasir, sesuatu yang belum diketahui oleh Gus Tofa. Bersama Purwo Eko, tanpa berkoordinasi dengan tokoh ini ia segera saja mengorganisir petani melakukan aksi pengusiran penambang pasir. Ia sendiri sudah memperhitungkan anarkhisme yang dapat muncul dari aksi ini. “Biar mereka tahu bahwa kita masih punya kekuatan”, tegasnya. Karena perhitungannya ini pula ia berpikir untuk tidak perlu melibatkan tokoh ini, “Kalau diungkapkan aksi ini akan anarkhis pasti dilarang oleh Gus Tofa”, tegasnya lagi.

Sementara itu, masuknya LBH Surabaya dalam gerakan mereka cukup memberikan pengaruh yang berarti bagi pengorganisasian perlawanan menghadapi TNI AL. Pengalaman yang begitu banyak dan jaringan yang begitu luas sebagai sebuah organisasi bantuan hukum berhadapan dengan negara, memudahkan LBH Surabaya dalam memberikan berbagai pertimbangan

menyangkut sengketa tanah yang sedang mereka hadapi. Namun yang sangat memudahkan mereka memasuki petani Sumberanyar tidak lain adalah peran Gus Tofa. Tokoh inilah yang pertama kali berhubungan dan membangun komitmen dengan LBH untuk membantu perjuangan di desanya. Secara tepat Gus Tofa memperkenalkan LBH pada petani Sumberanyar sebagai orang-orang yang akan membantu mereka tanpa adanya pungutan. Sekali lagi wacana tentang uang direproduksi untuk memuluskan jalan masuknya lembaga ini.

Dari wacana soal uang, LBH juga mampu mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian hukum kasus mereka. Dikatakan bahwa bagaimanapun kasus mereka tidak akan menang di pengadilan selama sistem hukum dan sistem politiknya tidak berpihak pada para petani. Satu-satunya jalan adalah melakukan gerakan politik dengan merebut tanah yang disengketakan, yang disebut *reclaiming*, sebagai sebuah pernyataan politik petani akan hak-hak tradisionalnya atas tanah mereka sendiri.

Wacana di atas disampaikan dalam berbagai forum yang diselenggarakan di beberapa dusun di Sumberanyar yang kemudian diformulasikan sebagai "*Sekolah Rakyat*". Bagi petani Sumberanyar seperti Pak Latif, forum ini lebih tepat disebut sebagai "*sekolah pengalaman*". Sebab dari pertemuan seperti itu, berbagai informasi tentang gerakan dan kondisi negeri ini didapatkan sebagai sebuah pengalaman yang barangkali akan

berguna bagi gerakan mereka. Ini artinya, tidak banyak yang bisa dimanfaatkan oleh petani sendiri secara langsung dari pertemuan-pertemuan seperti itu, walaupun ada barangkali hanya semacam memberikan “kabar baik” bahwa persoalan yang mereka hadapi menjadi isu yang merambah luas melampaui batas-batas desanya serta solidaritas yang telah dibangun begitu rupa melingkupi banyak wilayah dan banyak petani yang mengalami persoalan serupa.

Dengan kata lain, kehadiran aktor aktivis Ornop di Sumberanyar, seperti para aktivis LBH ini, tidak berhubungan langsung dengan kesadaran perlawanan petani Sumberanyar sendiri. Kehadiran ini hanya dapat dirasakan secara tidak langsung melalui pemimpin tradisional mereka serta elit-elit organisasi. Kedatangan para aktivis ini lebih layak dipandang sebagai tamu, tamu yang mendukung gerakan mereka tentunya, daripada menjadi bagian penting dari gerakan mereka.

Hanya elit-elit organisasi tampaknya yang paling banyak menanggung manfaat dari keterlibatan para aktivis ini. Mahmud yang pada awalnya sama sekali tidak mengetahui jaringan-jaringan gerakan petani kini sangat fasih berbicara tentangnya, Purwo Eko yang tidak mengenal istilah resolusi konflik tiba-tiba dengan lancar menjelaskannya, atau Lasminto yang merasa bodoh tidak tamat SD sekarang pandai beradu argumentasi. Disebutkan bahwa

pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh LBH ini menjadi semacam sekolah gratis bagi elit-elit organisasi itu. Rasionalitas yang mereka bangun tidak lagi sebuah rasionalitas yang sederhana tetapi telah sarat dengan berbagai pengetahuan dan strategi. *“Saya telah mampu bagaimana menghadapi orang-orang Angkatan Laut dan mengatur pertikaian di masyarakat setelah reclaiming dengan menggunakan resolusi konflik”*, kata Purwo Eko dengan bangga.

Apapun pengetahuan yang didapatkan elit-elit organisasi itu tidak ditransfer secara mentah kepada para petani. Pengetahuan lebih menjadi semacam asset bagi mereka dan akan sangat bermanfaat bagi peran-peran mereka dalam pengorganisasian. Semakin sedikit pengetahuan seseorang dalam kerangka sebuah gerakan perlawanan maka perannya di dalam gerakan juga makin tidak penting dan kurang menentukan. Di sisi lain, petani Sumberanyar pengikut gerakan ini sendiri melihat elit-elit tersebut sebagai orang-orang yang bertugas memberi informasi pada mereka menyangkut apa saja yang harus mereka lakukan, kapan mereka harus keluar melakukan pergerakan, menghadiri rapat-rapat dan dalam beberapa hal sebagai orang yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.

Di atas semua itu, bagi petani Sumberanyar pengikut gerakan ini, apapun dan bagaimanapun peran-peran yang dimainkan oleh pemimpin

tradisional mereka, elit-elit organisasi ataupun aktor-aktor seperti aktivis LBH tidaklah menjadi faktor determinan yang mencampuri terlalu jauh rasionalitas yang mereka pelihara sendiri atas dasar kepentingan-kepentingan individual mereka. Bagi seorang seperti Pak Latif, Gus Tofa meskipun kaya tapi baik hati, ia mau memperhatikan nasibnya yang miskin itu dan mau memperjuangkan agar ia bisa mendapatkan tanahnya kembali, *“tapi engko’ tak taho lakonna Gus Topa, poko’en engko’ bisa tanem polleh”* (tapi saya tidak mengerti peran apa yang dilakukan oleh Gus Tofa, yang penting saya bisa menanam lagi).

Atau bagi Nurbai, Lasminto adalah orang yang menyuruhnya keluar malam-malam untuk membabat tebu dan menyuruhnya pula bersama yang lain menduduki lahan perkebunan. *“engko’dibi’ seh ngatur etanemi apa tanah riyah”* (saya sendiri yang mengatur mau ditanami apa tanah itu). Ia juga berujar;

*“je’ Las neka seh nglarang ajuel jegung, eperintah mbik Gus Topa ca’en, tapi engko’ tak endhik pese... ye ejuel bei mbik engkok!”* (memang Lasminto yang melarang menjual jagung, diperintah oleh Gus Tofa katanya, tapi karena saya tidak punya uang... ya saya jual!).

## 6.2. Pengorganisasian Gerakan di Sumberanyar

Dalam wacana tentang organisasi modern disebutkan bahwa organisasi dimaknai sebagai suatu pengelompokan sosial yang mempunyai struktur pola dan pengendalian tertentu guna mencapai suatu tujuan (Etzioni, 1985: 5). Rigiditas organisasi yang ditunjukkan dalam definisi di atas mempersyaratkan adanya pembagian pekerjaan, kekuasaan dan tanggungjawab dalam suatu komunikasi. Ia sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha dalam mewujudkan tujuan tertentu. Selain itu, ia menghendaki adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Sistem keanggotaan yang ketat dan sirkuler merupakan bagian penting pula dalam organisasi.

Keberadaan FKTS sebagai organisasi perlawanan petani melampaui apa yang disebut organisasi dalam definisi di atas. Artinya, konstruksi organisasi demikian tidak cukup menjelaskan keberadaan dan apa yang dilakukan oleh organisasi semacam FKTS. Sebagai sebuah organisasi perlawanan, FKTS tidak dalam posisi yang mewakili secara penuh kepentingan petani. Petani selalu mendapatkan ruang tersendiri untuk mengekspresikan kepentingannya yang tidak harus sejalan dengan organisasi.

Pada banyak hal, sebagai organisasi, FKTS memang mendapatkan konformitas petani terhadap apa yang dilakukannya, hanya saja konformitas ini mengandung berbagai *bias* menyangkut kepercayaan petani terhadap organisasi. Sosok Gus Mustofa atau Gus Tofa sebagai pemimpin dan tokoh panutan adalah di antara *bias* itu. Posisi tokoh ini yang kuat dan sangat berpengaruh terhadap para petani akan sedikit membingungkan posisi organisasi bagi para petani itu sendiri, misalnya ketika muncul pertanyaan “*Apakah kegiatan ini sudah disetujui Gus Tofa?*”, atau pertanyaan “*Bagaimana pendapat Gus Tofa tentang hal ini?*”. Proses-proses organisasional menjadi tidak penting, namun jauh lebih penting adalah konformitas Gus Tofa.

Sebagai sebuah organisasi perlawanan, tentu saja FKTS melibatkan kolektifitas-kolektifitas petani menyangkut visi masa depan petani sebagai sebuah tujuan gerakan. Tindakan bersama yang hendak dimunculkan dari para petani menjadi titik krusial di mana organisasi dapat mengukur kekuatannya sendiri untuk menciptakan perlawanan. Tanpa itu, organisasi akan gagal memaknai gerakannya sebagai suatu perlawanan petani. Kendati begitu, kebutuhan-kebutuhan material petani dan kesadarannya tentang hak-hak mereka sendiri kerap menjadikan organisasi gagal menemukan kebutuhan masing-masing petani yang sesungguhnya. Keluhan-keluhan yang bersifat

personal tentang kesulitan hidup, problem partisipasi dan komunikasi maupun konflik-konflik kecil di antara mereka kurang mampu tercerap ke dalam bingkai gagaasan tentang tindakan bersama dan kekompakan.

Jadi, apapun mekanisme yang hendak dijalankan oleh organisasi tidak seluruhnya mampu menundukkan rasionalitas yang dibangun sendiri-sendiri oleh para petani. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo:

Sambil organisasi mengambil akar di massa, kadang-kadang juga digunakan oleh kaum tani, seperti dalam kasus Tjimamere, untuk mencapai tujuan mereka sendiri, yang dalam beberapa hal berbeda jauh dengan tujuan para pemimpinnya. (Kartodirdjo, 1972: 117; dikutip dalam Scott, 1993: 136)

Oleh sebab itu, memahami peran yang dimainkan oleh FKTS sebagai organisasi perlawanan petani tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat bagaimana cara-cara organisasi itu bekerja. Namun lebih jauh dari itu, ia harus dipahami dalam kerangka gerakan sosial itu sendiri dan cara-cara petani sendiri melibatkan dirinya dalam sebuah gerakan yang terorganisir. Pada gilirannya, organisasi semacam FKTS bukanlah sesuatu yang *rigid* dan selesai, tapi ia lebih menjelma sebagai suatu proses dan gerak yang sangat tergantung pada pemaknaan para petani yang berpartisipasi di dalamnya dan refleksi tindakan mereka sehari-hari. Dengan demikian, penggunaan istilah pengorganisasian petani dalam mengenali gerakan-gerakan petani yang terorganisir sepertinya lebih relevan dan fleksibel daripada mengacu pada istilah-istilah organisasi atau asosiasi pada umumnya. Giddens menegaskan;

Hubungan antara organisasi dan gerakan sosial berbanding terbalik dengan bentuk-bentuk asosiasi yang lain. Perbedaan antara asosiasi di satu sisi dengan organisasi dan gerakan di sisi lain terletak di dalam cara-cara mereproduksi hubungan-hubungan antara agen dan struktur. Di dalam asosiasi, reproduksi sosial terjadi lewat praktek-praktek teratur dari para agen yang berpengetahuan yang terlibat di dalam asosiasi tersebut. Sedangkan organisasi dan gerakan sosial merupakan kolektifitas-kolektifitas tindakan sehari-hari yang berkelanjutan dari para agen sebagai ruang bagi munculnya aturan-aturan yang bersifat reflektif dari suatu sistem reproduksi (Giddens: 1989, 200).

### **6.2.1. Karakter Pengorganisasian Petani di Sumberanyar**

Pada semua bentuk perlawanan terbuka, kolektifitas tindakan merupakan titik signifikan dan menjadi karakter dasar sebuah gerakan. Ini sangat dibutuhkan untuk membedakan antara tindakan-tindakan yang epifenomenal, kecil-kecil dan sporadis, seperti keributan yang spontan, dengan gerakan-gerakan yang lebih massif dan terorganisir. Kenyataan bahwa kekuatan masyarakat tidak dengan sendirinya dapat terhimpun menjadi sebuah gerakan yang massif, menunjukkan bahwa peran dari proses-proses pengorganisasian dalam mengagregasikan kekuatan-kekuatan masyarakat tersebut menjadi cukup penting.

Pengorganisasian diperlukan ketika segenap sumber daya yang dimiliki oleh petani tidak cukup membantu menciptakan sebuah perlawanan terbuka menghadapi kekuatan yang dalam segala hal unggul, tanpa adanya suatu tindakan bersama yang terorganisir. Lebih dari itu, untuk memberikan efek jangka panjang dari gerakan, bukan sporadis dan epifenomenal, dibutuhkan

ketahanan bersama dalam menjaga stamina gerakan menghadapi tantangan-tantangan struktural yang hanya bisa dilakukan lewat pengorganisasian. Seperti disebutkan oleh Charles Tilly bahwa sebuah gerakan sosial bagaimanapun harus lebih tahan dari benturan sesaat, mengejar cita-cita yang lebih luas daripada sekadar pembangkangan (Tilly, 297-317, dikutip dari Scott, 1993: 321).

Pada kasus gerakan sosial di Sumberanyar, ketika masyarakat di sana sadar akan kepentingan dan identitas mereka bersama dan ketika mereka secara sadar pula memperjuangkan serangkaian perubahan-perubahan yang berbasis pada tanah, pada saat yang sama pengorganisasian gerakan sosial di desa ini memberikan peran yang signifikan. Sebab, individu-individu tidak dapat secara magis dimobilisir untuk bertindak, betapapun dalamnya rasa penderitaan, kegetiran dan kemarahan mereka. Harus ada semacam pengorganisasian yang siap untuk menghimpun rasa penderitaan ini dan menerjemahkannya ke dalam tindakan-tindakan kolektif. Kalau tidak, mereka yang terus dirundung penderitaan ini harus tetap duduk menunggu di pinggiran.

Sejak dimulainya episode baru dalam kehidupan masyarakat Sumberanyar, yaitu saat wacana tentang perubahan terus bergulir mengusik kesadaran mereka untuk merebut kembali hak-hak sipil dan tradisional mereka atas tanah di tumpah darah mereka sendiri, pelan namun pasti sebuah operasi

pengorganisasian telah bekerja. Secara sederhana, ada beberapa tahap proses penyadaran, wacana yang berkembang, dan instrumen yang dipakai dalam pengorganisasian gerakan mereka. Pada *tahap awal*, wacana kekecewaan para petani akibat ulah si Budi, yang selama ini dianggap berusaha mengeruk uang dari masyarakat merupakan titik masuk yang tepat. Memosisikan diri pada tahap awal ini sangat penting, untuk mencari legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat.

*Tahap kedua*, bisa disebut sebagai tahap transisi, di mana dalam pengorganisasian dimunculkan sebuah garis tegas dan pemisah bentuk gerakan atau perjuangan yang sedang digalang di desa mereka dari bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Misalnya dengan menyampaikan bahwa perjuangan lewat pengadilan akan selalu gagal. Isu ini tentu akan meminggirkan peran-peran orang semacam Budi sebagai pengacara, sekaligus *counter* terhadap wacana yang dibawa oleh AL yang selalu mengajak ke pengadilan. Dengan isu ini pula masyarakat dijauhkan dari pengaruh orang-orang yang disebut “ndak bener”. Hanya perjuangan yang tidak menarik uang dari masyarakat untuk kepentingan pribadi itulah yang benar. Yang merasakan penderitaan bersama dan terlibat secara bersamalah yang merupakan pejuang sejati. Proses dari semua ini bermuara pada satu tujuan, yaitu bahwa berjuang lewat organisasi adalah pilihan yang tepat dan efektif.

*Tahap ketiga* adalah tahap pembentukan organisasi. Musholla dipilih sebagai tempat bersejarah mereka untuk membentuk organisasi. Suasana khidmat, dan adanya “legitimasi agama” tampaknya diharapkan akan membuat masyarakat semakin yakin akan keberhasilan gerakannya. Musholla juga dianggap sebagai wilayah yang suci, jauh dari niat-niat busuk pribadi. Forum yang dihasilkan dari tempat ini, pertama kali adalah FKMS (Forum Komuniiasi Masyarakat Sumberanyar). Namun kemudian nama ini berubah menjadi FKTS (Forum Komunikasi Tani Sumberanyar). Tidak muncul alasan yang bersifat kategoris dalam perpindahan kata “masyarakat” menjadi “tani”, kecuali ditemukan kesamaan singkatan dengan organisasi lain. Organisasi ini dirancang sebagai sebuah organisasi yang dapat bergerak ulet menghadapi tekanan-tekanan pihak AL dan juga kuat ke dalam. Untuk itu dilakukan proses-proses seperti memilih ketua yang cerdas (meskipun sering disebut “welut”) atau memperluas dukungan dengan melibatkan tokoh-tokoh dari dukuh-dukuh yang ada. Pada tahap ini gerakan sudah mulai agak terbuka dan eksplosif; seperti gerakan pembabatan tebu di malam hari.

*Tahap terakhir* adalah klimaks dari pengorganisasian mereka; yaitu saat gerakan besar-besaran dan serentak dilakukan dengan menduduki lahan yang telah sekian lama dikuasai oleh TNI AL. Ini adalah puncak keberhasilan pengorganisasian gerakan di Sumberanyar. Sebelum gerakan pendudukan

lahan ini dilakukan, terdapat semacam arus transmisi informasi yang diatur sedemikian rapi hingga tidak mudah diantisipasi oleh TNI AL. Agen-agen organisasi bergerak begitu rupa mulai dari mengatur strategi aksi, menyampaikannya secara hati-hati kepada masyarakat, dan mengomando pergerakan masyarakat pada saat hari H-nya. Hal ini menunjukkan sejak semula pengorganisasian gerakan di Sumberanyar berjalan cukup efektif dengan membawa hasil yang nyata bagi masyarakat.

Hanya saja, sebagai sebuah klimaks, proses seterusnya dari gerak pengorganisasian ini dapat disebut sebagai antiklimaks. Memang organisasi telah berhasil mengoperasikan kerja-kerja besar dalam menghimpun tindakan bersama para petani sebagai sebuah gerakan yang massif dan terbuka berdasarkan rasionalitas dan pengalaman petani sendiri. Namun pada kelanjutannya, ketika organisasi telah menjadi sesuatu yang “rutin”, bagian penting dari nadi kehidupan masyarakat dan menjadi semacam “aturan” baru bagi konsep tindakan mereka, maka kembali individu-individu di sana memakai ukuran pribadinya dalam menilai dan menghayati “kehidupan baru” ini, dengan memberi keleluasaan pada dirinya sendiri untuk bertindak sesuai dengan rasionalitas kepentingan individualnya.

Oleh karena itu, proses dan pentahapan yang tampak dari alur di atas, memang pada satu sisi memberikan peluang pada organisasi dan aktor-aktornya

melakukan pengorganisasian secara efektif dan mampu menyentuh titik penting kesadaran masyarakat. Di sisi yang berbeda, operasi pengorganisasian ini bukanlah satu-satunya determinan bagi para petani untuk selalu terlibat dan bersedia menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya. Terdapat ruang rasionalisasi yang menjadi hak prerogatif masing-masing individu sendiri yang justru memberikan semacam karakter khusus bagi munculnya pilihan-pilihan gerakan dalam sebuah pengorganisasian. Karenanya, pengorganisasian gerakan di Sumberanyar tidaklah berwajah tunggal dengan tingkat homogenitas yang penuh. Kepiawaian para petani sendiri dalam mencari ruang-ruang artikulasi kepentingannya, tidak dapat dipungkiri memberikan andil besar dalam menentukan jenis pengorganisasian seperti apa yang mereka kehendaki dan seberapa jauh sebuah gerakan yang terorganisir tetap memberikan pilihan-pilihan rasional pada mereka untuk menegaskan kepentingannya sendiri.

Guna menganalisis persinggungan dialektis yang mengiringi sebuah proses pengorganisasian yang berlangsung di Sumberanyar di atas, yaitu antara kepentingan pengorganisasian dalam menghimpun suatu tindakan bersama dan kepentingan para petani sendiri dalam menentukan tindakan seperti apa yang harus dilakukan untuk tetap memelihara rasionalitasnya, terdapat empat prinsip pengorganisasian, mengikuti apa yang ditawarkan oleh **Van Vugt**; yaitu *kepemimpinan* atau *otoritas*, *koordinasi*, *keterbukaan* dan *konsensus*. Dua yang

pertama bekerja pada level makro, sedangkan dua yang terakhir berada di dalam level mikro (Van Vugt, 1991: 26-31). Prinsip-prinsip ini akan sangat membantu dalam menjelaskan munculnya kontradiksi-kontradiksi akibat tekanan kebutuhan yang berbeda dan bagaimana ia diselesaikan, yang sekaligus memunculkan suatu karakter khusus dalam pengorganisasian gerakan di Sumberanyar.

#### **6.2.1.1. Kepemimpinan/Otoritas**

Terdapat dua level kepemimpinan dalam pengorganisasian di Sumberanyar. Level pertama ditempati oleh Gus Tofa yang lebih berperan sebagai pemimpin gerakan secara keseluruhan. Level kedua dihuni oleh elit-elit organisasi, seperti Purwo Eko, Mahmud, Lasminto dan Buraji, yang berposisi sebagai operator-operator pengorganisasian. Lingkup yang dimainkan oleh kedua level ini tentu saja berbeda. Implikasi langsung dari perbedaan peran dalam pengorganisasian menjadikan bangunan kapasitas dari masing-masing level ini mencerminkan tingkat kemampuan, kredibilitas, kepercayaan serta otoritas yang lebih bersifat hirarkhis, bahkan ini terjadi di antara operator-operator di level kedua.

Sebagai orang yang menempati level tertinggi, peran Gus Tofa relatif lebih otonom daripada level di bawahnya. Sebagai seorang Gus, ia sekan telah

mendapatkan jaminan ketokohan (*ascribed status*), yang secara tradisional tidak gampang goyah. Latar belakang pendidikannya yang jauh di atas elit-elit organisasi yang lain, menempatkannya sebagai semacam sumber pengetahuan dalam operasionalisasi gerakan. Ia sendiri tetap mampu menjalankan usaha-usaha perekonomiannya tanpa harus terganggu dengan ledakan-ledakan gerakan yang sedang terjadi, sebab memang usaha perekonomiannya tidak terkait langsung dengan kepentingan para petani Sumberanyar. Ia mempunyai usaha peternakan sapi perah, perdagangan dan pemeliharaan rumah sarang burung walet. Semua usahanya tidak bertempat di Sumberanyar Lor, kecuali rumah sarang burung walet milik ayahnya.

Sementara elit-elit organisasi di level kedua sangat menggantungkan signifikansi peran-peran yang hendak dimainkannya dengan operasionalisasi gerakan itu sendiri. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya sebuah gerakan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan para petani terhadap eli-elit ini untuk berperan lebih banyak. Barangkali Buraji merupakan pengecualian dalam hal ini. Kehidupan orang ini sebenarnya sudah relatif sejahtera dengan usaha perdagangan bahan-bahan bangunan dan kebutuhan pertanian yang ia lakukan. Hanya surplus yang ia nikmati tidak menjadikan perannya lebih penting dari elit-elit organisasi sejawatnya. Keberadaannya sebagai seorang

pendatang lebih menjadi alasan mengapa ia tidak harus mengejar peran-peran yang signifikan.

Namun bagi yang lain, organisasi menjadi semacam ruang ekspresi dan eksistensi diri mereka untuk menampakkan kepedulian dan kredibilitasnya di mata para petani. Dengan begitu mereka harus cukup jeli menangkap "*perceived reality*" yang dipahami para petani serta konsekuensi-konsekuensi dari peran yang mereka lakukan. Terdapat keragu-raguan di antara mereka untuk menampakkan kepentingan pribadi mereka dalam persoalan materi. Purwo Eko harus menunda untuk menanam lahan sendiri setelah para petani menikmati hasil dua kali panen dari lahan yang diduduki. Lasminto harus menunggu beberapa lama untuk membuka warung kelontongnya. Atau Mahmud yang masih membiarkan dirinya melajang dan tidak mempunyai pekerjaan. Ini yang mereka sebut sebagai "pengorbanan" dalam posisi mereka sebagai aktivis organisasi.

Namun demikian, posisi otonom yang ditempati oleh Gus Tofa dan "pengorbanan" yang ditunjukkan oleh elit-elit organisasi di bawahnya tidak menjadikan pengorganisasian di Sumberanyar tampak mudah di tangan mereka. Nyatanya, peran mereka sangat bergantung dari cara para petani sendiri melihat posisi masing-masing di antara mereka yang berhubungan dengan kepentingan para petani sendiri. Meskipun dipandang Gus Tofa adalah

tokoh agama, kaya dan baik hati, tapi keterikatannya dengan para petani sangat tergantung dari keberpihakannya secara penuh kepada kepentingan mereka. Independensinya dari kepentingan-kepentingan TNI AL juga menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan petani padanya. Sepanjang ia secara terus menerus mengekspresikan keberpihakannya pada petani dan tetap menjaga independensinya, maka otoritas dalam pengorganisasian akan dengan mudah bersumber dari dirinya.

Posisi yang lebih rumit dihadapi oleh para operator organisasi. Sebagai orang-orang yang bergerak pada level kedua, ekspektasi petani terhadap mereka jauh lebih berat daripada seorang Gus Tofa. Merekalah yang sehari-hari harus berhadapan dengan para petani, menampung segala persoalan serta harus terus memberikan harapan-harapan baru akan nasib perjuangan mereka. Di pihak lain, mereka juga harus menanggung resiko berhadapan dengan sikap orang-orang TNI AL yang tidak jarang mereka gambarkan sebagai teror dan intimidasi.

Di sini, mereka tidak hanya perlu menjaga keberpihakan dan independensi yang menjadi modal utama bagi peran penting mereka dalam gerakan. Tapi lebih dari itu, kecerdasan menempatkan diri dalam sebuah situasi yang mengharuskan mereka tetap berada sebagai bagian dari seluruh petani dengan segala kepentingannya, menunjukkan konformitasnya pada aturan-

aturan organisasi, tetap selalu menjaga irama gerakannya dengan gerakan petani secara keseluruhan dan cara pandang petani sendiri terhadap mereka, mutlak dibutuhkan. Bila mereka tidak pandai menempati posisi ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tergeser ke pinggir. Keadaan ini pernah terjadi pada Akim, salah seorang elit organisasi yang kini tidak lagi berperan. Kesalahan utama yang dilakukan oleh Akim, seperti diceritakan oleh Lasminto, yaitu tidak mampu menempatkan dirinya untuk tidak bergerak sendiri dalam tindakan-tindakan kolektif yang coba diorganisir. Dalam berbagai pertemuan, ia sama sekali tidak menunjukkan keaktifannya sebagai elit organisasi, namun di luar pertemuan ia selalu membuat kasak kusuk yang merisaukan dan bahkan mengganggu proses pengorganisasian.

Di atas itu semua, otoritas kepemimpinan organisasi yang dipegang oleh Gus Tofa dan orang-orang keduanya sesungguhnya juga sangat ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri dalam mengatur sebuah tindakan bersama. Sebab, sebuah operasi pengorganisasian dapat diterima di Sumberanyar lebih dipicu oleh kesadaran petani sendiri dalam menyumbangkan sumber dayanya secara bersama demi hak mereka untuk mengenyam perubahan-perubahan yang berbasis pada tanah. Dus, seluruh gerak pengorganisasian sangat ditentukan dan harus diorientasikan kepada kesadaran petani tersebut. Tanpa itu, gerak pengorganisasian apapun tidak akan banyak gunanya, justru akan

memunculkan tanggapan-tanggapan baru yang malah kontra produktif bagi pengorganisasian itu sendiri.

#### **6.2.1.2. Koordinasi**

Secara sederhana, koordinasi dalam pengorganisasian tentu dimaksudkan untuk memberikan pengaruh kuat kepada para petani tentang betapa pentingnya sebuah tindakan bersama. Melakukan koordinasi berarti juga melakukan aksi-aksi komunikasi dan penyebaran informasi kepada para petani sebagai bentuk nyata kehadiran sebuah pengorganisasian. Apapun yang hendak dilakukan dalam pengorganisasian dan momentum kebersamaan dalam suatu tindakan tidak akan niscaya tanpa keterlibatan kesepahaman para petani akan tujuan-tujuan tindakan mereka, yang hanya bisa dilakukan lewat koordinasi.

Dalam gerakan petani Sumberanyar, koordinasi menampakkan wujudnya pada struktur jaringan gerakan yang dibangun dengan menempatkan petani sebagai unit terbawahnya. Jaringan gerakan yang coba dibentuk, menunjukkan sebuah sistem bekerjanya pola-pola komunikasi dan arus informasi mulai dari otoritas tertinggi hingga sampai pada petani. Tentu hal ini tidak dapat menghindari reduksi-reduksi dari komunikasi dan arus informasi. Tidak semua informasi yang didapatkan oleh elit organisasi, misalnya,

disampaikan secara terbuka kepada para petani. Hanya informasi-informasi yang mendukung keterlibatan petani dalam suatu tindakan bersama yang mesti disampaikan, lebih dari itu, banyak yang menjadi sekadar konsumsi elit.

Pola koordinasi yang dilakukan, di samping menempatkan orang-orang tertentu sebagai pengurus dengan fungsi-fungsi tertentu sebagaimana organisasi pada umumnya, yang kemudian menjadi elit organisasi, di tiap dusun akan ditempatkan seorang koordinator yang diharapkan dapat berperan sebagai pemimpin gerakan di dusunnya masing-masing dan sebagai transmitter kebijakan-kebijakan elit organisasi bagi warga dusunnya. Namun tampaknya para koordinator dusun ini cenderung tidak dapat berubah menjadi elit di dusunnya masing-masing. Sebagai transmitter, tidak ada peran lebih yang dapat ia mainkan kecuali selalu mengikuti garis yang telah ditetapkan oleh elit di atasnya. Informasi yang mereka terima pun adalah informasi yang sudah matang yang hanya tinggal disampaikan kepada warganya. Segala hal yang berkaitan dengan strategi yang sifatnya rahasia hanya terbatas menjadi permainan elit.

Bentuk umum koordinasi yang kerap dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, baik secara terbatas maupun meluas. Hanya ada perbedaan mendasar bentuk koordinasi ini antara sebelum tergelarnya gerakan pendudukan lahan (*reclaiming*) dan setelah gerakan

tersebut berhasil. Bila sebelum *reclaiming*, pertemuan-pertemuan tersebut diatur sangat tertutup, kebanyakan dilakukan di rumah Gus Tofa yang memang tidak mudah diakses dari luar, guna menghindari bocornya gerakan-gerakan yang hendak mereka lakukan. Sebagai sebuah gerakan perlawanan, dalam hal ini kehati-hatian menjadi sangat diperhitungkan.

Jika telah tercapai kesepakatan-kesepakatan, secara hati-hati pula sosialisasi dilakukan dengan memperhitungkan cakupan aksi yang hendak dilakukan. Dalam kasus pembabatan tebu misalnya, aksi ini sengaja hanya melibatkan warga dari sebagian dusun saja di Sumberanyar demi menjaga tingkat kerahasiaan aksi ini sehingga tidak mudah diantisipasi oleh pihak TNI AL, meski skala gerakan dirancang secara massif. Gerakan inipun dilakukan pada malam hari dengan pelaku kelompok-kelompok petani yang diatur bergantian tiap malam. Strategi ini dilaksanakan secara sangat rapi dan hanya diinformasikan kepada sekelompok petani yang hendak melakukan aksinya pada malam itu juga.

Berbeda dengan pertemuan-pertemuan setelah aksi *reclaiming* berhasil dilakukan, pertemuan digelar secara terbuka dan lebih banyak melibatkan para petani. Menurut Mahmud, ini dimaksudkan juga sebagai *show of force*, unjuk kekuatan mereka yang benar-benar solid. Dalam berbagai pertemuan, posisi koordinator dusun menjadi titik yang paling rawan. Ketidakpercayaan atau

ketidakpuasan seseorang saja yang terungkap dalam pertemuan ini, untuk hal yang satu ini mereka seakan bebas mengungkapkannya, membuat seorang koordinator dusun merasa serba sulit. Keluhan Sampurno, koordinator dusun Alaskerbo, kepada peneliti sangat jelas menggambarkan hal ini. Sebagai ujung tombak proses pengorganisasian, dialah yang akan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan para petani. Walau begitu ia tetap saja merasa harus bertahan sebagai koordinator dusun, *“kalau tidak ada saya, siapa lagi yang akan berjuang membantu masyarakat di dusun saya”*, katanya.

Problem yang dihadapi oleh koordinator dusun di atas menjadi penanda bahwa persoalan koordinasi dalam pengorganisasian gerakan di Sumberanyar tidak hanya melibatkan tindakan-tindakan organisasional aktor-aktor organisasi semata, ia juga menyangkut kesadaran dan kebutuhan petani sendiri terhadap suatu koordinasi yang mampu menghimpun tindakan dan kepentingan mereka secara bersama. Kebutuhan ini sudah pasti harus mampu disikapi secara tepat oleh aktor-aktor organisasi lewat pola-pola koordinasi yang mereka selenggarakan, bila ia tidak ingin kehilangan momentum kepercayaan dari para petani.

Basis material gerakan yang lebih bertumpu pada sumber-sumber agraria sebagai titik penting kesadaran petani menyuguhkan penjelasan yang memadai mengenai hal ini. Ketika aktor-aktor tersebut menjalankan proses-proses

koordinasi, maka mereka harus selalu mereproduksi kepentingan langsung para petani terhadap sumber-sumber agraria tersebut untuk disenyawakan dengan logika yang hendak dibangun dalam koordinasi. Memberi keyakinan bahwa bagaimanapun tanah tersebut adalah hak mereka dan adalah juga hak mereka untuk menikmati hasil-hasil yang bisa diperoleh dari tanah tersebut, betapapun sederhana dan kecilnya, dengan sendirinya juga merupakan pencarian kepercayaan petani terhadap cara-cara koordinasi dalam kerja-kerja organisasional mereka.

Selanjutnya, soal interdependensi antar petani menjadi arus penting pula dalam operasi koordinasi ini. Sebagai sebuah gerakan yang mengandaikan tindakan-tindakan bersama para petani, sudah barang tentu dibutuhkan ikatan-ikatan yang meneguhkan solidaritas, kekompakan dan kebersamaan. Secara tradisional, mereka memang telah memiliki ikatan-ikatan kekerabatan dan rasa sepenenderitaan yang terus dipelihara dalam sebuah masyarakat yang komunal di Sumberanyar, semacam solidaritas mekanis yang mengontrol tindakan-tindakan sosial mereka. Ditambah pula dengan kehadiran pemimpin tradisional yang dapat berperan sebagai *solidarity maker* di antara mereka. Namun untuk digunakan sebagai modal sosial bagi sebuah gerakan yang terorganisir, solidaritas semacam ini belumlah memadai. Seperti dijelaskan oleh Lasminto, tidak ada jaminan bahwa ikatan kekeluargaan dapat menjadi modal perjuangan.

Pengikut dan penentang organisasi justru banyak yang berasal dari satu keluarga. Belum lagi terdapat masalah ekonomi, ketiadaan surplus ekonomi dengan sendirinya menempatkan petani dalam perhitungan-perhitungan matematis dan spekulatif tentang keterlibatan mereka dalam gerakan. Ketakutan akan keharusan mengeluarkan uang kembali, seperti yang sudah dialami dengan Sumardi, dapat juga menjadi alasan mengapa solidaritas yang sudah terbangun selama ini tidak cukup melibatkan mereka dalam gerakan.

Karenanya, koordinasi yang dilakukan adalah juga mencari titik-titik temu bangunan solidaritas tradisional para petani dengan tetap meletakkan basis perjuangannya pada soal tanah. Dengan logikanya sendiri Lasminto menjelaskan, karena ini adalah perjuangan tanah maka mestinya tidak ada pembodohan terhadap rakyat sehingga sebagian dari masyarakat kurang mengerti arti dari perjuangan itu sendiri, *“makanya kita adakan model pendekatan, kita datangi mereka dari rumah ke rumah, karena ini kebutuhan kita bersama”*. Penjelasan singkat Lasminto ini sedikit menggambarkan bahwa koordinasi yang mereka lakukan adalah menyangkut pengetahuan dan kesadaran petani dalam terlibat perjuangan. Dengan sendirinya inipun menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak sendiri-sendiri namun membangun sebuah interdependensi antar petani sebagai sebuah kebutuhan bersama yang akan dengan mudah disalurkan dalam sebuah gerakan. Dengan

demikian, solidaritas organis yang diandaikan sebagai modal sosial gerakan secara embrional mulai terbangun, setidaknya-tidaknya terdapat dalam pengorganisasian gerakan ini.

### **6.2.1.3. Keterbukaan**

Kekuatan sebuah gerakan dapat diukur dari cakupan massa yang terlibat, begitu pula kekuatan sebuah gerakan yang terorganisir. Seberapa besar anggota dan pengikut gerakan pada tingkat tertentu menentukan seberapa eksplosif dan kuat gerakan-gerakan yang dimunculkan. Keanggotaan menjadi syarat mutlak hadirnya sebuah organisasi. Dalam konteks pengorganisasian, petani yang menjadi sasaran pengorganisasian dapat dilogikakan sebagai anggota sebuah gerakan. Namun pengorganisasian tidak terbatas hanyalah sebagai sebuah organisasi yang rigid dengan keanggotaan yang ketat, sebaliknya struktur yang sangat cair menjadi karakter dasar pola-pola pengorganisasian yang muncul.

Di Sumberanyar, sekurangnya tercatat 1000 lebih petani yang terlibat dalam pengorganisasian, ini dibuktikan dari “daftar pemohon” yang dihimpun oleh FKTS. Seluruh anggota sudah barang tentu mempunyai basis kepentingan yang sama, menyangkut akses terhadap tanah. Hanya saja, ketika gerakan *reclaiming* dilancarkan tidak semua anggota “mendapatkan” lahan garapan. Di

beberapa dusun, terdapat banyak anggota yang ternyata sama sekali tidak berhasil mendapatkan tanah garapan. Hal ini terjadi sebab tidak semua anggota pada hari pendudukan lahan terlibat, hanya mereka yang ikut turun dalam aksi pendudukan lahan yang berhasil mendapatkan tanah garapan sekaligus memberi batas sendiri atas tanah garapannya. Beberapa petani, seperti Pak Latif, bahkan menentukan batas lahannya menurut luas lahan yang pernah ia miliki jauh sebelum TNI AL masuk.

Namun di sisi yang berbeda, para petani yang tidak kebagian lahan garapan tentu saja sangat kecewa. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi cukup membuat aktor-aktor organisasi kesulitan menemukan solusi yang tepat atas masalah ini. Hingga penelitian ini dilakukan, persoalan ini belum mampu terpecahkan. Dari sini dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya pengorganisasian di Sumberanyar mampu membagi-bagi keuntungan yang didapat karena terlibat dalam sebuah gerakan kepada semua anggotanya. Terdapat unsur-unsur persaingan dan kompetisi perebutan lahan yang tidak mudah diselesaikan oleh FKTS. Ternyata masih ada celah yang bukan tidak mungkin akan menjadi problem serius di kemudian hari. Dan terlihat bahwa organisasi menjadi tidak punya pilihan lain kecuali membiarkan celah ini tetap terbuka dengan mempertahankan gerakan ini untuk tidak tercerai berai, sembari terus berpikir bagaimana persoalan ini diselesaikan.

Dengan demikian, FKTS menempatkan dirinya secara terbuka dalam berbagai kepentingan petani dengan mengakui “hak-hak individual” yang bahkan mereka asumsikan sendiri. Contoh-contoh sebelumnya semakin menegaskan posisi ini. Sangsi apapun yang biasanya menyertai deviasi dalam berorganisasi tidak mudah diterapkan bila persoalannya menyangkut “hak individual” demikian yang sangat bertumpu pada penguasaan lahan. Sebagai sebuah gerakan yang berada dalam sebuah event agraris, menurut **Paige**, organisasi tidak lebih adalah alat yang mau tidak mau harus tetap berada dalam garis perjuangan redistribusi tanah. Pada titik inilah rasionalitas yang dibangun para petani membentuk kesadaran, hingga ekspresi kepentingan apapun dari para petani yang berbasis pada tanah atau lahan garapan mereka harus secara terbuka menjadi bagian dari pengorganisasian itu sendiri. Bagi para petani hal ini bukanlah penyimpangan yang mengganggu proses bekerjanya organisasi mereka.

Selanjutnya, persoalan di atas juga menyangkut aksesibilitas informasi gerakan yang mestinya terus disosialisasikan oleh organisasi, hingga tidak ada yang harus tercecar dan terpinggirkan dari gerakan. Secara evaluatif, Mahmud melihat ini karena para pengurus organisasi, ia lebih memaksudkan istilah pengurus ini pada koordinator dusun, kurang “bertanggungjawab” dalam melakukan proses sosialisasi yang banyak menandakan selektifitas orang-

orang yang hendak diberikan informasi dan juga informasi itu sendiri. Asumsinya, seluruh anggota organisasi mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh informasi dan terlibat aktif dalam gerakan. Walau begitu, Mahmud masih berpandangan bahwa kedudukan yang sama tersebut tidak dengan sendirinya mengantarkan pada keuntungan yang sama pula.

Pada tingkat ini, keterbukaan organisasi yang diasumsikan, setidaknya tidaknya oleh Mahmud, berada dalam posisi yang saling berlawanan. Posisi pertama menyangkut kesediaan organisasi membuka ruang-ruang kepentingan petani sendiri untuk dapat secara ekspresif dimunculkan. Akibatnya, terjadi persinggungan kepentingan di antara para petani sendiri yang tidak mudah diselesaikan oleh organisasi. Di lain posisi, organisasi menghadapi kerumitan pola keanggotaannya yang meluas namun mempunyai basis kepentingan pada lahan yang sama yang tentu saja terbatas. Keterbukaan di atas menjadi relatif tertutup dengan terjadinya proses seleksi guna merasionalkan --secara kebetulan-- perbandingan luas lahan yang telah diduduki dan jumlah anggota organisasi yang relatif banyak. Walaupun proses seleksi demikian sama sekali tidak dikehendaki oleh elit organisasi.

#### **6.2.1.4. *Konsensus***

Aturan-aturan organisasional yang menjadi pedoman suatu operasi pengorganisasian dilakukan, bagi gerakan semacam FKTS sangat memerlukan konsensus para petani sendiri dalam memaknai kebutuhan-kebutuhan mereka serta keuntungan-keuntungan yang hendak didapatkan. Aturan tersebut adalah refleksi kepentingan seluruh petani dalam kolektifitasnya yang hendak merebut “hak tradisional”nya kembali. Forum musyawarah adalah sarana yang tepat untuk itu. Melalui forum ini, petani memanfaatkannya untuk saling berbagi pengalaman dan mengenali permasalahan di antara mereka, serta mempersamakan persepsi dan alat perjuangan. Selanjutnya dari sini dapat dimunculkan kesepakatan perihal tindakan-tindakan bersama yang mesti dilakukan sembari merumuskan konsensus-konsensus yang dibutuhkan.

Tidak terdapat aturan-aturan hasil konsensus yang tercatat di FKTS, yang ada hanyalah sebuah produk AD/ART yang sekadar untuk menunjukkan eksistensi organisasi daripada sebagai aturan dasar dinamika berorganisasi. Hanya yang tampak jelas dari keberadaan organisasi semacam FKTS ini adalah bangunan kesadaran bersama dari para petani pengikut gerakan ini perihal kebutuhan mereka akan organisasi. Kesiapan untuk bergabung dalam gerakan yang terorganisir telah memberikan peluang lebih besar kepada mereka untuk mempermudah jalan merebut tanah yang dikuasai TNI AL. Bekerjanya aktor-

aktor organisasi di tengah mereka telah memberikan jaminan bahwa organisasi adalah sarana yang tepat untuk mereka. Gerakan pendudukan lahan yang berhasil dilaksanakan menjadi bukti kemampuan FKTS dalam memegang kepercayaan dan mengelola kepentingan para petani.

Secara tidak langsung hal tersebut melahirkan semacam aturan konsensual yang diarahkan lurus pada operasi-operasi pengorganisasian gerakan mereka. Yaitu bahwa organisasi adalah satu-satunya alat perjuangan mereka untuk merebut kembali “hak” yang telah dinafikan sekian lama. Dengan menggunakan basis perjuangan tanah, petani mendapati diri mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari bekerjanya proses pengorganisasian yang telah memberikan kemanfaatan langsung secara material pada mereka, berupa tanah garapan.

Selanjutnya, upaya-upaya pengorganisasian tindakan mereka untuk menjadi tindakan bersama adalah konsensus berikutnya. Secara sendiri-sendiri maupun bersama, keyakinan mereka akan manfaat kekompakan dalam perjuangan adalah faktor penting keleluasaan organisasi menghimpun kesadaran perlawanan mereka untuk secara bersama digerakkan menjadi sebuah kekuatan petani dalam menghadapi TNI AL. Ini terjadi sebelum dan sampai gerakan *reclaiming* berlangsung.

Selain hal tersebut dan setelah gerakan reclaiming berhasil dilakukan, yang ada hanyalah gugusan kepentingan-kepentingan individual para petani yang akan cukup rumit membentuk sebuah konsensus. Sehingga tidak mudah bagi organisasi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berserak tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan para petani sendiri dan kesediaan mereka untuk mematuhi. Kesepakatan tentang iuran misalnya, tidak sedikit di antara mereka menunjukkan secara jelas keenggannya untuk membayar, meski telah banyak diyakinkan dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan. Atau kesepakatan tentang hasil panen yang untuk pertama kali tidak dijual terlebih dahulu, tidak satupun petani yang menaatinya.

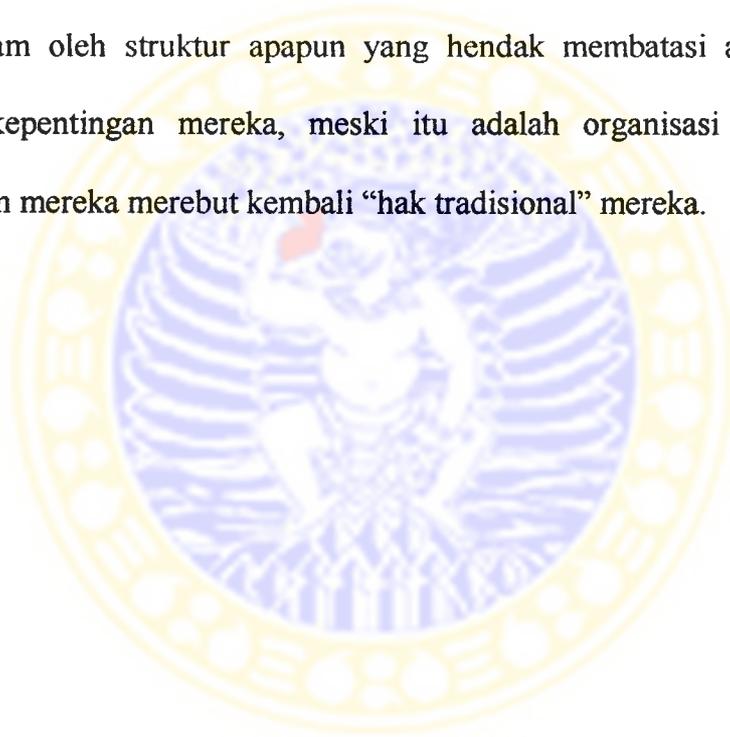
Persoalan ini memunculkan pemikiran bagi Mahmud; bahwa akar masalah ini bukanlah penolakan para petani terhadap aturan-aturan ini, tetapi lebih terletak pada persoalan sosial ekonomi petani sendiri yang memang sangat lemah. Ia pun melihat kemampuan teknis pertanian yang dimiliki petani juga tidak terlalu memadai, terbukti dari hasil dua kali panen jagung yang tidak cukup dikatakan bagus. Karenanya ia berpikir untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan memperkenalkan produk-produk pertanian yang lebih menguntungkan yang tidak hanya terpaku pada jagung atau kacang-kacangan.

Meski pemikiran Mahmud di atas tampak logis, namun sesungguhnya bila dilihat dari sisi pengorganisasian, hal ini merupakan masalah kemampuan para petani sendiri menciptakan konsensus-konsensus di antara mereka yang tidak hanya tergantung pada prakarsa elit dalam membuat aturan-aturan. Telah dijelaskan di muka bahwa aturan-aturan elit tidak dapat secara efektif berlaku bila harus berbenturan dengan kepentingan petani sendiri. Nyatanya konsensus yang berangkat dari kesadaran mereka sendiri jarang dapat muncul sehingga mampu sebagai kontrol dan kendali atas berbagai macam kepentingan dalam suatu kebersamaan.

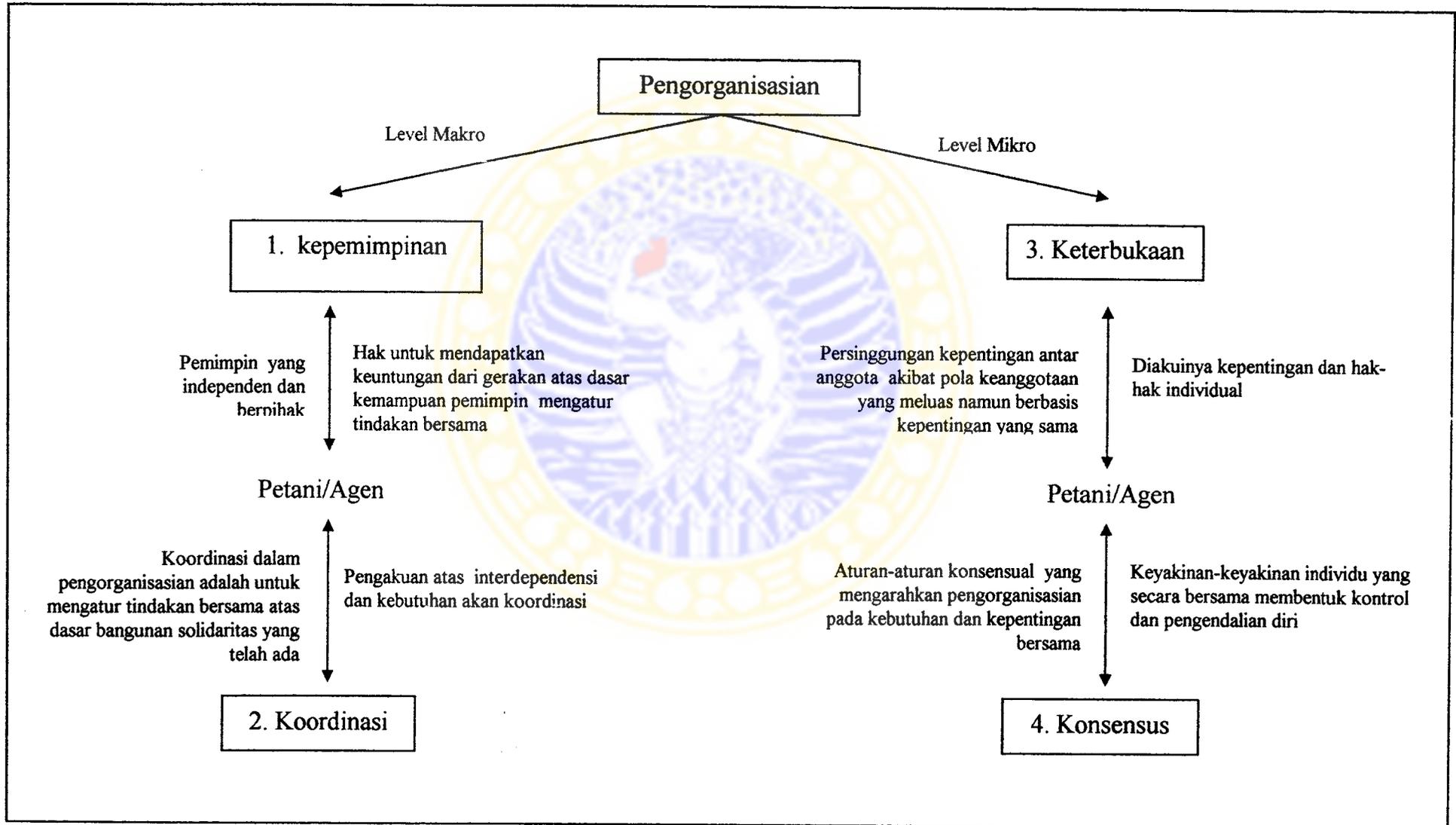
Sekali lagi persoalan ini menjelaskan bahwa kesadaran para petani untuk terlibat dalam sebuah gerakan terorganisir berhenti pada kepentingan mereka terhadap penguasaan lahan. Tindakan bersama yang terakumulasi secara penuh dalam gerakan hanya dapat secara efektif ditunjukkan pada saat pengorganisasian gerakan menuju *reclaiming*. Ketika tanah telah dikuasai, walau tanpa hak legal yang pasti, organisasi kurang mampu mengelola seluruh kepentingan dan rasionalitas petani untuk dapat ditundukkan sebagai kepentingan bersama, dengan demikian adalah juga kepentingan organisasi.

Rasionalitas petani dalam hal ini menjadi otonom yang tidak terpengaruh oleh aturan-aturan organisasional bila dipandang akan membahayakan kepentingan mereka. Ada atau tidak adanya konsensus sangat

ditentukan oleh cara pandang petani sendiri dalam melihat kepentingannya berhadapan dengan kepentingan petani yang lain. Kehadiran organisasi, dengan begitu, menjadi struktur baru bagi mereka yang tidak sepenuhnya berhak melakukan kontrol dan kendali atas kepentingan mereka. Ruang kesadaran mereka adalah ruang di mana kepentingan itu dapat dipelihara dan tidak terancam oleh struktur apapun yang hendak membatasi atau bahkan merenggut kepentingan mereka, meski itu adalah organisasi yang telah mengantarkan mereka merebut kembali “hak tradisional” mereka.



### BAGAN PENGORGANISASIAN PETANI



### **6.2.2. Pengorganisasian dan Kekuatan Perlawanan Petani**

Menyoroti masalah agraria, khususnya tanah, merupakan salah satu persoalan yang sangat prinsip bagi terbangunnya gerakan protes petani sejak jaman penjajahan hingga sekarang. Sejak awal hal ini terbukti. Gerakan protes petani yang berkobar sepanjang satu setengah abad lalu yang dapat digolongkan sebagai gerakan tradisional, baik dalam ideologi, kepemimpinan, dan tujuan selalu memiliki dasar pada struktur agraria yang timpang.

Meskipun daerah pedesaan Jawa pernah mengalami pemberontakan petani serta keresahan sosial selama abad 19 dan pada permulaan abad 20, ternyata ledakan yang terjadi pada kurun waktu 1960-an menunjukkan sifat dan hakekat pergerakan petani yang berbeda sekali dengan dimensi-dimensi yang baru. Dalam gerakan petani pada tahun 1960-an: petani mulai terlibat dalam gerakan politik modern yang merupakan politik revolusioner sebagaimana yang terjadi di Cina, Vietnam, Aljazair, Meksiko, dan lain sebagainya.

Semenjak tahun 1980-an, terutama, hingga kini aksi-aksi protes petani dan kasus-kasus tanah merebak sedemikian banyaknya. Perubahan yang sangat mencolok dalam sengketa tanah saat itu adalah struktur sengketa yang berubah dari sengketa horisontal (sesama petani) menjadi sengketa vertikal (petani

melawan pihak luar), di mana negara berperan aktif sebagai aktor di dalam sengketa tanah yang terjadi. Sengketa tanah banyak terjadi antara rakyat dengan pemilik modal, atau antara rakyat dengan negara, atau antara rakyat dengan pemilik modal yang bekerjasama (bersekongkol) dengan penguasa/negara. Selain dominasi corak sengketa semacam ini, yakni kaum tani bersengketa dengan pengusaha, sengketa tanah antara kaum tani dengan kaum tani sendiri tetap berlangsung, sebagai akibat masih bertahannya kekuatan kaum feodal.

Bisa dibayangkan bila tak satupun perlawanan petani di Indonesia menampakkan keberhasilan yang nyata, sebaliknya yang muncul adalah cerita-cerita tentang kekalahan dan hancurnya gerakan petani. Petani hanyalah sebuah komunitas lokal yang sangat tergantung kehidupan sosial ekonominya pada sumber-sumber agraria yang tersedia, sementara mereka pun tidak memiliki akses kelembagaan yang mampu secara terus menerus memperjuangkan nasib mereka. Di lain sisi, mereka harus berhadapan dengan koalisi kekuatan besar yang memiliki aturan, senjata dan uang yang secara sistematis meminggirkan kepentingan-kepentingan petani untuk sebuah ideologi yang bernama pembangunan.

Pada titik ini, pengorganisasian gerakan untuk lebih memperkuat perlawanan para petani menjadi signifikan. Ketika negara dengan segala

kepentingan dan alat-alat kekuasaannya mampu menggerus dalam hak-hak sosial ekonomi petani dan pada saat yang sama petani hanya mampu menggerakkan perlawanan yang samar, sporadis dan berjangka pendek, maka sistem yang bekerja yang sama sekali tidak menguntungkan petani belum juga dapat dirombak. Pada skala yang lebih lokal, perasaan penderitaan yang menjadi bagian kesejarahan dalam kehidupan petani akibat bekerjanya sistem ini tidak juga lekang, walaupun kehadiran politis para petani ini telah dirasakan oleh negara lewat siasat-siasat cerdas sebuah perlawanan. Suatu pengorganisasian setidaknya telah memberikan jawaban bahwa gerakan petani tidak selamanya dipandang sebagai sebuah perlawanan yang epifenomenal, dengan demikian mudah dihabisi, namun bisa pula tampak elegan, rapi dan halus tapi mempunyai akar grass root yang kuat serta hasil yang lebih nyata.

Peristiwa pengorganisasian petani di Sumberanyar dalam upaya mereka menduduki lahan kembali adalah bukti nyata betapa gerakan petani di desa ini telah memberikan sumbangan penting bagi bangunan kekuatan perlawanan petani yang tidak mudah surut oleh berbagai rintangan, oleh senjata sekalipun. Peristiwa pendudukan lahan adalah realitas yang tak terbantah bahwa kekuatan politik petani kini memasuki era baru di mana posisi mereka di dalam struktur sosial tidak lagi selalu berada di pinggir. Mereka bisa menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan untuk tanah "*sedumuk bathuk senyari bumi*" mereka.

Kesadaran perlawanan yang dibarengi dengan kesadaran menjalin kekompakan dan kebersamaan dalam pengorganisasian untuk sebuah kebutuhan dan kepentingan bersama atas tanah adalah basis utama bagi petani di Sumberanyar dalam menggerakkan perlawanan, betapapun berat resikonya, dan merebut hak tradisional dan sejarah mereka. Resiko tidak lagi harus ditanggung sendiri-sendiri namun terbagi kepada seluruh petani pengikut gerakan sehingga efek ketakutan dan ketidakamanan dapat diminimalisir sembari menggelorakan keberanian dan stamina perlawanan.

Paling tidak ada dua macam kekuatan yang diperoleh dari pengorganisasian tersebut. *Pertama*, perlawanan petani telah menjelma menjadi struktur baru yang berhadapan dengan struktur (negara, pemodal) yang selama ini menindas mereka. Struktur agraria yang timpang selalu menempatkan petani pada posisi yang lemah, tidak penting, dan terabaikan. Munculnya perlawanan terorganisir petani Sumberanyar telah menempatkan mereka, meskipun tidak sebanding, namun mereka berani diperbandingkan. Perubahan struktural semacam ini, menjadi perubahan yang berarti dalam perlawanan petani dibanding dengan sebelumnya.

*Kedua*, selain kuat dalam arti melawan terhadap situasi yang menindas, pengorganisasi juga mampu memberikan daya tahan hidup (*survival*) bagi perlawanan petani itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya kekompakan dalam

kelompok petani, mampu memperpanjang umur perlawanan. Setiap usaha dan siasat, yang dibarengi jalinan kebersamaan di antara mereka, bertujuan agar perlawanan terus dilakukan tanpa henti. Setiap penderitaan dan penindasan yang dialami oleh sebagian anggota kelompok menjadi bagian dari penderitaan bersama. Demikian pula, bilamana mendapat keberhasilan, juga menjadi keberhasilan bersama. Itulah bentuk bangunan kekuatan baru, kekuatan yang bukan hanya untuk merebut kembali tanah, tetapi lebih dari itu; kekuatan hidup dalam kebersamaan.

### **6.3. Implikasi Teoretis Temuan Penelitian**

Konsep-konsep teoretis yang digunakan dalam penelitian ini sebagiannya telah diperkuat oleh temuan-temuan yang didapatkan, namun selebihnya lagi membutuhkan penjelasan baru akibat karakter-karakter khusus yang muncul dari perlawanan petani Sumberanyar. Preposisi-preposisi yang mengikuti penjelasan teoretis bagi temuan penelitian ini telah memberikan konstruksi yang memadai untuk dapat menggambarkan sebuah realitas perlawanan petani di Sumberanyar. Hanya saja, tidak seluruhnya berhasil memotret secara utuh kompleksitas persoalan yang dihadapi petani Sumberanyar dalam menggerakkan perlawanannya. Ini artinya, temuan penelitian ini akan sedikit membongkar singkapan-singkapan fenomena baru

dan khusus yang tidak didapatkan dari penjelasan-penjelasan teoretis sebelumnya.

### 6.3.1. Event Agraris dalam Perlawanan Petani

Dalam berbagai bentuk perlawanan petani termuat gagasan bahwa perubahan struktural yang harus dirasakan petani dalam kehidupan sosial ekonominya berkorelasi positif dengan cara petani menampakkan respon praktisnya untuk tidak begitu saja menerima kenyataan demikian. Perubahan struktural ini bisa menyangkut '*sistem agraria*' yang berlangsung di lingkungan sosial mereka, seperti diperkenalkan oleh **Paige**. Di sisi lain, **Scott** lebih condong untuk melihatnya dalam kerangka '*etika subsistensi*' petani itu sendiri.

Bagi **Scott**, soal etika subsistensi merupakan alat ukur yang terbaik dalam melihat kemunculan perlawanan petani. Sebagai satu prinsip moral dan satu hak akan subsistensi, ia merupakan norma yang dipakai yang bila dilanggar akan segera meletupkan perlawanan. Berangkat dari sini **Scott** sangat tertarik pada perlawanan sehari-hari dan diam-diam petani sebagai sebuah konteks nyata, daripada perlawanan terbuka dan terorganisir yang ia asumsikan dapat muncul dalam konteks historis tertentu, langka dan berusia pendek.

Temuan yang didapatkan di Sumberanyar, sebagian dapat membenarkan teori **Scott** di atas. Terutama pada konteks penderitaan masyarakat Sumberanyar yang telah meruntuhkan lingkungan normatif mereka, sehingga pada titik tertentu memunculkan perlawanan kecil-kecil yang epifenomenal. Namun yang gagal dilihat mengikuti penjelasan **Scott** ini adalah harapan-harapan terpendam petani akan kehidupannya yang lebih baik di kemudian hari. Keterlibatan memori kolektif tentang kesejahteraan hidup di masa lalu, yang di dalamnya tentu saja mengandung harapan-harapan, telah menjadi dasar penting bagi munculnya kesadaran perlawanan mereka berbarengan dengan ketika mereka memasuki masa transisional yang memberikan harapan perubahan.

Meskipun **Scott** telah berhasil memperlihatkan bahwa etika subsistensi yang diendapkan dalam kesadaran normatif para petani sebagai prinsip awal bagi Bergeraknya perlawanan petani, namun kesadaran normatif demikian belum lagi menjadi basis utama dalam pengelolaan kesadaran. Kesadaran perlawanan tidaklah secara inherent akan muncul meskipun tekanan situasi struktural telah begitu mengancam ketahanan subsistensi. Meskipun mereka selalu mempunyai jalan untuk keluar dari semakin intensifnya penindasan yang diterima yang tidak semata-mata bertumpu pada perlawanan terselubung.

Perlawanan diam-diam dan epifenomenal adalah bagian saja dari cara petani memperlihatkan ketahanan daya hidupnya.

Dengan kata lain, perlawanan yang terjadi di Sumberanyar tidak hanya menyangkut keruntuhan daya tahan petani dalam penderitaan hidup, namun yang jauh lebih penting adalah akumulasi harapan-harapan mereka sendiri yang bertemu dengan situasi yang mengantarkan mereka untuk merebut perubahan bagi kehidupan yang lebih baik. Secara material, harapan itu bertumpu pada keberadaan tanah, oleh karenanya harus direbut sebagai katup terurainya harapan-harapan itu. Persoalan tanah adalah sumber utama dari seluruh gagasan tentang perlawanan di Sumberanyar. Ketiadaan akses pada tanah adalah awal dari perjalanan panjang penderitaan mereka. Kekuatan tanah dengan begitu menjadi basis kesadaran petani dalam melihat posisi mereka dalam struktur sosial sekaligus sebagai sebuah perspektif yang menuntun mereka melihat momentum perubahan yang sedang terjadi.

Dengan begitu, fenomena penindasan dan penderitaan petani lebih menjadi pengantar bagi munculnya kesadaran perlawanan mereka yang menghendaki terdapatnya basis material yang jelas. Ia memberikan nilai-nilai normatif-material bagi terbukanya ruang-ruang kesadaran perlawanan tersebut. Sementara itu mereka sendiri masih menyimpan dan memelihara harapan-harapan akan perubahan nasib, betapapun samarnya. Harapan-harapan tersebut

yang didukung dengan memori kolektif yang terus mereka pelihara menemukan katup pembukanya pada terjadinya proses perubahan situasi sosial politik yang secara nyata dapat dirasakan oleh para petani.

Di lain pihak, **Paige** membuat rangkaian penjelasan teoretik tentang hal ini dengan mendasarkannya pada bekerjanya lima sistem agraria dalam banyak pertanian ekspor. Kelima sistem agraria ini akan memunculkan tanggapan-tanggapan politik tertentu, mulai dari respon yang bersifat revolusioner hingga yang masih pada taraf gerakan lokal.

Yang terjadi di Sumberanyar, masalah tanah dan kebutuhan untuk meredistribusikannya menjadi pembatas dari meluasnya tujuan-tujuan politik jangka panjang. Begitu kebutuhan redistribusi tanah telah terpenuhi maka gerakan seperti ini secara berangsur akan menurun tingkat intensitasnya. Karena itu fenomena ini lebih menunjuk sebagai sebuah gerakan atau protes agraria daripada sebagai sebuah revolusi. Ini yang kemudian disebut **Paige** sebagai sebuah “*event agraris*” yang tidak memuat kepentingan lain kecuali soal redistribusi tanah.

Perlawanan petani yang muncul di Sumberanyar tampaknya lebih mengarah pada apa yang dijelaskan **Paige**. Aksi *reclaiming* atau pendudukan lahan di Sumberanyar lebih mirip dengan gambaran **Paige** tentang pemberontakan agraria terhadap sistem perkebunan *hacienda* atau *manor*

*comercial* di beberapa negara Amerika Latin., seperti halnya para petani Nicaragua menduduki lahan perkebunan *hacienda*.

Dengan meletakkan dasar perlawanan mereka pada perjuangan perebutan lahan, maka aksi *reclaiming* menjadi puncak tertinggi gerakan. Keberhasilan aksi ini menjadi titik klimaks perjuangan panjang yang begitu melelahkan sejak mereka mendapatkan kesadarannya untuk melakukan perlawanan secara terbuka. Sehingga gerakan-gerakan eksplosif dan massif relatif terhenti begitu aksi ini dipandang berhasil dan tergantikan oleh rutinitas pengelolaan tanah garapan.

Menurut **Paige**, ini adalah moment di mana petani tidak lebih hanya sebagai partisipan-partisipan gerakan pengambilalihan tanah yang sama sekali tidak melibatkan kelompok-kelompok politik formal tertentu. Secara serempak, petani menduduki lahan-lahan perkebunan demi kebutuhan-kebutuhan material mereka, bukan gerakan yang bersifat ideologis dan politis. Mereka adalah sekelompok kecil orang-orang yang menduduki lahan secara “liar”, tanpa didukung oleh kekuatan hukum yang tetap, bukanlah kekuatan politik yang padu yang memperjuangkan perubahan sistem secara radikal.

Sementara itu, basis kepentingan petani pada tanah sangat mudah untuk dilihat dalam lokalitas kebutuhan dan kesadaran mereka. Meski LBH dengan gagasan pendampingan struktural yang dibawanya ke desa ini mereproduksi

kepentingan-kepentingan petani tersebut sebagai titik masuk perlawanan wacana (*counter discourse*) terhadap ideologi developmentalisme negara, petani tidaklah mempunyai pretensi sejauh yang diusung oleh LBH dan gerakan-gerakan pro demokrasi lainnya. Klimatisasi pendudukan lahan yang mereka pahami adalah juga klimaks dari gerakan ini. Menduduki lahan dan segera menanaminya kembali merupakan harapan tertinggi petani tanpa harus melakukan internalisasi gagasan-gagasan pembaruan agraria maupun perombakan sistem politik yang berpihak pada mereka.

Hal ini searah dengan preposisi **Paige** tentang keterlibatan organisasi-organisasi ekstra lokal. Dijelaskannya, para petani partisipan gerakan dalam event agraris ini terkadang berafiliasi dengan partai atau kelompok politik tertentu, namun mereka sama sekali tidak mempunyai tujuan-tujuan revolusioner. Seperti halnya yang terjadi di Venezuela, di mana pendudukan lahan disponsori oleh Federasi Petani Venezuela yang merupakan kuno dari Partai Reformis Aksi Demokratis di negeri tersebut. Hanya saja tujuan-tujuan partai yang bersifat sosialis revolusioner yang menjadi ideologi gerakan politik partai ini tidaklah merupakan cermin dari event agraris pendudukan lahan yang dilakukan oleh petani sendiri. Petani hanya berkepentingan untuk merebut lahan-lahan tersebut, sementara ideologi partai memasukkan kepentingan itu sebagai bagian saja dari bangunan ideologi revolusioner mereka.

Sebab secara sederhana saja dapat dikemukakan bahwa redistribusi tanah bukanlah akhir dari persoalan-persoalan petani meski ia adalah ujung kepentingan mereka. Mereka harus menghadapi berbagai persoalan turunan menyangkut persinggungan kepentingan individual di antara mereka, ketidakrelaan pemilik semula, terlibatnya para pembonceng, produktivitas lahan garapan mereka hingga yang lebih penting lagi bagaimana mengamankan lahan yang telah mereka duduki. Di sinilah signifikansi suatu pengorganisasian menemukan bentuknya.

### **6.3.2. Rasionalitas dalam Pengorganisasian Perlawanan Petani**

Hanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan di bawah kondisi-kondisi apa pengorganisasian perlawanan petani di Sumberanyar dapat mengumpulkan sumber-sumber daya para petani di sana sehingga dapat diaplikasikan sebagai sebuah proyek kolektif gerakan? Ini adalah satu pertanyaan hipotetik yang diajukan oleh **Popkin** yang didasarkan pada satu pengertian bahwa setiap usaha untuk mengorganisir tindakan kelompok harus mengenal perbedaan antara yang individual dan kelompok dan harus menyediakan kepemimpinan efektif serta insentif-insentif yang cukup untuk mengatasi perlawanan/resistensi individual terhadap tindakan kolektif.

Asumsi **Popkin** yang digunakan di sini adalah bahwasanya manusia pada dasarnya egois, rasional dan selalu berupaya memaksimalkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya, begitu pula para petani yang mengorganisir dirinya dalam sebuah gerakan kolektif. Dengan menggunakan kerangka demikian, petani sesungguhnya mempunyai rasionalitas sendiri tentang kebutuhan dan kepentingannya yang secara reflektif dimunculkan dalam tindakan-tindakan individual. Agregasi tindakan-tindakan individual menjadi tindakan kolektif, karenanya, sangat memerlukan kondisi-kondisi tertentu di mana para petani menurut kepentingan-kepentingan individualnya merasa perlu mengalokasikan sumberdaya mereka untuk kepentingan bersama.

Bila ditarik ke Sumberanyar, rasionalitas yang dibangun para petani di sana dengan berpartisipasi dalam gerakan dengan sendirinya menciptakan kondisi-kondisi itu. Persamaan kepentingan pada lahan perkebunan yang dibarengi dengan perasaan senasib sepenenderitaan akibat bekerjanya kepentingan-kepentingan di luar mereka telah memberikan keleluasaan bagi operasi pengorganisasian pendudukan lahan berjalan secara efektif. Kepentingan individual mereka menjadi jelas di sini; yaitu teraihnya keuntungan material atas pendudukan lahan dimaksud.

Hanya saja, sebagaimana kata **Popkin**, kondisi di atas tidak cukup meletupkan perlawanan, sebab suatu tindakan kolektif memerlukan lebih dari

sekadar konsensus atau intensitas kebutuhan. Kondisi-kondisi pendorong berikutnya harus mampu diciptakan oleh satu pengorganisasian hingga mampu menarik partisipasi para petani menurut rasionalitas dan kepentingan individualnya. Kepemimpinan tradisional, kredibilitas elit-elit organisasi dalam menanamkan kepercayaan kepada petani, wacana yang dibangun yang secara distingtif membedakan antara perjuangan dengan uang dan tanpa uang serta akses informasi yang lebih luas perihal kesempatan-kesempatan perubahan adalah di antara kondisi-kondisi demikian yang mempermudah bekerjanya pengorganisasian pendudukan lahan.

Pada tingkat ini, disparitas antara kepentingan-kepentingan individual dan kepentingan-kepentingan kolektif tidak cukup terlihat. Bangunan rasionalitas dan kesadaran bersama mereka telah begitu kokoh sebagai basis pengorganisasian akibat persenyawaan kedua kepentingan tersebut tidak menimbulkan problem yang berarti, walaupun terdapat pula orang-orang yang harus tersingkir dari arus besar gerakan ini. Cara pengorganisasian mengajak mereka memetakan mana kawan dan mana lawan dan menarik garis tegas kekhasan gerakan mereka yang berbeda dengan gerakan di desa tetangganya mampu meminimalisir resiko resistensi individual dan hadirnya pembonceng-pembonceng (*free-riders*).

Pada babak selanjutnya, saat gerakan pendudukan lahan telah berhasil dilakukan, problem-problem pengorganisasian mulai muncul secara nyata. Ia berhubungan dengan benturan kepentingan individual para petani sendiri dengan kepentingan-kepentingan bersama. Artinya, suatu tindakan kolektif tidak serta merta bisa dilakukan. Hal ini berkaitan dengan resiko dan ketidakpastian yang mengiringi aksi pendudukan lahan ini dan menjadikannya tantangan terberat dalam pengorganisasian. Menurut **Popkin**, pada situasi seperti ini para petani sesungguhnya sedang membuat kalkulasi untung ruginya sendiri tentang hasil-hasil yang diharapkannya dari output-output yang dikeluarkannya.

Karenanya, sangat dimungkinkan munculnya defeksi atau penyimpangan dari beberapa atau banyak petani bila ternyata hal ini justru mampu meminimalisir problem resiko dan ketidakpastian di atas. Menurut **Popkin**, pengorganisasian harus juga memasukkan perhitungan penetapan aturan yang restriktif yang cukup untuk meyakinkan petani bahwa penyimpangan apapun menjadi kurang menguntungkan dibanding apabila tetap berada dalam kelompok dengan segenap solidaritas organiknya.

Hanya saja, aturan-aturan restriktif yang diandaikan oleh **Popkin** di atas tidak banyak gunanya. Dalam konteks Sumberanyar, justru ketidakhadiran aturan-aturan restriktif tersebut telah menciptakan mekanisme baru bagi para

petani untuk mengelola kepentingan individualnya dan sekaligus terus bergabung dalam gerakan. Meskipun untuk soal ini kerap didapati kegagalan dalam pengorganisasian ketika ia harus menyelesaikan problem-problem partisipasi dan konflik internal. Mekanisme penyelesaiannya lebih banyak tergantung pada keterlibatan pemimpin kharismatik sebagai simbol kekompakan daripada diselesaikan lewat aturan-aturan. Seorang pemimpin yang mereka butuhkan, bukan aturan-aturan.

Pengorganisasian di sini tampak dibiarkan cair dan terbuka, dengan memberikan ruang yang cukup lebar bagi bekerjanya rasionalitas otonom para petani sendiri dalam membangun pengertian dan kesadaran atas hasil-hasil pendudukan lahan ini, tanpa adanya keterlibatan aturan-aturan yang secara ketat mengatur dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan individual tersebut. Menariknya dan sekaligus memberikan penjelasan berbeda dari yang diungkap oleh Popkin, justru penciptaan ruang otonom yang demikian itu merupakan bagian dari insentif-insentif khusus yang menstimulir partisipasi yang berkelanjutan dalam gerakan, bila ia dipertautkan dengan perhitungan untung rugi langsung yang dilakukan oleh petani. Bergabung dengan gerakan, dengan demikian, bukanlah hal yang harus mematikan artikulasi kepentingan individual mereka, tetapi justru di sinilah letak keuntungan-keuntungan lanjutan setelah pendudukan lahan yang diperoleh dari gerakan.

Dengan kerangka untung rugi itu pula, kepemimpinan gerakan dapat dinilai kredibilitas dan peranannya. Keberadaan pemimpin ini, yang disebut **Popkin** sebagai *entrepreneur politik*, pada akhirnya sangat ditentukan oleh kalkulasi spekulatif petani itu sendiri. Ketokohan secara tradisional seorang pemimpin tidak menjadikannya secara otomatis selalu harus dianut petani. Ia masih membutuhkan semacam legitimasi publik yang berbasiskan kepentingan petani pada tanah garapannya.

Akhirnya, pengorganisasian gerakan di Sumberanyar adalah sangat terkait dengan kesadaran para petani akan adanya hubungan resiprokal antara kepentingan-kepentingan individualnya dengan kepentingan-kepentingan umum di dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki. Petani hanya akan mau mengalokasikan sumber dayanya pada kepentingan kelompok sejauh kepemimpinan kelompok yang mengorganisir tindakan kolektif mereka mampu menyediakan insentif-insentif khusus. Dengan kata lain, pemimpin gerakan mereka harus dalam posisi bisa meyakinkan mereka bahwa dengan berpartisipasi dalam organisasi atau bahkan menyumbang melalui organisasi maka hasilnya paling menguntungkan mereka.

### 6.3.3. Konsep Kesadaran dalam Perlawanan Petani

Kekayaan pengalaman dan cara berpikir yang dimiliki petani tidak bisa dipinggirkan begitu saja untuk mengkonstruksi sebuah realitas perlawanan. Pada moment tertentu bahkan ia menjadi satu-satunya determinan penting dan menentukan ragam perlawanan seperti apa yang hendak dimunculkan, bukan hanya persoalan tekanan kekuatan yang datang dari luar. Karenanya, sebuah gerakan sesungguhnya juga melibatkan inti kesadaran dari tindakan-tindakan petani itu sendiri.

Mengikuti **Freire**, pada tingkat di mana gerakan petani telah mampu dimunculkan, inti kesadaran mereka sangat dipengaruhi oleh transformasi struktural dalam masyarakat. Panorama perubahan yang dibawa oleh gerakan-gerakan reformasi, dipahami oleh petani Sumberanyar sebagai kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Situasi perubahan yang berkorelasi dengan kebutuhan mereka terhadap tanah garapan adalah konteks nyata bagaimana kesadaran mereka tiba-tiba muncul dan meletupkan perlawanan. Artinya, gerakan perlawanan yang mereka gelorakan secara inherent bukanlah merupakan titik optimum dari akumulasi kemacetan struktural maupun krisis subsistensi, namun betul-betul berangkat dari munculnya situasi transisi dalam masyarakat sebagai ladang tersemainya kesadaran perlawanan mereka. Ini yang

disebut **Freire** sebagai kesadaran semi transitif yang secara perlahan menuju kesadaran penuh.

Kesadaran semi transitif yang dimiliki petani Sumberanyar dimulai dari partisipasi mereka dalam demonstrasi besar-besaran ke Prokimal menuntut dikembalikannya tanah mereka, setelah sekian lama mereka terjebak dalam “budaya bisu” sebagai sebuah masyarakat yang “tertutup”. Kesadaran demikian dengan sendirinya menemukan tempatnya pada kebutuhan petani di desa ini pada tanah garapan, sebagai basis material nyata untuk perbaikan kehidupan ekonomi mereka.

Fase transisi ini pada tingkat berikutnya memberikan peluang yang lebih besar bagi masuknya pengorganisasian menuju apa yang disebut **Freire** sebagai kesadaran transitif yang naif bagi petani Sumberanyar. Mereka telah mempunyai seperangkat wacana yang telah demikian efektif bagi pengelolaan kesadaran serta sangat berguna untuk cara pandang dan rasionalitas mereka dalam menilai pengorganisasian gerakan. Mereka telah mampu menjalin tindakan-tindakan bersama yang berujung pada gerakan pendudukan lahan. Pada tingkat ini peran pemimpin kharismatik menjadi sangat diperhitungkan.

Pengorganisasian, dengan demikian, adalah proses panjang pengelolaan kesadaran dan kepentingan petani sebagai kelompok kekuatan perlawanan. Basis material kekuatan ini tentu saja adalah tanah garapan yang telah mereka

duduki. Basis ini begitu pentingnya sehingga pengelolaan kesadaran yang dilakukan dalam pengorganisasian akan terlihat tidak berguna bila tanpa menyentuh atau bahkan bertolak belakang dengan kepentingan mereka atas tanah garapan.

Kunci penting pengelolaan kesadaran petani sesungguhnya tidak terletak pada proses-proses organisasional yang dilakukan, namun lebih bertumpu pada pembangunan wacana dan penyebaran informasi yang secara reflektif mampu diinternalisasi oleh petani sendiri dan dibantu oleh hadirnya pemimpin yang kharismatik. **Freire** menyebutnya sebagai proses penyadaran atau objektivasi atas pandangan dan cara hidup petani dalam kesehariannya.

Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah terjadinya proses penggabungan antara kesadaran perlawanan mereka secara bersama dengan rasionalitas yang dibangun sendiri-sendiri oleh individu, menyangkut kebutuhan-kebutuhan material yang sangat bergantung pada pemanfaatan tanah. Dengan kata lain, pemanfaatan atas tanah menjadi medium penggabungan kedua anasir di atas. Pada gilirannya hal ini memunculkan ruang baru bagi proses-proses dialektis dalam hubungan yang resiprokal antara kepentingan dan tindakan individu dengan kepentingan dan tindakan kelompok yang diwakili oleh pengorganisasian.

Dengan demikian, petani Sumberanyar tidaklah sedang mengelola kesadarannya yang secara ketat mengikuti pentahapan yang diperkenalkan oleh **Freire**. Tekanan pada situasi struktural yang diusung oleh **Freire** tidak mampu menjelaskan proses dari pergerakan rasionalisasi petani dalam membuka ruang-ruang kesadaran perlawanannya. Terbukanya ruang-ruang kesadaran ini lebih ditentukan oleh cara petani melihat rasionalitas kepentingannya sendiri daripada mengikuti tahap-tahap perubahan struktural, yang diandaikan oleh **Freire** berangkat dari pentahapan kesadaran yang dibutuhkan, mulai dari masyarakat yang bisu hingga ke masyarakat yang berkesadaran penuh dalam situasi yang revolusioner.

Dengan kata lain, yang luput dari perhatian **Freire** adalah terlibatnya rasionalitas yang otonom dari para petani sendiri mengikuti kesadaran perlawanan mereka yang baru saja muncul. Kesadaran mereka tidaklah sepenuhnya secara mekanis diatur dan digerakkan dari luar. Mereka masih menyisakan ruang khusus bagi terpeliharanya rasionalitas mereka, yang betul-betul material, dalam proses-proses pengelolaan kesadaran perlawanan mereka. Muncul atau tidaknya suatu kesadaran benar-benar harus memperhatikan keterlibatan kepentingan-kepentingan individual petani yang berbasiskan pada materi sebagai sesuatu yang rasional menurut mereka. Pengorganisasian sebagai sebuah proses pengelolaan kesadaran telah memberikan mereka hak

mutlak untuk tetap memelihara rasionalitas mereka sendiri. Sebaliknya, mengelola kesadaran tanpa melibatkan rasionalitas otonom yang material tersebut akan segera menemui kegagalan.

Pada tingkat berikutnya, perlawanan petani sesungguhnya juga memuat gagasan perihal dialektika antara petani sebagai agen di satu sisi dan struktur yang terbangun dalam gerakan di sisi yang berbeda. Sebab, gerakan demikian tidak cukup hanya dijelaskan dari situasi-situasi sosial yang melingkupi kehidupan petani tanpa melibatkan bangunan rasionalitas petani sendiri dalam memaknai kehidupan keseharian mereka. Petani bukanlah sekadar obyek dari sebuah tatanan struktural yang membelenggu ataupun organisasi gerakan yang rigid, mereka adalah juga aktor-aktor yang bertindak secara otonom seukur dengan rasionalitas yang mereka pelihara.

Bangunan gerakan pasca pendudukan lahan di desa Sumberanyar, sebagaimana yang telah dijelaskan, telah membuat pengorganisasian menjadi tatanan atau struktur baru hasil dari proses-proses reproduksi sosial yang dibawa oleh gerakan perlawanan petani. Ia kemudian menjadi sesuatu yang 'rutin' yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan kelompok secara bersama. Praktik sosial yang demikian searah dengan konsep *teori strukturasi* yang menekankan pada aspek keterulangan dan rutinitasnya sebuah praktik sosial. Segala sesuatu yang bersifat rutin menjadi elemen dasar kegiatan sosial

sekaligus mengungkap fenomena kehidupan sosial yang terentang dalam ruang dan waktu. Selanjutnya, rutinisasi amat penting dalam mengikat interaksi sosial yang secara konstan mengantarkan proses reproduksi sosial sembari terjadi pula pada institusi-institusi yang tampak tetap pula.

Akibat dari pendudukan lahan ini pula, para petani sebagai agen yang otonom menemukan domainnya sendiri untuk menyemaikan rasionalitas-rasionalitas personal dan material untuk kemudian direfleksikan dalam tindakan-tindakan keseharian mereka atau untuk merespon sesuatu yang baru. Di sinilah ditemukan dualitas antara petani sebagai agen yang otonom dan pengorganisasian sebagai struktur baru, seperti diteorikan oleh **Giddens**.

**Giddens** sendiri memperkenalkan dualitas struktur sebagai bangunan teoretis yang akan menyelesaikan dilema antara *obyektivisme*, dalam konteks Sumberanyar ditunjukkan oleh pengorganisasian gerakan mereka, dan *subyektivisme*, diperankan oleh individu petani dengan kompleksitas rasionalnya. Ia sekaligus memberi penjelasan tentang peran agen dalam sistem sosial. Fokus utama teorinya adalah keyakinan akan kemampuan pengetahuan para pelaku manusia dalam menghadapi kehidupan sosial mereka sehari-hari.

Sebagaimana ditegaskan, struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sebagai sarana dalam praktik sosial. Sebagai hasil (*outcome*), struktur sosial merupakan produk keterulangan tindakan sosial. Dan sebagai sarana (*medium*),

struktur juga bersifat membebaskan (*enabling*) berlangsungnya praktik-praktik sosial baru.

Dengan menggunakan teori strukturasi **Giddens**, didapatkan pemahaman bahwa perlawanan petani yang berlangsung di Sumberanyar lebih mengedepankan peran petani sebagai agen dan kesadaran mereka dalam menentukan gerakan yang hendak dilakukan. Dengan demikian, rasionalisasi petani sendiri menempati posisi yang utama yang telah membuat perlawanan mereka bukanlah sesuatu yang deterministik dan mekanistik. Sebaliknya, perlawanan mereka adalah praktik-praktik diskursif dalam bangunan tindakan-tindakan sosial mereka, termasuk untuk bergabung dalam pengorganisasian serta menentukan tipe-tipe perlawanan.

Namun, posisi teoretis **Giddens** demikian tidak dapat secara general ditarik pada penjelasan terhadap bangunan utuh perlawanan petani sejak sebelum aksi pendudukan lahan. Sebab, pola-pola struktural yang dipetakan oleh **Giddens** menyangkut tingkat signifikansi, dominasi dan legitimasi yang menyertai kehidupan sosial petani serta kemampuan aktor sebagai agen yang bebas, tidak serta merta mengantarkan petani pada kesadaran perlawanan yang mendasari aksi pendudukan lahan. Ia hanya dapat digunakan dalam menjelaskan cara-cara petani memunculkan resistensinya terhadap pola-pola

dominasi dan penindasan sebelum tumbuhnya perlawanan secara massif dan terbuka.

Kesadaran perlawanan lebih muncul dari hadirnya gugusan harapan petani akan kehidupan yang lebih baik yang bertaut dengan momentum perubahan yang secara kuat menstimulasi kesadaran perlawanan mereka. Kesadaran ini pun bukan sesuatu yang secara simultan menjadi praktik-praktik sosial yang nyata sampai dengan meledaknya perlawanan petani secara terbuka. Dengan demikian aksi pendudukan lahan petani Sumberanyar tidak berangkat dari proses reproduksi sosial yang dihasilkan oleh dualitas agen dan struktur, betapapun hadirnya dualitas ini telah berhasil menunjukkan daya tahan dan resistensi petani ketika harus terus menerima penderitaan dan penindasan.

Dus, teori strukturasi mempunyai relevansinya ketika menjelaskan proses-proses pengorganisasian sebagai sebuah proses pengelolaan kesadaran. Rasionalitas dan kesadaran petani pasca pendudukan lahan memberikan jawaban atas proses-proses dialektis yang terjadi ketika petani berkebebasan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan individualnya namun tetap bergabung dalam pengorganisasian sebagai ruang tindakan bersama, bukan sebagai free-riders maupun penyimpang-penyimpang gerakan.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN**

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan terdahulu mengenai *Pengorganisasian Gerakan Kelompok Petani dalam Aksi Pendudukan Lahan Perkebunan di desa Sumberanyar Pasuruan*, peneliti mempunyai beberapa kesimpulan sehubungan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa munculnya aksi pendudukan lahan di desa Sumberanyar Pasuruan lebih merupakan fenomena sosial gerakan kelompok petani yang berada pada event agraris dengan meletakkan basis materialnya pada kebutuhan pemanfaatan lahan perkebunan. Dengan menduduki lahan perkebunan, sekelompok petani Sumberanyar menyatakan kehadirannya secara politis berdasarkan harapan-harapan mereka atas kehidupan yang lebih baik. Situasi penderitaan yang begitu lama mereka alami, ditandai dengan terpisahnya mereka dari tanahnya sendiri, adalah konteks yang bersifat material bagi munculnya gerakan. Hanya ia belum menjadi konteks yang nyata sampai dengan terbukanya ruang-ruang perubahan yang muncul akibat adanya gerakan-gerakan reformasi.

Aksi pendudukan lahan, dengan demikian, menemukan keterkaitannya dengan pengalaman penderitaan petani akibat terlepasnya lahan dan situasi transisional yang menumbuhkan kesadaran perlawanan. Basis perlawanan ini begitu jelasnya; yakni kebutuhan akan tanah. Basis ini sangat menentukan bagi terangkainya tindakan-tindakan individual maupun kolektif dalam kerangka gerakan. Dan ia juga menjadi dasar untuk bekerjanya operasi pengorganisasian gerakan.

Namun yang jauh lebih penting, moment redistribusi tanah dalam event agraris seperti ini menjadikan gerakan di desa Sumberanyar tidak sampai memunculkan kerangka politis dan ideologis yang berorientasi lebih luas daripada sekadar menduduki tanah. Meskipun dengan hadirnya pengorganisasian, sebuah jaringan gerakan telah dibangun dengan melibatkan kelompok-kelompok petani di berbagai daerah dan aktivis-aktivis bukan petani, yang sudah barang tentu mempunyai visi yang lebih luas daripada apa yang dipahamkan petani sendiri, petani hanya mampu memahami kebutuhan mereka sendiri atas tanah daripada mengaitkan tindakan-tindakan mereka pada capaian-capaian politis yang lebih luas.

Secara lebih khusus, aksi pendudukan lahan ini dipahami petani sebagai pengembalian hak-hak tradisional dan historis mereka yang telah begitu rapi mereka simpan dalam memori kolektif tentang kesejahteraan kehidupan mereka

di masa lalu sebelum bekerjanya perkebunan besar. Terlepasnya tanah mereka lebih merupakan kesalahan sejarah meski secara normatif dan legal format mereka tidaklah berada pada posisi yang kuat. Karenanya mereka merasa absah untuk merebutnya kembali, meski hanya sekadar untuk mengulang masa lalu mereka yang sejahtera tanpa harus dipusingkan dengan penjelasan-penjelasan yang bahkan terlalu rumit menurut rasionalitas mereka. Hal ini lebih mirip dengan gagasan millenarianisme dalam perlawanan petani di tanah air sejak masa-masa penjajahan.

*Kedua*, pengorganisasian gerakan yang dilakukan di desa ini lebih menunjuk pada praktek-praktek pengelolaan kesadaran petani sebagai agen-agen yang mempunyai rasionalitas otonom. Perangkat-perangkat organisasional yang digunakan sangat mudah ditundukkan petani ke dalam rasionalitasnya sendiri. Ketepatan melihat basis kebutuhan petani pada pendudukan lahan menjadi senjata ampuh suatu pengorganisasian bekerja di Sumberanyar. Dan gerakan ini menjadi sangat efektif untuk mengantarkan petani melakukan pendudukan lahan dimaksud.

Sebab bagi kelompok petani ini, pendudukan lahan adalah garis akhir kepentingan mereka, gerakan berikutnya adalah bagaimana menjaga dan menyelamatkan kepentingan mereka sendiri pada lahan ini. Peranan wacana yang dibangun dalam pengorganisasian akan sangat berpengaruh dalam

partisipasi dan pilihan-pilihan gerakan yang diikuti oleh petani. Tujuan-tujuan jangka panjang dan meluas menjadi kurang bermakna sepanjang bersimpangan dengan apa yang mereka pahami sendiri dalam hal penguasaan lahan.

Pengorganisasian sebagai sebuah proses pengelolaan kesadaran telah memberikan mereka hak mutlak untuk tetap memelihara rasionalitas mereka sendiri. Sebaliknya, mengelola kesadaran mereka tanpa melibatkan rasionalitas otonom yang material tersebut akan segera menemui kegagalan. Sebab, petani adalah manusia-manusia rasional yang begitu cerdas mengekspresikan kepentingan-kepentingan individualnya ketika harus terlibat dalam sebuah perlawanan. Dengan demikian, mengorganisir mereka dalam sebuah gerakan perlawanan bukan lagi menyangkut krisis subsistensi atau apapun, namun sangat berkait dengan kemampuan petani sendiri membuat kalkulasi untung-rugi untuk bergabung dalam gerakan, dan cara-cara pengorganisasian mendamaikan kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan individu petani.

Sementara itu, ketidakhadiran aturan-aturan restriktif dalam pengorganisasian justru telah menciptakan mekanisme baru bagi para petani untuk mengelola kepentingan individualnya dan sekaligus untuk terus bergabung dalam gerakan. Meskipun untuk soal ini pengorganisasian kerap gagal ketika harus menyelesaikan problem-problem partisipasi dan konflik

internal mereka. Hanya saja, mekanisme penyelesaiannya lebih banyak tergantung pada keterlibatan pemimpin kharismatik sebagai simbol kekompakan daripada diselesaikan lewat aturan-aturan. Seorang pemimpin yang mereka butuhkan, bukan aturan-aturan.

*Ketiga*, kemunculan elit yang ditunjukkan dalam kepemimpinan gerakan, meskipun masih menggunakan elit lama yang berbasiskan kharisma-tradisional-keagamaan, tidak serta merta memberikan batasan-batasan situasional yang hanya menempatkan petani sebagai pengikut-pengikut gerakan yang gampang dimobilisir. Yang berhasil ditunjukkan dalam penelitian ini, bahwa modal sosial apapun yang dibawa oleh elit dalam memberikan pengaruhnya pada petani tidak akan berguna sama sekali bila ia tidak mampu mengaitkan ketokohnya dengan keberpihakan total pada kepentingan petani atas tanah. Tampak di sini, terlibatnya kesadaran dan rasionalisasi petani sendiri dalam memosisikan elit. Tindakan-tindakan yang bersifat partikular yang berdasarkan pada rasionalitas mereka sendiri justru kerap muncul dan berbeda dengan tujuan-tujuan pemimpin mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sartono Kartodirdjo dalam kasus perlawanan petani di Tjimamere.

Hal lain yang ditunjukkan dalam kepemimpinan gerakan adalah meluasnya cakupan aksi-aksi perlawanan yang tidak hanya secara internal hanya menjadi problem masyarakat setempat, namun mampu meluas menjanging

organisasi-organisasi ekstra lokal yang menunjukkan problem dan keberpihakan yang sama. Berbagai informasi dan wacana baru telah begitu efektif mengalir dalam kerangka jaringan ini sehingga mampu memunculkan solidaritas komunal baru yang meluas dan berkelanjutan.

## **7.2. Saran**

Beberapa hal yang dapat di sarankan berkaitan dengan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa studi tentang perlawanan petani tidak lagi hanya bisa dilihat dalam dimensi yang menekankan peranan struktur yang dominan daripada melihat sifat agency dari petani itu sendiri. Kajian-kajian selanjutnya harus lebih banyak diarahkan untuk mengeksplorasi secara lebih serius terhadap proses-proses pengelolaan kesadaran dan rasionalitas petani yang sublim dan personal dalam menggerakkan perlawanan serta menentukan pilihan-pilihan tindakan mereka.
2. Pengorganisasian gerakan petani pada satu dekade terakhir ini menampakkan mulai terpikirkannya akses-akses kelembagaan bagi penyaluran aspirasi politik dan kepentingan-kepentingan petani, betapapun sederhana operasi pengorganisasian yang mereka lakukan. Oleh karenanya, perlu dipikirkan untuk menjadikan momentum

pengorganisasian ini sebagai basis awal dalam membangun demokratisasi di tingkat desa serta menciptakan masyarakat sipil yang berdaya dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara yang berdaulat.

3. Fenomena perlawanan petani yang tidak juga lekang dari sejarah bangsa ini selain menunjukkan aspek dinamis dari kesadaran sosial politik petani itu sendiri, namun yang jauh lebih penting adalah ia menjadi penanda betapa nasib petani selalu harus berada di pinggir. Dibutuhkan tidak sekadar political will negara untuk lebih memperhatikan nasib mereka dengan program-program pembangunan, lebih jauh lagi adalah upaya menegakkan keadilan ekonomi yang dapat langsung mereka rasakan sembari mengurai gugusan problem masa lalu yang sama sekali tidak menguntungkan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adas, Micheal, **Ratu Adil**, Jakarta : Rajawali, 1988.
- Bachriadi, Dianto, *Situasi Perkebunan di Indonesia Kontemporer*, dalam Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, Bonnie Setiawan, **Reformasi Agraria**, Jakarta: KPA dan LPFE UI, 1997.
- , Anton Lucas, **Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan**, Jakarta: KPG, 2001.
- , Erpan Faryadi, Bonni Setiawan (eds) , **Reformasi Agraria**, Jakarta: KPA dan LPFE UI, 1997.
- Bina Desa, Tim, **Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia**, Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an, Jakarta: YAPPIKA dan Sekretariat Bina Desa, 1999
- Harman, Benny K, dkk (eds), **Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah**, Jakarta: YLBHI, 1995
- Cassell, Phillip, **The Giddens Reader**, Stanford: Stanford University Press, 1993.
- Denzin, Norman K, Lincoln YS, **Handbook of Qualitative Research**, London: Sage Publications, 1994.
- Fauzi, Noer, **Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- , *Keadilan Agraria di Masa Transisi*, dalam Tim Komnas HAM, **Keadilan Dalam Masa Transisi**, Jakarta: Penerbit Komnas HAM, 2001
- Frank, Antonio G, **Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi**, Jakarta : Pustaka Pulsar, 1984.
- Geertz, Clifford, **Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia**, Jakarta: LPSB-IPB dan Yayasan Obor Indonesia, 1963.
- Giddens, Anthony, **The Constitution of Society**, Cambridge: Polity Press, 1989.
- Hadiz, Vedi R, **Politik Pembebasan : Teori-teori Negara Pasca Kolonial**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

- Hikam, AS, **Demokrasi dan Civil Society**, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Husken, Francis, Benjamin White , *Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa*, dalam **PRISMA**, No. 4 Tahun XVIII, 1989.
- Kano, Hiroyoshi, *Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa*, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, **Dua Abad Penguasaan Tanah**, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono, **Pemberontakan Petani Banten 1888**, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- , **Ratu Adil**, Yogyakarta: Sinar Harapan, 1984.
- , Djoko Suryo, **Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi**, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1991.
- Komnas HAM, Tim, **Keadilan Dalam Masa Transisi**, Jakarta: Penerbit Komnas HAM, 2001
- Lincoln, Yvonne S, Guba EG, **Naturalistic Inquiry**, London: Sage Publications, 1985.
- Long, Norman, **Sosiologi Pembangunan Pedesaan**, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Lyon, Margo L, *Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa*, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, **Dua Abad Penguasaan Tanah**, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Mahasin, Aswab, *Pola Gerakan Pinggiran*, dalam **PRISMA**, LP3ES, No. 7 Tahun XVIII, 1989.
- Miles, MB, Huberman AM, **Analisis Data Kualitatif**, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moore, Barrington Jr, **Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World**, Middlesex England: Penguin University Books, 1974
- Nasikun, *Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia Dalam Era Pembangunan*, dalam Untoro Hariadi dan Masruchah (peny.), **Tanah, Rakyat dan Demokrasi**, Yogyakarta: Forum LSM/LPSM DIY, 1995.

- Padmo, Sugijanto, **Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965**, Yogyakarta: Media Pressindo, 2000
- Popkin, Samuel L, **Petani Rasional**, Jakarta: Lembaga Penerbit Padamu Negeri, 1986.
- Paige, Jeffrey M, **Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agriculture in The Underdeveloped World**, New York, The Free Press, 1975.
- Pelzer, Karl J., **Toeang Keboen Dan Petani**, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Ritzer, Goerge, **Sociological Theory**, New York: The McGraw-Hill, 1996.
- Roxborough, Ian, **Teori-teori Keterbelakangan**, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sarantakos, Sotirios, **Social Research**, Malbourne: McMillan Education, 1993.
- Scott, James C, **Moral Ekonomi Petani**, Jakarta: LP3ES, 1981
- , **Perlawanan Kaum Tani**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- , **Senjatanya Orang-orang yang Kalah**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Shiraisi, Takashi, **Zaman Bergerak**, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1226, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Suhartono, **Bandit-bandit Pedesaan di Jawa**, Studi Historis 1850-1942, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Sulistyo, Hermawan, *Gerakan Rakyat di Filipina dan Indonesia*, dalam **PRISMA**, No. 7 Tahun XVIII, 1989.
- Suryo, Djoko, *Gerakan Petani*, dalam **PRISMA**, No. 11 Tahun XIV, 1985.
- Tjondronegoro, Sediono MP., **Sosiologi Agraria**, Kumpulan Tulisan Terpilih, Bandung: Yayasan Akatiga, 1999.
- Van Vugt, Johannes P., **Democratic Organization for Social Change**, New York: Bergin & Garvey, 1991
- Yin, Robert K, **Studi Kasus: Desain dan Metode**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000